

KEMENTERIAN PERTANIAN



LAPORAN TAHUNAN BRMP SUMATERA SELATAN



BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN SUMATERA SELATAN

2025

 www.brmpsumsel.go.id

 Jl. Kol. H. Burlan No. 83 Km. 6 Kota Palembang

LAPORAN TAHUNAN

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

TAHUN ANGGARAN 2025



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2025

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya, Laporan Akhir Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Arah Kebijakan pembangunan pertanian nasional tahun 2025 semakin menekankan pentingnya modernisasi pertanian.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi (BRMP) Kementerian Pertanian, BRMP Sumsel kini menjalankan mandat strategis untuk melaksanakan pengembangan, penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi, serta modernisasi pertanian.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai dalam mendukung pencapaian dalam tujuan dan sasaran program Kementerian Pertanian di tingkat daerah, Laporan ini memuat gambaran umum organisasi, pelaksanaan kegiatan, serta capaian kinerja yang telah dilakukan selama periode pelaporan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP Sumatera Selatan seperti Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi, Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan, dan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas pelaksanaan program, serta akuntabilitas kinerja BPMP Sumatera Selatan ke depan. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana transparansi kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya yang telah diberikan.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkerjasama dalam pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan ini. Saran maupun kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 31 Desember 2025

Kepala Balai,



Dr. Rustam, SP., M.Si

NIP. 196906071999031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 I. PENDAHULUAN	
1.1. Tugas dan Fungsi	1
II SUB BAGIAN TATA USAHA	2
2.1. Susunan Organisasi.....	2
2.2. Tujuan dan Keluaran kegiatan Tahun 2025.....	2
2.2.1. Tujuan Kegiatan.....	2
2.2.2. Keluaran Kegiatan.....	3
2.3 Prosedur Pelaksanaan.....	4
2.4 Tenaga dan Organisasi Pada Sub Bagian Tata Usaha.....	8
2.5 Capaian Kinerja.....	9
2.6 Prasarana dan Sarana.....	25
2.7 Keuangan.....	26
2.8 Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	27
2.9 Belanja.....	28
2.9.1. Belanja Pegawai.....	29
2.9.2. Belanja Barang.....	29
2.9.3. Belanja Modal.....	32
2.10. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.....	32
2.10.1. Aset Lancar.....	32
2.10.1.1 Piutang Bukan Pajak.....	32
2.10.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak.....	33
2.11. Penyusunan Laporan BMN.....	34
III SEKSI KERJASAMA DAN LAYANAN PENGKAJIAN	35
3.1. Kerjasama BRMP Sumatera Selatan.....	35
IV PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN EVALUASI	38
4.1 Penyusunan Rencana Program.....	38
4.2 Dinamika perubahan Anggaran (Revisi).....	38
4.3 Monitoring Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi 2025.....	55
4.3.1. Monev Tahap Perencanaan (Monev Ex-Ante).....	56
4.3.2. Monev Tahap Pelaksanaan (Monev On-Going).....	57
4.3.3. Monev Tahap Akhir (Monev Post Evaluation).....	58
4.3.4. Menyusun Rekomendasi Strategis Perbaikan Sistem Berdasarkan Hasil Evaluasi.....	59
4.3.5. Peningkatan Kesadaran pegawai Terhadap Pentingnya Pelaporan Gratifikasi dan Etika Kedinasan.....	60
4.3.6. Pengetahuan Terhadap Pengelolaan Benturan Kepentingan.....	61
4.3.7. Pengetahuan Terhadap Gratifikasi.....	62
4.3.8. Pengetahuan Terhadap Wistleblowing System (WBS).....	63
4.3.9. Implikasi Hasil Sosialisasi.....	64
4.3.10. Peta Resiko Gratifikasi (<i>Gratification Risk Map</i>) Pada Unit Kerja BRMP Sumatera Selatan.....	65
V KINERJA HASIL KEGIATAN	70
5.1. Kegiatan Pendampingan program Strategis Kementerian Pertanian.....	70
5.1.1. Pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT) Reguler.....	70

5.1.2. Pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Gogo.....	83
5.1.3. Pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT) cetak Sawah Rakyat.....	90
5.1.4. Pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT) Optimalisasi Lahan Rawa.....	93
5.2. Produksi Benih Sumber Padi (150 Ton Benih Padi SS).....	98
5.2.1. Prosedur Penangkaran Benih.....	98
5.2.2 Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan Padi.....	99
5.3. Penguatan Kapasitas Penerapan Standar Dalam Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan produksi Tanaman Pangan.....	105
5.3.1. Bimbingan Teknis Padi Terstandar mendukung Swasembada Pangan di Sumatera Selatan.....	105
5.3.2. Demplot Budidaya Padi Terstandar Mendukung Swasembada pangan di Sumatera Selatan.....	109
5.4. Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standarisasi.....	110
5.4.1. Mengidentifikasi Kapasitas Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Perbenihan Padi.....	111
5.4.2. Mengevaluasi Penerapan Standar Pembenihan Padi Mendukung Tercapainya Perjanjian Kinerja BRMP Sumatera Selatan.....	112
VI KESIMPULAN	114

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tujuan, Keluaran dan Rincian Aktivitas Kegiatan Sub. Bagian Tata Usaha Tahun 2025.....	3
2. Sumberdaya yang terlibat dalam kegiatan subbag Tata Usaha.....	8
3. Data Pegawai per 31 Desember 2025.....	10
4. Daftar Pegawai yang Pensiun Tahun 2025.....	11
5. Daftar Pegawai yang Naik Pangkat Tahun 2025.....	11
6. Daftar pegawai yang naik jabatan fungsional tahun 2025.....	11
7. Daftar pegawai PPPK Tahap 1 dan PPPK Tahap 2 tahun 2025.....	12
8. Keadaan Kekayaan Barang Bergerak yang Dikelola Lingkup BRMP Sumatera Selatan tahun 2025.....	25
9. Anggaran dan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.....	27
10. Anggaran dan Realisasi PNBP Semester II TA 2025.....	27
11. Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya Semester II TA 2025.....	28
12. Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025.....	28
13. Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025 Berdasarkan Program.....	29
14. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025.....	29
15. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 Berdasarkan Jenis.....	30
16. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan.....	31
17. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun 2025.....	32
18. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024..	33
19. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025.....	34
20. Neraca BMN.....	34
21. Kegiatan Kerjasama BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025.....	35
22. Dinamika Perubahan Anggaran Tahun 2025.....	39
23. Rekomendasi Strategis Perbaikan Sistem Kerja Berdasarkan Hasil Evaluasi.....	63
24. Matriks Risiko Gratifikasi BRMP Sumatera Selatan.....	64
25. Data breakdown Realisasi LTT per Kecamatan Triwulan IV 2025.....	71
26. Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Kab. Lahat S.d Desember 2025.....	72
27. Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Kabupaten Musi Rawas 2025.....	73
28. Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Kabupaten OKU Selatan 2025.....	74
29. Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Kabupaten PALI 2025.....	77
30. Realisasi Tanam Kota Palembang (Jan-Des) 2025.....	79
31. Realisasi LTT Padi Reguler Kota Prabumulih s.d. Desember 2025.....	80
32. Realisasi Tanam LTT Reguler Kota Pagar Alam.....	81
33. Realisasi Tanam Padi di Kota Lubuk Linggau Tahun 2025.....	82
34. Prosedur Penangkar Benih Padi.....	98
35. Sebaran Varietas dan Luasan Lahan.....	99
36. Hasil Ubinan Kegiatan Perbenihan Padi.....	103
37. Hasil analisis Statistik Uji Wilcoxon.....	108
38. Tingkat Pengetahuan Petani Terhadap Standar Perbenihan Padi.....	112
39. Tingkat Kepatuhan Petani dalam Penerapan Standar Instrumen Pertanian...	113

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
1.	Pelaksanaan Pengelolaan BMN.....	2
2.	fasilitasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan BMN.....	9
3.	Pengadaan Pakaian seragam dinas pegawai.....	10
4.	Pengadaan Pakaian seragam batik pegawai.....	13
5.	Pemeliharaan gedung/bangunan rumah Dinas.....	13
6.	Pemeliharaan gedung/bangunan rumah tamu/mess.....	14
7.	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor bertingkat.....	14
8.	Pemeliharaan Halaman Kantor.....	18
9.	Pemeliharaan Kebun Percobaan.....	19
10.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.....	20
11.	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya.....	20
12.	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.....	21
13.	Pengembangan Kompetensi Pegawai.....	22
14.	Tingkat Pengetahuan Pegawai Terhadap Pengelolaan Konflik Kepentingan.....	23
15.	Tingkat Pengetahuan Pegawai Terhadap Gratifikasi.....	65
16.	Tingkat Pengetahuan Pegawai Terhadap Whistleblowing System (WBS).....	66
17.	Koordinasi dan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kegiatan.....	67
18.	Pengolahan lahan.....	100
19.	Persemaian Padi.....	100
20.	Pelaksanaan Tanam Perbenihan Padi di Desa Sukanegara.....	101
21.	Pelaksanaan Penyemprotan Hama dan Penyakit.....	101
22.	Pelaksanaan Panen dan Pasca Panen.....	102
23.	Pengambilan Sampel Benih dan Pengemasan serta Pelabelan Benih.....	103
24.	Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test Pelaksanaan Kegiatan.....	104
25.	Demplot Budidaya Padi Terstandar Mendukung Swasembada Pangan di Sumatera Selatan.....	108

I. PENDAHULUAN

1.1. Tugas dan Fungsi

Memasuki tahun 2025, arah kebijakan pembangunan pertanian nasional semakin menekankan pentingnya modernisasi pertanian. Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, BSIP beralih menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Sejalan dengan itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025, BBPSIP resmi bertransformasi menjadi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP Penerapan), dan BPSIP Sumsel berubah menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sumsel. BPMP Sumsel kini menjalankan mandat strategis untuk melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian di bawah koordinasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

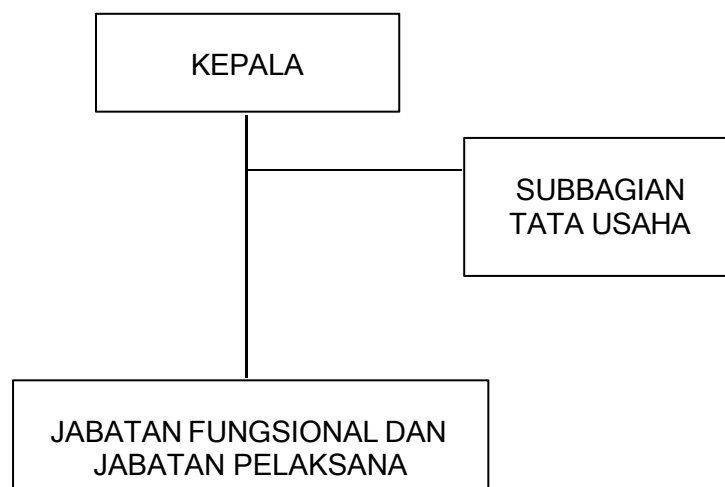
Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Permentan Nomor 10 Tahun 2025, BPMP Sumatera Selatan atau BRMP Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian, 2) Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi serta model pertanian modern, 3) Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber dan penilaian kesesuaian, 4) Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian, 5) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan SNI. 6) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, 7) Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta serta modernisasi pertanian, 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BRMP.

Terhitung tanggal 30 Desember 2025, berdasarkan Permentan RI Nomor 39 Tahun 2025, seluruh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian di Indonesia bertransformasi menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Perubahan ini juga menaikkan eselonisasi dari Eselon IIIa menjadi Eselon IIb. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di tahun kedepan memiliki tugas utama mengoordinasikan dan melaksanakan penerapan hasil perakitan serta perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, sekaligus mendorong modernisasi pertanian melalui pengujian, diseminasi, pendampingan, dan kerja sama dengan berbagai pihak.

II. SUB BAGIAN TATA USAHA

2.1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. BRMP Sumatera Selatan dipimpin oleh Kepala dan terdiri atas Sub bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. BRMP Sumatera Selatan secara teknis dibina oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP). Adapun struktur oprganisasi BRMP Sumatera Selatan tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BRMP Sumatera Selatan

2.2. Tujuan dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025

2.2.1. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah optimalisasi layanan dukungan manajemen internal BRMP Sumatera Selatan dalam melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian melalui penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah

tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

2.2.2. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan adalah

- a. Terlaksananya pengelolaan BMN.
- b. Terlaksananya layanan kerumahtanggaan dan Umum
- c. Terlaksananya layanan Gaji dan Tunjangan
- d. Terlaksananya layanan operasional dan pemeliharaan kantor
- e. Terlaksananya layanan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W)

Adapun rincian aktivitas keluaran kegiatan Subbagian Tata Usaha BRMP Sumatera Selatan pada Tahun 2025 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan, Keluaran dan Rincian Aktivitas Kegiatan Sub. Bagian Tata Usaha Tahun 2025

No	Tujuan	Keluaran	Rincian Aktivitas
1.	Optimalisasi layanan urusan penatausahaan barang milik/kekayaan negara	Pengelolaan BMN	1) Proses administrasi barang milik negara 2) Pengelolaan barang milik negara
2.	Optimalisasi layanan urusan tata usaha, rumah tangga, persuratan dan kearsipan	Layanan kerumahtanggaan dan Umum	1) Layanan Kepegawaian, 2) Layanan Keuangan 3) Layanan Ketatausahaan, 4) Layanan Rumah Tangga, 5) Layanan Kearsipan 6) Layanan perlengkapan
3.	Optimalisasi layanan urusan keuangan	layanan Gaji dan Tunjangan	1) Pembayaran Gaji, 2) Pembayaran Tunjangan, 3) Pembayaran Uang Makan, 4) Pembayaran Uang Lembur
4.	Optimalisasi layanan urusan prasarana sarana dan urusan sumber daya manusia	Layanan operasional dan pemeliharaan kantor	1) Layanan Keperluan Sehari-Hari Perkantoran 2) Langganan Daya Dan Jasa 3) Pemeliharaan Kantor 4) Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 5) Pengembangan Kompetensi Pegawai

5.	Optimalisasi layanan urusan keuangan	layanan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W)	1) Penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara tingkat satker dan wilayah UAPPA/B-W semester II, semester I dan triwulan III, 2) Pendampingan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Inspektorat Jenderal 3) Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TL-LHP) BPK maupun Inspektorat Jenderal.
----	--------------------------------------	---	--

2.3 Prosedur Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Pengelolaan BMN

Administrasi serta pengelolaan barang milik negara.

b. Layanan Kerumahtanggaan dan Umum

o Layanan kepegawaian

- ✓ Updating SIM ASN, My ASN, E-Mutasi
- ✓ Melayani konsultasi layanan kepegawaian
- ✓ Menyampaikan usulan berkas administrasi kepegawaian seperti penerbitan SK kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, KARPEG, TASPEN, ASKES, KARIS, KARSU, dll.
- ✓ Mengelola perizinan pegawai seperti cuti, dll
- ✓ Membuat rekap absensi dan melaporkan ke pimpinan apabila ada indikasi pegawai yang melanggar disiplin
- ✓ Memproses usulan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai
- ✓ Memproses DUPAK, usulan pengangkatan, pemberhentian jabatan fungsional
- ✓ Inventarisasi kebutuhan peningkatan SDM melalui kegiatan diklat dan non diklat.
- ✓ Kontrak PPNP
- ✓ Fasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan SDM.
- ✓ Mengevaluasi hasil Diklat dan non Diklat
- ✓ Mensosialisasikan Peraturan-peraturan Kepegawaian
- ✓ Melakukan Pembinaan Jasmani dan Rohani

- ✓ Melaksanakan Regrouping dan Menyusun Peta Jabatan
- ✓ Menyusun Daftar Nominatif Pemangku Jabatan
- ✓ Menyusun dan Menyediakan Bahan Penilaian Prestasi Pekerjaan berupa Sasaran Kerja Pegawai
- Layanan keuangan
 - ✓ Penetapan organisasi dan personalia pengelola anggaran
 - ✓ Penetapan mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban anggaran
 - ✓ Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan anggaran
 - ✓ Pencairan anggaran, penerbitan SPM dan SP2D
 - ✓ Mengikuti workshop penyusunan laporan keuangan semester II, I dan triwulan III
 - ✓ Pendampingan pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - ✓ Rekonsiliasi dengan KPPN, KPKNL
- Layanan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan dan perlengkapan.
 - ✓ Pengiriman surat-surat dinas
 - ✓ Pengumpulan, klasifikasi dokumen dan pelaksanaan pengarsipan
 - ✓ Membuat kuesioner survey kepuasan pelanggan internal serta merencanakan pelaksanaan surveinya
- c. Layanan Gaji dan Tunjangan

Prosedur Pembayaran Gaji dan Tunjangan

 - Pembuatan daftar gaji dan tunjangan melalui aplikasi gaji web
 - Pengajuan verifikasi ke PPK
 - Pengajuan persetujuan ke PPSMP
 - Pengiriman ADK ke KPPN
 - Pembuatan SPP dan SPM
 - Approval tanda tangan elektronik dan OTP oleh PPSPM untuk penerbitan SP2D.
 - Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ke rekening masing-masing pegawai
- d. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - Kebutuhan sehari-hari perkantoran
 - ✓ Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti
 - ✓ Keperluasn sehari-hari perkantoran lebih dari 40 pegawai,

- ✓ langganan internet/zoom/canva/capcut,
- ✓ pakaian seragam batik pegawai dan pakaian seragam dinas pegawai.
- Langganan daya dan jasa
 - ✓ Listrik
 - ✓ Air
- Pemeliharaan kantor
 - ✓ Pemeliharaan gedung/bangunan (Rumah dinas, rumah tamu/mess, kantor tidak bertingkat, kantor bertingkat, halaman kantor, kantor kebun percobaan)
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2, Kendaraan Roda 3, Perpanjangan SNTK roda 4/ roda 3/ roda 2, Mutasi Kendaraan Roda 2, Hand Traktor dan Traktor Roda 4)
 - ✓ Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Laboratorium, PC, Notebook, CCTV, Perangkat Zoom, Laptop, Sound System, Televisi, AC, Mesin Rumput, Generating Set, Instalasi Listrik/Air/Telepon, Printer dan sarana prasarana Internet.
- Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
 - ✓ Keperluan perkantoran antara lain konsumsi dalam rangka kegiatan jamuan tamu, pertemuan, rapat, dll serta cetak media informasi dan dekorasi
 - ✓ Honorarium Operasional Satuan kerja antara lain honorarium bendahara pengelola Pnbp, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji tagihan Penandatanganan SPM, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Anggpta/Petugas UAPPA/Barang-EL dan Pejabat pengadaan barang/jasa.
- Pengembangan Kompetensi Pegawai
 - ✓ Identifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan dan magang yang dilakukan oleh tim SDM, selanjutnya dibuat matriks kebutuhan dilakukan oleh analis kepegawaian
 - ✓ Mengusulkan kepada kepala Balai untuk nama-nama nominatif
 - ✓ Mengirimkan usulan calon peserta ke lembaga pendidikan/pelatihan/ magang
 - ✓ Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan/ pelatihan/ magang

- ✓ Mendokumentasikan kegiatan
- ✓ Melaksanakan kegiatan internal terkait pengembangan kompetensi pegawai dengan menyediakan Jasa Profesi dan Makan Minum pertemuan

e. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W)

Tahapan kegiatan masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan mutu manajemen satker
 - Melaksanakan Tinjauan Umum Manajemen
 - Melaksanakan Audit Internal
 - Melaksanakan Audit Resertifikasi ISO 9001:2015
 - Melaksanakan Perbaikan Audit
 - Mengendalikan Dokumen dan Rekaman
2. Administrasi Perkantoran dan Administrasi Kepegawaian
 - Administrasi Perkantoran
 - Menyusun SK Organisasi dan Pengelola Anggaran
 - Melaksanakan Penyusunan Surat Keputusan Kegiatan
 - Menyusun atau Memperbaharui SOP
 - Melaksanakan pengelolaan keuangan belanja dan pendapatan
 - Mengajukan SPP dan SPM
 - Melaksanakan UP, TUP dan GUP
 - Melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN
 - Menatausahakan Surat Menyurat
 - Pembinaan Administrasi Kepegawaian
 - Menyusun Nominatif Tunjangan Kinerja dan Perubahannya
 - Mendokumentasikan Kegiatan
3. Pengelolaan Perlengkapan, Kearsipan dan SAI.
 - Menyusun pengelola anggaran perlengkapan, kearsipan dan SAI
 - Melaksanakan perekaman data transaksi pada aplikasi SAKTI dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran
 - Melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL
 - Membuat daftar kearsipan, perbaikan daftar barang ruangan
 - Menyusun dan membuat laporan SAI secara berkala
 - Melaksanakan penatausahaan BMN

2.3. Tenaga dan Organisasi Pada Sub Bagian Tata Usaha

Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan pada sub bag Tata Usaha, maka personil yang terlibat seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Sumberdaya yang terlibat dalam kegiatan subbag Tata Usaha

NO	Nama/NIP	Jabatan dalam Kegiatan	Uraian Tugas	Alokasi Waktu (Jam/minggu)
1.	Rosidah, SE, M.M	Kasubbag TU	Mengkoordinir kegiatan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, BMN dan pelaporan	25
2.	Nurlena, S.P.	Pengadministrasi dan Penyaji Data Kepegawaian	Melaksanakan kegiatan Kepegawaian sampai pelaporan	20
3.	Sherly, SE	Pengadministrasi Keuangan	Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sampai pelaporan	20
4.	Diah Ismiah S.TP	Verifikator Keuangan	Melaksanakan verifikasi keuangan	20
5.	Harjuma, A.Md.	Pelaksana kegiatan Rumah tangga dan Pemeliharaan sarana/prasarana	Melaksanakan kegiatan rumah tangga dan pemeliharaan sarana/prasarana sampai pelaporan	20
6.	Vinna Septiana, A.Md.	Pengelola Laboratorium	Melaksanakan kegiatan laboratorium sampai pelaporan	20
7.	Rizky Wiraswasti, A.Md	Petugas SIMAK BMN	Pengelola SIMAK BMN	20
8.	Muhtiar Fikri, A.Md.	Petugas SAK	Pengelola SAK	20
9.	Erni Herawati, S.E.	Bendahara Pengeluaran	Melaksanakan pengelolaan keuangan satker	20
10.	Lince Sitorus, S.E.	Bendahara Penerimaan	Melaksanakan pengelolaan PNBPN	23
11.	Triaster Agusalm, SS	Penghimpun dan Pengolah Data	Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sampai pelaporan	20
12.	Anita Karlina, S.E.	Pengelola keuangan dan Petugas Pengelola Belanja Pegawai	Melaksanakan administrasi Keuangan dan Pengelolaan Belanja Pegawai	20
13.	Joko Usman	Caraka	Melakukan tugas Caraka	20
14.	Andi Irna Amilia, S.TP., M.A	Penelaah Teknis Kebijakan	Melaksanakan kegiatan rumah tangga dan pemeliharaan sarana/prasarana sampai pelaporan	20

2.5. Capaian Kinerja

a. Pelaksanaan Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN yang menjadi tanggung jawab Sub Bagian Tata Usaha adalah proses administrasi serta pengelolaan barang milik negara.



Pada bulan September 2025, BRMP Sumsel selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) menerima asistensi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait pengelolaan administrasi dan teknis BMN terutama dalam hal pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan. Tak hanya sebatas asistensi, Tim KPKNL juga sekaligus memonitoring optimalisasi pemanfaatan BMN berupa tanah serta gedung/bangunan milik BRMP agar dapat mendukung penuh kegiatan modernisasi pertanian. Tim KPKNL juga memonitoring tindak lanjut rekomendasi pengelolaan BMN yang telah diberikan sebelumnya untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan aset negara.

Pada bulan November 2025, BRMP Sumsel melaksanakan fasilitasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan BMN di Provinsi Sumatera Selatan baik dalam bentuk koordinasi langsung ke instansi terkait (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Sembawa, Sekolah Menengah

Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa Kabupaten Banyuasin dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan). BRMP Sumsel juga melakukan fasilitasi pengelolaan Barang Milik Negara dalam bentuk Workshop Pengelolaan BMN Lingkup Kementan di Wilayah Sumatera Selatan di BRMP Sumatera Selatan. Workshop ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aset BMN sekaligus memperkuat sinergi antarsatker dalam pengelolaannya dengan menghadirkan narasumber dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian dan KPKNL Palembang.



b. Layanan Kerumahtanggaan dan Umum

o Layanan kepegawaian

Keadaan pegawai BRMP Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Data Pegawai per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1.	PNS	16	28	44
2.	CPNS	1	2	3
3.	PPPK	2	2	4
4.	PPPK Paruh Waktu	7	5	12
5.	PPNPN	2	0	2
Jumlah		28	37	65

Sepanjang tahun 2025 terdapat 3 (tiga) pegawai yang memasuki masa pensiun. Data Pegawai yang dimaksud tersaji pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Daftar Pegawai yang Pensiun Tahun 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tmt Pensiun	Ket.
1.	I KETUT WARKEN EDI 196506151992031001	PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA	2025.07.01	BUP
2.	RAJULIS 196707271999031001	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2025.08.01	BUP
3.	SURI EMMA 196509011993032001	PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA	2025.10.01	BUP

Sepanjang tahun 2025 juga terdapat 3 (tiga) pegawai yang naik pangkat, seperti tersaji pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Daftar Pegawai yang Naik Pangkat Tahun 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Naik Pangkat	Tmt KP
1.	SUSILAWATI, S.P., M.Si. 197008102003122001	PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA	Pembina TK I/ IVb	01-04-2025
2.	SITI KHUSNIYATI, S.P 197104242005012001	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	Penata Muda TK I/ IIIb	01-08-2025
3.	MAULIDA SURAYYA, S.P., M.Sc 198711142015032001	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	Penata Muda TK I	01-08-2025

Pada tahun 2025 terdapat 35 (Tiga Puluh Lima) Pegawai yang kenaikan gaji berkala (KGB) dan juga 4 (empat) pegawai yang naik jabatan fungsional sebagaimana terlihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Daftar pegawai yang naik jabatan fungsional tahun 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Tanggal Pelantikan
1.	MASITO, S.Pt., M.Sc 198603302009122007	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	ANALIS STANDARDISASI AHLI PERTAMA	22-05-2025
2.	Dr. drh. AULIA EVI SUSANTI, M.Sc 198304022008012016	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	ANALIS STANDARDISASI AHLI PERTAMA	22-05-2025
3.	NURLENA, S.P 197603282005012002	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	22-05-2025

No.	Nama/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Tanggal Pelantikan
4.	SITI KHUSNIYATI, S.P 197104242005012001	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	22-05-2025

Pada tahun 2025 juga terdapat pengangkatan PPPK tahap 1 sebanyak 1 orang dan PPPK tahap 2 sebanyak 2 orang sebagaimana ditunjukkan pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Daftar pegawai PPPK Tahap 1 dan PPPK Tahap 2 tahun 2025

Tahap	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Kelas Jabatan
PPPK Tahap I	SURYA ATMAJA NIP.198909132025211009	PPPK / V	Pengadministrasi Perkantoran	5
PPPK Tahap 2	AGUS SETIAWAN, S.I.KOM NIP.199208122025211062	PPPK / IX	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
	SHERLY AGUSTINE, S.T.P. Nip. 198108302025212013	PPPK / IX	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8

- o Layanan keuangan

Kegiatan layanan manajemen keuangan meliputi penyusunan laporan keuangan semester II tahun 2024, penyusunan laporan keuangan semester I dan triwulan III tahun 2025, pertanggungjawaban dan pencairan anggaran tahun 2025, penyusunan laporan penerimaan PNBK.

- c. Gaji dan Tunjangan

Kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan di BRMP Sumatera Selatan mencakup pembayaran gaji pokok, tunjangan, uang makan, dan lembur bagi PNS dan PPPK dari Januari hingga Desember 2025, dengan total realisasi sebesar Rp. 3.871.585.626 atau 98,23 % dari pagu anggaran Rp 3.941.164.000,-, menyisakan anggaran sebesar Rp 69.578.374,-.

- d. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Hasil kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi :

- 1. Kebutuhan sehari-hari perkantoran

- a. Pembayaran Honor PPNPN.

Pada tahun 2025, BRMP Sumatera selatan melakukan pembayaran honor PPNPN untuk 18 Orang Pegawai.

- b. Keperluan sehari-hari perkantoran

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyusun daftar ajuan kebutuhan

tiap bulannya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melihat kesesuaian bahan/barang/jasa dengan ajuan sebelumnya pada bagian urusan administrasi rumah tangga dan perlengkapan. Keperluan sehari-hari ini meliputi pengisian galon air, pengisian gas, alat dan bahan kebersihan dan kebutuhan rumah tangga kantor lainnya.

c. Langganan internet

Di Tahun 2025 dilakukan pergantian provider penyedia layanan internet dari Myrepublic ke PT. Mega Artha Lintas Data untuk mengoptimalkan penyediaan jaringan internet.

d. Pengadaan Pakaian seragam dinas pegawai



e. Pengadaan Pakaian seragam batik pegawai.



2. Langganan daya dan jasa

Langganan daya dan jasa dalam bentuk langganan Listrik PLN dan Langganan Air PDAM bulanan selama 1 tahun.

3. Pemeliharaan kantor

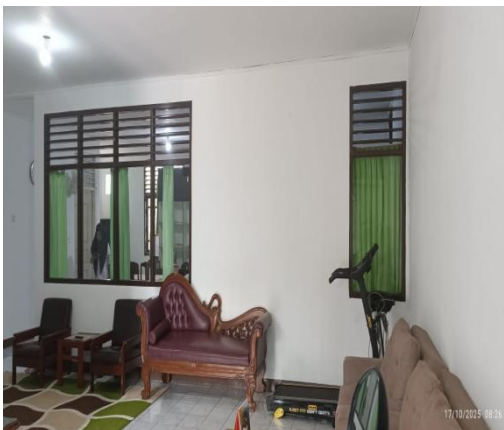
- Pemeliharaan gedung/bangunan rumah Dinas.

Pemeliharaan gedung/bangunan rumah dinas di Tahun 2025 dilakukan dalam bentuk pengecatan dinding bagian dalam rumah dan plafon dan pembuatan backdrop televisi, Kisi-Kisi dan Moulding Ruang Tamu



- Pemeliharaan gedung/bangunan rumah tamu/mess.

Pemeliharaan gedung/bangunan rumah tamu/mess di Tahun 2025 dilakukan dalam bentuk Pengecatan cat kusen pintu dua daun, Pengecatan kusen dan jendela satu daun, pekerjaan pengecatan dinding luar, Pekerjaan Pengecatan dinding dalam, Pengecatan cat Boyvenli WC, Pengadaan ambal Turkey, Pengadaan TV, Pengadaan guling dan bantal, pengadaan Seprei.





Pengecatan cat kusen pintu dua daun



Pengecatan kusen dan jendela satu daun



Pengecatan kusen dan jendela dua daun



Pekerjaan Pengecatan dinding luar



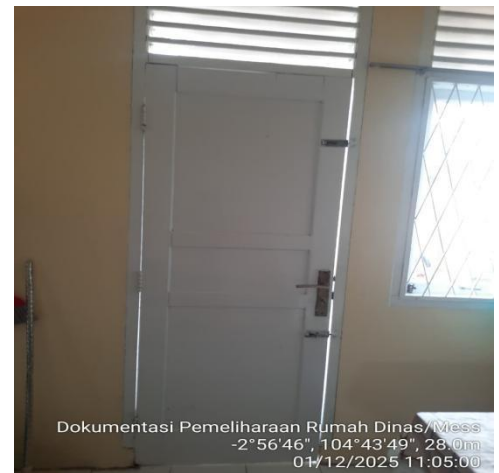
Pengecatan cat kusen pintu satu daun



Pekerjaan Pengecatan dinding dalam



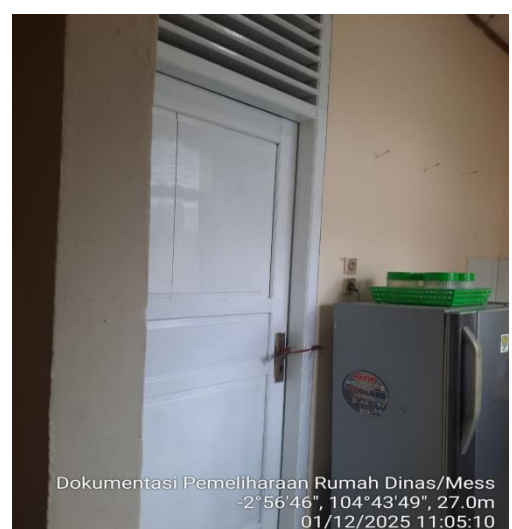
Pekerjaan Pengecatan cat Boyvenli WC



Pengecatan cat kusen pintu satu daun



Pengecatan kusen dan jendela satu daun



Pengecatan cat kusen pintu satu daun



Pengecatan kusen dan jendela satu daun



Pengecatan kusen dan jendela dua daun



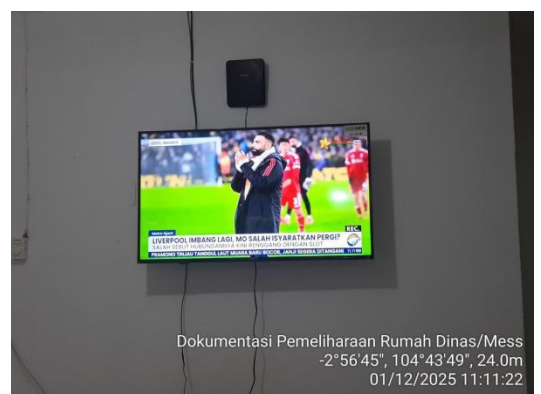
Pengecatan cat kusen pintu satu daun



Pengecatan kusen dan jendela satu daun



Pengadaan Ambal Turkey



Pengadaan TV



Pengadaan Bantal guling



Pengadaan Seprei

- Pemeliharaan gedung/bangunan kantor bertingkat



Pengerjaan Partisi Dinding Kaca Toilet

Pengerjaan Partisi Dinding Kaca Toilet



Pengerjaan Partisi Dinding Kaca Toilet

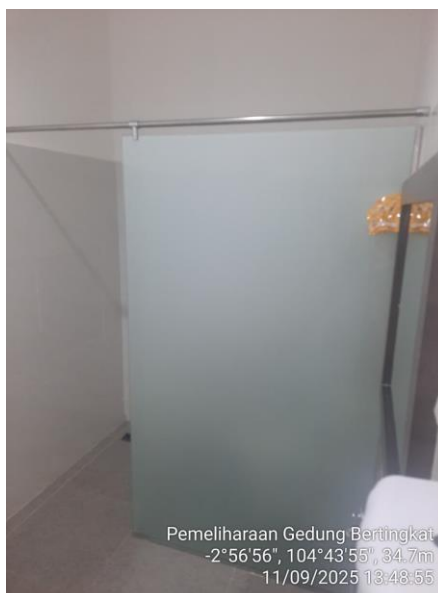
Pengerjaan Partisi Dinding Kaca Toilet

- Pemeliharaan gedung/bangunan kantor tidak bertingkat

Pemeliharaan dilakukan dalam bentuk penataan pos satpam dan aula kantor seperti pengecatan.

- Pemeliharaan Halaman Kantor

Pemeliharaan halaman yang dilakukan pada tahun 2025 dalam bentuk pengaspalan halaman, pengecatan halaman, pemasangan penutup saluran air, penataan taman halaman (penimbunan, hidroponik, pengelolaan screen house)



serta penebangan pohon- pohon tua di lingkungan BRMP Sumatera Selatan

Kondisi Sebelum Pengaspalan Halaman



Kondisi Setelah Pengaspalan Halaman



Penutupan saluran air, dan penimbunan tanah untuk taman kantor



Pengecatan Halaman Kantor



Penebangan Pohon Tua di Halaman Kantor



Pemasangan instalasi hidroponik



Pengelolaan Screenhouse

o Pemeliharaan Kebun Percobaan

Pemeliharaan pada Kebun Percobaan berupa perbaikan atap gedung



Kondisi Sebelum Pemeliharaan atap



Kondisi Setelah Pemeliharaan atap

4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

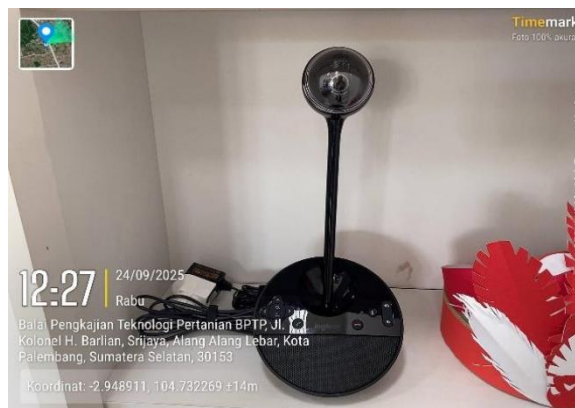
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin meliputi pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2, Kendaraan Roda 3, Perpanjangan SNTK roda 4/ roda 3/ roda 2, Mutasi Kendaraan Roda 2, Hand Traktor dan Traktor Roda 4. Pemeliharaan ini dalam bentuk bahan bakar minyak dan perbaikan kendaraan dinas.





5. Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya meliputi pemeliharaan Alat Laboratorium, PC, Notebook, CCTV, Perangkat Zoom, Laptop, Sound System, Televisi, AC, Mesin Rumput, Generating Set, Instalasi Listrik/Air/Telepon, Printer dan sarana prasarana Internet.



Pengadaan Kamera Zoom

4. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor

a. Konsumsi dalam rangka kegiatan jamuan tamu, pertemuan, rapat, dll



b. Cetak media informasi dan dekorasi.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk cetak spanduk, baliho maupun umbul-umbul



- c. Pembayaran Honorarium Operasional Satuan kerja antara lain honorarium bendahara pengelola Pnbp, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji tagihan Penandatanganan SPM, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Anggpta/Petugas UAPPA/Barang-EL dan Pejabat pengadaan barang/jasa.

5. Pengembangan Kompetensi Pegawai

Dalam rangka meningkatkan kemampuan komunikasi, memperkuat kepercayaan diri, serta memahami teknik penyampaian pesan yang efektif dan inspiratif, khususnya dalam mendukung peran ASN sebagai pelayan publik BRMP Sumsel melaksanakan Workshop Public Speaking dengan tema "Communication and Action, Memperkuat Peran ASN melalui Komunikasi Efektif" pada Senin (24/11/2025) bertempat di Aula BRMP Sumsel. Kegiatan ini menghadirkan H.M. Andriko Okta Pratama, ST., CPS., CHT. sebagai narasumber.



Pada tanggal 4 Desember 2025, BRMP Sumsel juga melaksanakan seminar motivasi dengan menghadirkan Kurniawan, SP., MM. Sebagai narasumber.



BRMP Sumsel juga melakukan peningkatan kompetensi personil laboratorium melalui Pelatihan Teknis Laboratorium Tanah dan Pupuk pada tanggal 25–28 November 2025 dari para ahli dan mentor BRMP Tanah dan Pupuk.

Selama kegiatan, peserta menerima penjelasan materi teknis, mengikuti demonstrasi metode analisis, dan memperoleh pendampingan dalam penguasaan prosedur kerja laboratorium yang lebih efektif, akurat, dan efisien. Fokus pelatihan meliputi pendalaman teknik analisis tanah dan pupuk, peningkatan akurasi metode pengujian, pemahaman standar mutu, serta penggunaan peralatan laboratorium berbasis teknologi terbaru. Selain itu, peserta juga mempelajari inovasi-inovasi analisis yang mendukung percepatan layanan dan peningkatan kualitas hasil uji.



e. Pelaksanaan Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN yang menjadi tanggung jawab Sub Bagian Tata Usaha adalah proses administrasi serta pengelolaan barang milik negara.

f. UAPPA/B-W

Realisasi kegiatan UAPPA/B-W Menyusun laporan keuangan semester II tahun 2024 tingkat provinsi Sumatera Selatan, laporan keuangan semester I dan triwulan III tahun 2025, pendampingan audit BPK, pendampingan satker dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan bersama Biro Keuangan dan BMN.

2.6. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan standar instrumen pertanian perlu ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana. Kantor BRMP Sumsel berada di atas lahan seluas 5.100 m². Di tanah ini berdiri beberapa gedung yang difungsikan untuk kegiatan administrasi dan tenaga fungsional dengan luas lantai dasar 369,36 m², gedung keuangan 178,22 m², gedung pelayanan teknis (laboratorium, perpustakaan) dengan luas lantai dasar 470,69 m², luas garasi kendaraan bagian bawah 173,46 m² dengan bagian belakang berlantai dua, Pos Satpam 36,19 m², gudang 78,59 m², menara air 14,34 m² dan luas aula 648,65 m². Kebun Percobaan Kayuagung dengan luas lahan 26,6 ha, status tanahnya adalah hak guna pakai. Berada di Desa Sidakorsa Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan agroekosistem Lebak. Kebun ini dapat dijangkau dengan mudah dari Palembang dengan kendaraan roda empat. Berada di tepi jalan Trans Sumatera. Berdasarkan tipenya maka KP ini memiliki lahan lebak dalam 49,4%, lebak tengahan 19,4% dan lebak dangkal 31,2% dari luas lahan. Kebun ini berada pada ketinggian 31 m di atas permukaan laut. Adapun KP. Karang Agung dengan luas 20 ha, status tanahnya adalah pinjaman. Berada di Desa Sukamulia Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. Untuk menjangkau kebun ini, setelah mengendarai kendaraan roda empat dari Palembang kurang lebih 3,5 jam, maka dilanjutkan dengan menggunakan speed boat selama 30 menit. Agroekosistem kebun ini pasang surut, bertipe luapan B/C yang berada pada ketinggian 29 m di atas permukaan laut.

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, maka di lingkup BRMP Sumsel saat ini terdapat 8 kendaraan dinas roda empat, sedangkan fasilitas lapangan terdiri dari alat angkut bermotor roda tiga 4 unit, traktor tangan 4 unit, Transplanter 1 unit, perontok gabah 2 unit, box dryer 2 unit dan ditunjang dengan beberapa fasilitas untuk pengolahan benih. Lebih lanjut mengenai keadaan kekayaan barang bergerak lingkup BPSIP Sumatera Selatan sampai akhir tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 8. Keadaan Kekayaan Barang Bergerak yang Dikelola Lingkup BRMP Sumatera Selatan tahun 2025 Kendaraan Roda Empat, Roda Tiga dan Roda Dua

No	Jenis Kendaraan	No. Polisi	Pemakai	Posisi Kendaraan	Keterangan
1.	Toyota Kijang Innova(Bensin)	BG 1753 RZ	Ka. Balai	BRMP	Roda Empat

No	Jenis Kendaraan	No. Polisi	Pemakai	Posisi Kendaraan	Keterangan
2.	Toyota Kijang Innova(Bensin)	BG 1342 RZ	Ka. Balai	BRMP	Roda Empat
3.	Toyota Kijang Innova(Solar)	BG 1073 RZ	Pool Kendaraan	BRMP	Roda Empat
4.	Suzuki Vitara	BG 1501 LZ	Pool Kendaraan	BRMP	Roda Empat
5.	Toyota Kijang	BG 1472 MZ	Pool Kendaraan	BRMP	Roda Empat
6.	Toyota Kijang	BG 1993 LZ	Pool Kendaraan	BRMP	Roda Empat
7.	Toyota Hilux Double Kabin	BG 9786 MZ	Pool kendaraan	BRMP	Roda Empat
8.	Toyota Hilux Pickup	BG 9505 MZ	Pool kendaraan	BRMP	Roda Empat
9.	Toyota Hilux Pickup	F 9846 MZ	Pool kendaraan	KP Kayu Agung	Roda Empat
10.	Traktor NT 540 F		Pool kendaraan	BRMP	Roda Empat
11.	Traktor JD 5054		Pool kendaraan	BRMP	Roda Empat
12.	Viar	BG 6414 PZ	Umum	KP Kayuagung	Roda Tiga
13.	Viar	F 5371 A	Umum	KP Kayuagung	Roda Tiga
14.	Viar	F 5398 A	Umum	KP Kayugung	Roda Tiga
15.	Viar	BG 6415 PZ	Umum	KP Karang Agung	Roda Tiga
16.	Viar	BG 2914 AAZ	Umum	BRMP	Roda Tiga
17.	Yamaha YT 125	BG. 6292 NZ	Umum	KP. Kayu Agung	Roda Dua
18.	Yamaha YT 125	BG. 6293 NZ	Tukiran	BRMP	Roda Dua
19.	Yamaha YT 125	BG. 6295 NZ	Joko Usman	BRMP	Roda Dua
20.	Yamaha YT 125	BG. 6296 NZ	Pool	BRMP	Roda Dua
21.	Yamaha Vega ZR	BG. 2861 AAZ	Ka Balai	BRMP	Roda Dua
22.	Yamaha Vega ZR	BG. 2862 AAZ	KSPP	BRMP	Roda Dua
23.	Suzuki A100	BG. 5844 NZ	Suklandi	BRMP	Roda Dua
24.	Kawasaki Klx 150	F. 3359 B	Pool	BRMP	Roda Dua
25.	Honda Vario 150cc	BG 2508 ABA	Kasubag TU	BRMP	Roda Dua

2.7. Keuangan

Adapun Anggaran dan Belanja BBRMP Sumatera Selatan Pada Tahun 2025 tersaji pada tabel 9. berikut.

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi s.d 31 Desember 2025	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.1	150.000.000	252.094.151	168,06	197.318.908
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		150.000.000	252.094.151	168,06	197.318.908
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	3.941.164.000	3.904.040.788	99,06	3.869.522.147
Belanja Barang	B.2.2	6.085.180.000	6.008.018.046	98,73	4.974.828.355
Belanja Modal	B.2.3	50.000.000	49.997.800	100,00	0
JUMLAH BELANJA NEGARA		10.076.344.000	9.962.056.634	98,87	8.844.350.502

2.8. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar sebesar Rp. 252.094.151 atau mencapai 168,06% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 150.000.000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Anggaran dan Realisasi PNBPN Semester II TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%
425	Pendapatan PNBPN Lainnya			
425112	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	150.000.000	214.438.000	142,96
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi		2.528.138	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		35.128.013	0,00
Jumlah		150.000.000	252.094.151	168,06

Realisasi sebesar Rp252.094.151 pada satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan berasal dari Penjualan benih padi SS, benih jagung, telur itik, ayam afkir sebesar Rp214.438.000, serta Rp35.128.013 berasal dari setoran pengembalian kelebihan tunjangan fungsional peneliti yang tidak beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp252.094.151 atau 168,06% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp150.000.000. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp54.775.243 atau 27,76% dibandingkan 31 Desember 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 11. Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya Semester II TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	150.000.000	214.438.000	124.367.356	90.070.644
Pendapatan Lain-Lain	0	35.128.013	72.951.552	(37.823.539)
Jumlah	150.000.000	252.094.151	197.318.908	54.775.243

2.9. Belanja

Realisasi Belanja Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp9.962.056.634 atau 98,87% dari anggaran belanja sebesar Rp10.076.344.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	3.941.164.000	3.904.040.788	99,06	3.869.522.147
Belanja Barang	6.085.180.000	6.008.018.046	98,73	4.974.828.355
Belanja Modal	50.000.000	49.997.800	100,00	0
Jumlah	10.076.344.000	9.962.056.634	98,87	8.844.350.502

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program Semester II TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp)
Program Dukungan Manajemen	7.590.905.000	7.496.100.648	98,75	6.826.204.182
Program Nilai Tambah dan Daya Saing	156.539.000	155.142.197	99,11	1.334.567.353
Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.328.900.000	2.310.813.789	99,22	683.578.967
Jumlah	10.076.344.000	9.962.056.634	98,87	8.844.350.502

2.9.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.904.040.788 dan Rp3.869.522.147. Realisasi belanja Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp34.518.641 atau 0,89%. Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025 menurut klasifikasi.

Tabel 14. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	3.796.947.000	3.770.675.779	99,31	3.786.367.555
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0,00	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0,00	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	122.857.000	118.701.009	96,62	65.526.592
Belanja Lembur	21.360.000	14.664.000	68,65	17.628.000
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0,00	0
Jumlah	3.941.164.000	3.904.040.788	99,06	3.869.522.147

2.9.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 dan Semester II TA 2024 masing-masing sebesar Rp6.008.018.046 dan Rp4.974.828.355. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Semester II TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Barang	3.422.475.000	3.402.239.652	99,41	2.608.240.334
Belanja Barang Operasional	1.327.808.000	1.327.576.314	99,98	1.434.691.625
Belanja Barang Non Operasional	1.039.423.000	1.022.042.920	98,33	1.107.909.194
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	1.055.244.000	1.052.620.418	99,75	65.639.515
Belanja Jasa	920.642.000	918.698.314	99,79	367.048.690
Belanja Jasa	920.642.000	918.698.314	99,79	367.048.690
Belanja Pemeliharaan	953.053.000	951.994.827	99,89	858.582.867
Belanja Pemeliharaan	953.053.000	951.994.827	99,89	858.582.867
Belanja Perjalanan Dinas	789.010.000	735.085.253	93,17	1.140.956.464
Belanja Perjalanan DN	789.010.000	735.085.253	93,17	1.140.956.464
Belanja Perjalanan LN	0	0	0,00	0
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00	0
Jumlah	6.085.180.000	6.008.018.046	98,73	4.974.828.355

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri cukup mengalami penurunan dikarenakan di TA 2025 banyak kegiatan yang masih di blokir dan dikurangi biaya perjalanan dinasnya dikarenakan adanya instruksi dari Kementerian Keuangan terkait Efisiensi Anggaran, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Tujuannya adalah mendukung program

prioritas Presiden RI. Adapun belanja barang yang sangat mengalami kenaikan adalah di belanja jasa, dikarenakan di Tahun 2025 adanya kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian dan kegiatan Benih Sumber Padi 150 Ton SS yang ada item Sewa Kendaraan, Sewa Traktor Roda 2 dan Roda 4 serta Sewa Combine untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp1.052.620.418 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Barang	0	0	0	0
Belanja Barang Operasional	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0,00	0,00
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan	1.055.244.000	1.052.620.418	99,75	65.639.515
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	40.902.000	40.820.709	99,80	65.639.515
Belanja Barang Persediaan bahan baku	1.014.342.000	1.011.799.709	99,75	0,00
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00	0,00
Jumlah	1.055.244.000	1.052.620.418	99,75	65.639.515

2.9.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025 dan Semester II TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp49.997.800 dan Rp0. Rincian anggaran dan realisasi sampai tanggal 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	49.997.800	100	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	50.000.000	49.997.800	100	0

Adapun belanja modal sebesar Rp 49.997.800 tersebut berupa pembelian Neraca Analitik, Hot Plate dan Stirer, APD dan Rak peneris gelas yang digunakan untuk menunjang kinerja Laboratorium Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.

2.10. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

2.10.1. Aset Lancar

2.10.1.1 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp35.127.093. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar

(Rp35.127.093) atau (100%) apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan adanya pelunasan piutang dari kelebihan pembayaran tunjangan fungsional peneliti di tahun berjalan, sehingga piutang pada posisi 31 Desember 2025 adalah nihil. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4259	Pendapatan Lain-Lain	2024	0	35.127.093	(35.127.093)
	Jumlah		0	35.127.093	(35.127.093)

2.10.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan (Rp175.636). Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp175.636 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	0	175.636	(175.636)
	Jumlah	0	175.636	(175.636)
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan	0	0	0

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Operasional BLU			
	Jumlah	0	0	0
Jumlah		0	175.636	(175.636)

Penyisihan piutang pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0 dikarenakan piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional peneliti telah dilakukan pelunasan.

2.11. Penyusunan Laporan BMN

Nilai Barang Milik Negara pada BRMP SUMATERA SELATAN (018.09.1100.567495.000.KD) PER 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp152.794.625.589 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	1.071.651.351,
131111	Tanah	132.155.022.147,
132111	Peralatan dan Mesin	12.542.999.083,
133111	Gedung dan Bangunan	24.582.005.462,
134111	Jalan dan Jembatan	225.352.357,
134112	Irigasi	748.265.000,
134113	Jaringan	13.373.500,
135121	Aset Tetap Lainnya	6.500.000,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12.058.186.809,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.394.410.055,)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(36.450.218,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(134.925.124,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(13.373.500,)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	168.558.000,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(81.755.605,)
J U M L A H		152.794.625.589,

III. SEKSI KERJASAMA DAN LAYANAN PENGKAJIAN

3.1. Kerjasama BRMP Sumatera Selatan

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan, yang sebelumnya bernama BPSIP Sumatera Selatan, secara konsisten membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Kerja sama ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, UK/UPT kementerian/kemaba di daerah, perguruan tinggi, sekolah kejuruan, lembaga teknis, dan sektor usaha guna mendukung pengembangan pertanian yang modern, adaptif, dan berbasis kebutuhan spesifik lokasi di Sumatera Selatan. Secara spesifik, Kegiatan Kerjasama di tahun 2025 disajikan pada Tabel X.

Tabel 1. Kegiatan Kerjasama BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Judul Kerjasama	Mitra	Waktu
1	Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Layanan dan Pendampingan Teknologi Pertanian Di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	25 April 2022 s/d 25 April 2025
2	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Di Bidang Pertanian	Universitas Sriwijaya	18 Februari 2022 s/d 18 Februari 2025
3	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di BPSIP Sumsel	SMK B. INDO SAINS	11-07-2022 s.d 11-07-2025
4	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di BPSIP Sumsel	SMKN 1 Tanjung Lago	18-09-2023 s.d 18-09-2026
5	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di BPSIP Sumsel	SMK Xaverius Palembang	18-09-2023 s.d 18-09-2026
6	Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Standardisasi Instrumen Pertanian	Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Palembang Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri Kementerian Perindustrian	18-09-2023 s.d 18-09-2026
7	Perjanjian Kerjasama	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun	-

		Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan	
8	Pendampingan dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	PT.Kulaku Indonesia Sejahtera	18-09-2023 s.d 18-09-2026
9	Pendidikan, Pelatihan, Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti	18-09-2023 s.d 18-09-2026
10	Pendidikan, Pelatihan, Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Fakultas Pertanian Universitas Palembang	18-09-2023 s.d 18-09-2026
11	Pendidikan, Pelatihan, Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Universitas UIN Raden Fatah	06-10-2023 s.d 06-10-2026
12	Pendidikan, Pelatihan, Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Prodi Biologi Fakukultas Universitas UIN Raden Fatah	06-10-2023 s.d 06-10-2026
13	Pendampingan dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	PT. Perkebunan Wak Uban	30-08-2024 s.d 30-08-2027
14	Pendidikan, Pelatihan, Penerapan dan Diseminasi Hasil Perakitan dan Perekayasaan Paket Teknologi Spesifik Lokasi Serta Modernisasi Pertanian	SMK PP Negeri Sembawa	27-05-2025 s.d 27-05-2028
15	Pengelolaan Sarana Prasarana, Jasa Pengujian Laboratorium, Jual Beli Hasil Pertanian Dan Peternakan	KPRI Mitra Berlian Palembang	21-07-2025 s.d 21-07-2028

Pada tahun 2025, BRMP Sumsel melaksanakan 15 (lima belas) kerjasama dalam negeri yang mencakup kerjasama dengan pemerintah daerah, UK/UPT kementerian/kembaga di daerah, perguruan tinggi, sekolah kejuruan, lembaga teknis, dan sektor usaha. Pelaksanaan kerja sama BRMP Sumatera Selatan mencakup kerja sama lanjutan yang telah dirintis pada tahun-tahun sebelumnya serta kerja sama baru yang mulai efektif pada tahun berjalan. Kerja sama lanjutan yang memasuki masa akhir perjanjian pada tahun 2025 antara lain dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyelenggaraan layanan dan pendampingan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, Universitas Sriwijaya dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan di bidang pertanian, serta SMK B. INDO SAINS dalam program magang siswa. Melalui kegiatan ini, BRMP Sumsel melaksanakan pendampingan teknologi di lapangan, penempatan mahasiswa dan siswa magang, serta diseminasi hasil teknologi dan penelitian pertanian.

Dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan diseminasi standar instrumen pertanian, BRMP Sumsel melanjutkan kemitraan dengan berbagai institusi pendidikan menengah dan tinggi, yaitu SMKN 1 Tanjung Lago, SMK Xaverius Palembang, Fakultas Pertanian Universitas Tridianti, Fakultas Pertanian Universitas Palembang, Universitas UIN Raden Fatah, serta Program Studi Biologi Fakultas Universitas UIN Raden Fatah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penugasan dan pendampingan mahasiswa maupun siswa magang di lingkungan BRMP Sumsel, serta kerja sama diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi bagi tenaga pendidik. Melalui kolaborasi ini, terjadi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian sekaligus penguatan peran BRMP Sumsel sebagai pusat pembelajaran dan rujukan teknologi pertanian.

Kerja sama dalam bidang standardisasi dan penerapan instrumen pertanian juga dilaksanakan bersama Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang Kementerian Perindustrian melalui pembentukan tim sinergi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang standardisasi instrumen pertanian. Selain itu, pendampingan usaha untuk penerapan standar dan perolehan sertifikasi SNI dilakukan bersama PT Kulaku Indonesia Sejahtera dan PT Perkebunan Wak Uban. Kegiatan ini mendukung penerapan standar instrumen pertanian secara terencana, efektif, dan efisien, serta memperkuat mutu dan daya saing produk pertanian dan agroindustri.

Sinergi kelembagaan juga diperkuat melalui perjanjian kerja sama dengan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan, yang mendukung penyediaan informasi iklim dan peringatan dini cuaca ekstrem untuk mengurangi risiko gangguan terhadap kegiatan pertanian. Pada tahun 2025, BRMP Sumsel juga memulai kerja sama baru dengan SMK PP Negeri Sembawa dalam penerapan dan diseminasi hasil perakitan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian, serta dengan KPRI Mitra Berlian Palembang dalam pengelolaan sarana prasarana, jasa pengujian laboratorium, serta pengelolaan hasil pertanian dan peternakan. Kerja sama ini memperluas cakupan layanan BRMP Sumsel hingga aspek operasional, hilirisasi hasil, dan optimalisasi aset.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kerja sama BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025 menunjukkan penguatan jejaring kemitraan yang mendukung layanan teknologi pertanian, pengembangan sumber daya manusia, penerapan standar instrumen pertanian, serta pemanfaatan informasi iklim dan sarana pendukung. Kolaborasi dengan berbagai mitra menjadi faktor strategis dalam mendorong terwujudnya pertanian yang maju, mandiri, dan modern di Sumatera Selatan, sekaligus menegaskan peran BRMP Sumsel sebagai simpul kolaborasi teknologi dan standardisasi pertanian di tingkat daerah.

IV. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN EVALUASI

4.1 Penyusunan Rencana Program

Sejalan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, kegiatan penerapan dan diseminasi yang dilaksanakan oleh BRMP dituntut untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang nyata, dapat dimanfaatkan oleh pengguna, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan institusi. Oleh karena itu, sebelum kegiatan dilaksanakan, hasil dan manfaat yang akan dicapai harus dirumuskan dan dijelaskan secara jelas serta terukur. Proses penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kebutuhan pengguna serta perkembangan dan kecenderungan kemajuan teknologi ke depan. Dalam rangka mendukung pendanaan serta peningkatan kapabilitas BRMP dalam melaksanakan penerapan dan pengembangan inovasi pertanian, sekaligus mensinkronisasikan pelaksanaan penerapan dan diseminasi instrumen pertanian spesifik lokasi, diperlukan perencanaan yang komprehensif serta penyusunan basis data (database) program penerapan dan diseminasi sebagai acuan bagi para pejabat fungsional guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Secara garis besar mekanisme kegiatan ini terdiri dari tiga tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Rincian tahapan sebagai berikut.

1. Menyusun Matriks Program TA 2025 dan RKAKL TA 2025
2. Mengevaluasi dan menyusun Proposal/KAK setiap kegiatan
3. Mengkoordinir pelaksanaan penerapan standar
4. Melaksanakan seminar Proposal dan hasil penerapan
5. Mengikuti Raker/Rakor Badan Perakitan Modernisasi Pertanian/Balai Besar
6. Melaksanakan evaluasi rencana kerja BRMP Sumsel di tingkat Badan Perakitan Modernisasi Pertanian maupun di tingkat rapat regional Sumatera.
7. Melakukan koordinasi program ke stakeholder untuk mendukung kegiatan Penerapan dan diseminasi.

4.2 Dinamika Perubahan Anggaran (Revisi)

Seiring dengan berjalannya kegiatan dan dalam rangka mencapai Output maka terjadi beberapa kali revisi POK maupun DIP. Selain disebabkan dinamika di dalam internal BRMP Sumatera Selatan, revisi dilakukan atas arahan dan intruksi dari BBP2MP. Terdapat 18 (delapan belas) kali revisi yang telah dilakukan pada tahun 2025. Dinamika perubahan anggaran tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. Dinamika Perubahan Anggaran Tahun 2025

REVISI KE-	TANGGAL	PERUBAHAN
1	06 Februari 2025	Penyesuaian Halaman III DIPA (Perubahan Rencana Penarikan Dana/RPD). Pertimbangan Revisi: - Menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA. - Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker.
2	21 Februari 2025	Efisiensi Anggaran BRMP Sumsel pada 3 Output dengan total sebesar Rp252.055.000. Terdiri dari: - Layanan BMN (Rp.6.102.000): Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan BMN, Pengelolaan/Pemberdayaan KP Karang Agung dan Kayu Agung - Layanan Umum (Rp.108.809.000): Penyusunan Program dan Anggaran, Monev dan UPG, SPI dan MRI, Pengelolaan Informasi Publik, Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standarisasi, Layanan Kepegawaian, Layanan Keuangan, Layanan Ketatausahaan, Sinkronisasi Kegiatan, 002:Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Rp137.144.000): Pemeliharaan Kantor, Pembayaran terkait Operasional Kantor. Pertimbangan Revisi: - Karena adanya instruksi dari Kementerian Keuangan terkait Efisiensi Anggaran, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Tujuannya adalah mendukung program prioritas Presiden Prabowo. - Efisiensi Anggaran BRMP Sumsel dilakukan pada 3 Output dengan total sebesar Rp252.055.000.
3	25 Maret 2025	Pengembalian pagu efisiensi anggaran dukman (Layanan BMN, Layanan Umum dan 002) ke semula, serta Penambahan anggaran pendampingan Rp.1.650.000.000 (status blokir). Pertimbangan Revisi: Sesuai arahan Tim Program dan Evaluasi BBPPMP (Hasil Telaah DJA): - Mengembalikan pagu kegiatan pendampingan program strategis Kementan di POK. - Anggaran pendampingan program strategis Kementan di blokir kode 2 dengan catatan detail belanja tidak relevan dengan RO (blokir di semua akun).

4	14 April 2025	Penyesuaian Halaman III DIPA (Perubahan Rencana Penarikan Dana/RPD). Pertimbangan Revisi: - Penambahan anggaran. - Menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA. - Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker.
5	30 April 2025	- Penyesuaian RO/KRO BRMP (Mengupdate dokumen sesuai nomenklatur terbaru). - Penambahan Pagu; Kegiatan Perbenihan Padi senilai Rp.2.328.900.000 target 150 Ton SS. - Blokir Anggaran Kegiatan: a. Pendampingan: Perjalanan & ATK, b. Perbenihan: ATK, c. Dukman: Perjalanan, d. Kegiatan SPI, Monev, Informasi publik: semua akun. Pertimbangan Revisi: - Dalam rangka menyesuaikan perencanaan dan penganggaran dengan kebijakan serta struktur organisasi terbaru, diperlukan penyesuaian RO/KRO BRMP agar selaras dengan nomenklatur yang berlaku saat ini, sehingga dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat digunakan secara akurat dan konsisten. - Penambahan pagu anggaran pada kegiatan Perbenihan Padi sebesar Rp2.328.900.000 diperlukan untuk mendukung pencapaian target produksi benih padi 150 ton SS, seiring dengan peningkatan kebutuhan benih bermutu serta untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan kegiatan perbenihan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Adanya blokir anggaran pada beberapa kegiatan, meliputi: - Kegiatan Pendampingan (akun Perjalanan dan ATK), - Kegiatan Perbenihan (akun ATK), - Kegiatan Dukungan Manajemen (akun Perjalanan), - Kegiatan SPI, Monitoring dan Evaluasi, serta Informasi Publik (seluruh akun), menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan penataan kembali anggaran agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan prioritas program dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6	04 Juni 2025	Revisi POK: 6 Kegiatan 1. Benih Sumber Padi 150 Ton SS (018.09.HA.7912.RAG.102.051.A) ✓ Akun Belanja Bahan (521211) ✓ Penambahan Akun Belanja Barang Persediaan Bahan Baku (521821). ✓ Akun Belanja Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) ✓ Akun Belanja Sewa (522141) ✓ Akun Belanja Jasa Profesi (522151) ✓ Akun Belanja Jasa Lainnya (522191) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 2. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (018.09.WA.6918.AEA.101.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) 3. Pembayaran gaji dan tunjangan (018.09.WA.6918.EBA.994.001.A) ✓ Akun Belanja Gaji Pokok PNS (521111) ✓ Akun Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) ✓ Akun Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (511121) ✓ Akun Belanja Tunj. Anak PNS (511122) ✓ Akun Belanja Tunj. Beras PNS (511126) ✓ Akun Belanja Uang Makan PNS (511129) ✓ Akun Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) ✓ Akun Belanja Gaji Pokok PPPK (5111611) ✓ Akun Belanja Gaji Pokok PPPK (5111619) ✓ Akun Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (5111621) ✓ Akun Belanja Tunjangan Anak PPPK (5111622) ✓ Akun Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (5111624) ✓ Akun Belanja Tunjangan Beras PPPK (5111625) ✓ Akun Belanja Uang Makan PPPK (5111628) 4. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (018.09.WA.6918.EBA.994.002.A) ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 5. Pemeliharaan kantor (018.09.WA.6918.EBA.994.002.C) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) 6. Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (018.09.WA.6918.EBA.994.002.D). ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111)
---	--------------	--

		Pertimbangan Revisi: Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS Perubahan redaksi dan Pergeseran anggaran antar akun dalam sub komponen karena adanya kebutuhan penyesuaian baik detail, volume maupun satuan sesuai hasil diskusi atau arahan pengawalan Inspektorat Jendral Kementan pada Kegiatan Perbenihan di BRMP Sumsel. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Perubahan redaksi dan Pergeseran anggaran antar akun dalam sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan untuk memfasilitasi perjalanan ke lokasi yang bukan menjadi tanggung jawab BRMP Sumsel. Pembayaran gaji dan tunjangan Pergeseran anggaran antar akun dalam sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan PPPK (penambahan pegawai PPPK BRMP Sumsel sejumlah satu orang) Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran ✓ Penambahan detail serta pergeseran anggaran dalam satu akun pada sub komponen karena adanya kebutuhan belanja Pakaian Seragam Batik Pegawai dan Pakaian Seragam Dinas.
		Pemeliharaan kantor; Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor. Pergeseran anggaran antar akun antar sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Sub Komponen Pemeliharaan kantor, Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) detail Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Sumatera Selatan) serta Sub Komponen Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor, Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111), detail Konsumsi dalam rangka kegiatan jamuan tamu, pertemuan, rapat, dll.
7	10 Juli 2025	Penyesuaian Halaman III DIPA (Perubahan Rencana Penarikan Dana/RPD). Pertimbangan Revisi: a. Menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA. b. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker.

8	23 Juli 2025	Revisi POK; 10 Kegiatan 1. Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS (018.09.HA.7912.RAG.102.051.A). ✓ Akun Belanja Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) 2. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (018.09.WA.6918.AEA.101.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 3. Pengelolaan Administrasi dan Barang Milik Negara (018.09.WA.6918.EBA.956.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 4. Layanan Keuangan (018.09.WA.6918.EBA.962.051.G). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 5. Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan (018.09.WA.6918.EBA.962.051.H). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 6. Sinkronisasi Kegiatan (018.09.WA.6918.EBA.962.051.I). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)
		7. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (018.09.WA.6918.EBA.994.002.A). ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 8. Pemeliharaan kantor (018.09.WA.6918.EBA.994.002.C). ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) 9. Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (018.09.WA.6918.EBA.994.002.D). ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 10. Pengelolaan Laboratorium (018.09.WA.6918.EBA.994.002.G). ✓ Akun Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) ✓ Penambahan Akun Belanja Jasa Lainnya (522191) Pertimbangan Revisi: Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS Perubahan

		redaksi karena keperluan penghapusan “pemupukan dasar”. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Pergeseran anggaran dalam satu akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan. Pengelolaan Administrasi dan Barang Milik Negara geseran anggaran dalam satu akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi. Layanan Keuangan geseran anggaran dalam satu akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Satuan biaya transportasi dan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas. Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan geseran anggaran dalam satu akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Satuan biaya transportasi.
		Sinkronisasi Kegiatan geseran anggaran dalam satu akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Biaya Penginapan Perjalanan Dinas, Satuan biaya transportasi dan Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi. Ouput Layanan Perkantoran: Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran terkait, Pelaksanaan Operasional Kantor, Pengelolaan Laboratorium. Pergeseran anggaran antar akun antar sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada; • Pakaian Seragam Batik Pegawai, Pakaian Seragam Dinas; karena penambahan pegawai. • Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Kebun • Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (Sumatera Selatan) • Cetak Media informasi dan dekorasi. • Bahan Pendukung Kegiatan Laboratorium dan Jasa Kalibrasi.

9	02 September 2025	Penghapusan Pagu blokir, Pembukaan Pagu Blokir, Pengurangan Pagu Belanja Pegawai, dan Penyesuaian RO Kegiatan. ✓ Penghapusan Blokir di kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (Koordinasi Program Strategis Kementerian Pertanian Blokir, Pelaksanaan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Blokir, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Blokir) ✓ Pembukaan Blokir; Beberapa kegiatan di Layanan Dukungan Manajemen Internal ✓ Pengurangan pagu di Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor) ✓ Penyesuaian RO di Kegiatan 1) Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi, 2) Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks, dan 3) Pengelolaan Informasi Publik.
10	19 September 2025	Penurunan pagu/target PNBPN 73% dan pembukaan blokir PNBPN. Kegiatan PNBPN: Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Penguatan dan Sarana Laboratorium. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap, penurunan anggaran dari Rp82.165.000 menjadi Rp59.500.00, target 206 orang menjadi 149 orang, Penguatan Sarana Laboratorium.

11	22 September 2025	Revisi POK; 7 Kegiatan 1. Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS (018.09.HA.7912.RAG.102.051.A). ✓ Akun Belanja Belanja Bahan (521211) ✓ Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) ✓ Akun Belanja Barang Persediaan Bahan Baku (521821) ✓ Akun Belanja Jasa Lainnya (522191) 2. Program Strategis Kementerian Pertanian (018.09.WA.6918.AEA.101.051.A). ✓ Akun Belanja Bahan (521211) ✓ Akun Belanja Sewa (522141) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) 3. Pembayaran gaji dan tunjangan (018.09.WA 6918.EBA.994.001.A) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) ✓ Akun Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) ✓ Akun Belanja Uang Makan PNS ✓ Akun Belanja Uang Lembur (512211) 4. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (018.09.WA 6918.EBA.994.002.A) ✓ Akun Belanja Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 5. Pemeliharaan kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.C) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111). ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) 6. Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan Sub Komponen Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.D) ✓ Akun Belanja Belanja Keperluan Perkantoran (521111)
----	-------------------	--

		7. Penambahan Sub Komponen; Pengembangan Kompetensi Pegawai (018.09.WA 6918.EBA.994.002.H) ✓ Akun Honorarium Narasumber (522151) Pertimbangan Revisi: Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Akun Belanja Belanja Bahan (521211) detail belanja fotokopi; Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) detail kegiatan Pemeliharaan III, Biaya Pengangkutan Hasil Panen, Biaya penjemuran dan pemilahan benih, Biaya penyusunan, pengemasan dan pelabelan benih; dan Akun Belanja Barang Persediaan Bahan Baku (521821) detail Bahan Penunjang, Ember. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Akun Belanja Bahan (521211) detail Fotocopy, Konsumsi Pelaksanaan Pendampingan; Akun Belanja Sewa (522141) detail Sewa Kendaraan Roda 4, Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) detail Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan, detail Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota, Biaya Penginapan Perjalanan Dinas, Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP); Akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) detail Perjalanan Pendek Pembayaran gaji dan tunjangan Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada Akun Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) detail Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13), Akun Belanja Uang Makan PNS (511129), dan Akun Belanja Uang Lembur (512211) Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Kebutuhan Sehari- hari Perkantoran, Pemeliharaan kantor, Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, Pengembangan Kompetensi Pegawai Pergeseran anggaran antar akun antar sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada; 1. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111), detail Langganan Internet/zoom/canva/capcut. 2. Pemeliharaan kantor, Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111), detail Pemeliharaan Gedung/Bangunan Rumah Dinas Kepala Balai Tidak Bertingkat, detail Pemeliharaan Gedung/Bangunan
--	--	---

		Rumah Tamu/Mess Tidak Bertingkat, detail Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor; Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) detail Perpanjangan STNK kendaraan roda 2; Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129), detail Pemeliharaan Personal Computer/Notebook/CCTV/Perangkat Zoom/Laptop/Soundsystem. 3. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) detail Cetak Media informasi dan dekorasi. 4. Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Pegawai.
12	11 Oktober 2025	Realokasi (penambahan) anggaran perjalan dinas Rp.50.000.0000 pada kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan.
13	17 Oktober 2025	Revisi POK (7 Kegiatan) dan Halaman III DIPA 1. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025 (018.09.EC.7911.AEF.109.051.A) ✓ Akun Belanja Barang Persediaan Bahan Baku (521821) 2. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (018.09.WA.6918.AEA.101.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 3. Penyusunan Program dan Anggaran (018.09.WA 6918.EBA.962.051.A) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 4. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (018.09.WA 6918.EBA.994.002.A) ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 5. Langganan Daya dan Jasa (018.09.WA 6918.EBA.994.002.B) ✓ Akun Belanja Langganan Listrik (522111) ✓ Akun Belanja Langganan Air (522113) 6. Pemeliharaan kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.C) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) 7. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor

		(018.09.WA.6918.EBA.994.002.D) ✓ Akun Belanja Belanja Keperluan Perkantoran (521111) Pertimbangan Revisi: a. Kebutuhan anggaran pada beberapa Akun b. Menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker khususnya untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA. c. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja satker.
14	30 Oktober 2025	Buka Blokir ATK dan Komputer Supplies; 2 Kegiatan 1. Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS 2. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian
15	03 November 2025	Revisi POK; 11 Kegiatan 1. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025 (018.09.EC.7911.AEF.109.051.A) ✓ Akun Belanja Barang Persediaan Bahan Baku (521821) 2. Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi (018.09.HA.7912.RAG.102.051.A) ✓ Akun Belanja Bahan (521211) ✓ Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) ✓ Akun Belanja Barang Persediaan Bahan Baku (521821) ✓ Akun Belanja Sewa (522141) ✓ Akun Belanja Jasa Profesi (522151) ✓ Akun Belanja Jasa Lainnya (522191) 3. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (018.09.WA.6918.AEA.101.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) 4. Sinkronisasi Kegiatan (018.09.WA.6918.EBA.962.051.I) ✓ Akun Belanja Jasa Profesi (522151) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 5. Pembayaran gaji dan tunjangan (018.09.WA.6918.EBA.994.001.A) ✓ Akun Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (511121) ✓ Akun Belanja Uang Lembur (512211)

		6. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (018.09.WA 6918.EBA.994.002.A) ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 7. Langganan Daya dan Jasa (018.09.WA 6918.EBA.994.002.B) ✓ Akun Belanja Langganan Listrik (522111) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) 8. Pemeliharaan Kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.C) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Kantor (523111) 9. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.D) ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 10. Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi (018.09.WA 6918.EBD.953.051.A) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 11. Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks (018.09.WA 6918.EBD.953.051.B) ✓ Akun Belanja Bahan (521211) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) Pertimbangan Revisi: Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Pergeseran anggaran dalam satu akun satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pembelian bahan sarana produksi lainnya untuk pelaksanaan demplot kegiatan. Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi Pergeseran anggaran antar akun satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Plastik kemasan (5 kg sablon), sealer, palet kayu, dan Timbangan Digital, Sewa Kendaraan untuk angkut saprodi dan benih, dan Honor Moderator. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota, Biaya Penginapan Perjalanan Dinas, dan Penggantian Transpor
--	--	--

		pelaksanaan kegiatan untuk penangkar benih, petani, penyuluh dan pendamping lapang lainnya yang mendapatkan. Sinkronisasi Kegiatan Pergeseran anggaran dalam akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Honorarium Moderator, Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan Satuan biaya transportasi. Komponen Pembayaran gaji dan tunjangan Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran Belanja Uang Lembur. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor Pergeseran anggaran antar akun antar sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Pemeliharaan Gedung/Bangunan Rumah Dinas Kepala Balai. Perawatan kendaraan roda 4, Perawatan kendaraan roda 2, Mutasi Kendaraan roda 2, Pemeliharaan Personal Computer/Notebook/CCTV/Perangkat Zoom/Laptop/Soundsystem/Televisi, Instalasi Listrik, Air dan Telepon, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Rumah Dinas Kepala Balai dan Konsumsi dalam rangka kegiatan jamuan tamu, pertemuan, rapat, dll. Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi Pergeseran anggaran dalam akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota. Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Fotocopy, Jilid, cetak dan dokumentasi, Papan nama hak milik tanah, Satuan biaya transportasi, dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota.
16	24 November 2025	Revisi POK; 11 Kegiatan 1. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025 (018.09.EC.7911.AEF.109.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

		2. Pengelolaan Informasi Publik (018.09.WA.6918.EBA.958.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 3. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (018.09.WA.6918.AEA.101.051.A). ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 4. Penyusunan Anggaran (018.09.WA 6918.EBA.962.051.A) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 5. Layanan Kepegawaian (018.09.WA 6918.EBA.962.051.F) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 6. Pembayaran gaji dan tunjangan (018.09.WA 6918.EBA.994.001.A) ✓ Akun Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (511121) ✓ Akun Belanja Tunj. Anak PNS (511122) ✓ Akun Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124) ✓ Akun Belanja Tunj Beras PNS (511126) ✓ Akun Belanja Uang Makan PNS (511129) ✓ Akun Belanja Gaji Pokok PPPK (511611) ✓ Akun Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (511621) ✓ Akun Belanja Tunjangan Anak PPPK (511622) ✓ Akun Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (511624) ✓ Akun Belanja Tunjangan Beras PPPK (511625) 7. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (018.09.WA 6918.EBA.994.002.A) ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) 8. Daya dan Jasa (018.09.WA 6918.EBA.994.002.B) ✓ Akun Belanja Langganan Listrik (522111) 9. Pemeliharaan Kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.C) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Kantor (523111) ✓ Akun Belanja Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) 10. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.D)
--	--	--

		✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) ✓ Akun Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (521115) 11. Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks (018.09.WA 6918.EBD.953.051.B) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) Pertimbangan Revisi: Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dan detail Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Pengelolaan Informasi Publik Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan detail Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan detail Biaya Penginapan Perjalanan Dinas. Penyusunan Anggaran Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Satuan Biaya Transportasi dan Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Layanan Kepegawaian Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Satuan Biaya Transportasi, detail Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dan detail Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Pembayaran gaji dan tunjangan Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran detail Belanja Uang Makan PNS, Belanja Gaji Pokok PPPK, detail Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK, detail Belanja Tunjangan Anak PPPK, detail Belanja Tunjangan Fungsional PPPK, dan detail Belanja Tunjangan Beras PPPK. Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor geseran anggaran antar akun antar sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Honorarium Petugas Kebersihan, detail Pemeliharaan Gedung/Bangunan Rumah Dinas Kepala Balai Tidak Bertingkat, detail Pemeliharaan Gedung/Bangunan Rumah Tamu/Mess Tidak Bertingkat,
--	--	---

		Penambahan detail Mutasi Kendaraan Roda 2, detail Pemeliharaan Personal Computer/Notebook/CCTV/Perangkat Zoom/Laptop/Soundsystem/Televisi, detail Perawatan Mesin Rumput, detail Pemeliharaan Printer, detail Konsumsi dalam rangka kegiatan jamuan tamu, pertemuan, rapat, dll. dan detail Cetak Media informasi dan dekorasi. Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks Pergeseran anggaran dalam akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dan detail Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota.
17	02 Desember 2025	Revisi PNPB & POK Revisi PNPB; Usulan revisi kelebihan target TA. 2025: Target Awal Rp109.500.000, Target Revisi Rp156.539.000. Revisi POK; 5 Kegiatan 1.Penyusunan Program dan Anggaran (018.09.WA 6918.EBA.962.051.A) ✓ Akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) 2.Pembayaran gaji dan tunjangan (018.09.WA 6918.EBA.994.001.A) ✓ Akun Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (511624) 3.Langganan Daya dan Jasa (018.09.WA 6918.EBA.994.002.B) ✓ Akun Belanja Langganan Air (522113) 4.Pemeliharaan Kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.C) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) ✓ Akun Belanja Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) ✓ Akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) 5.Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (018.09.WA 6918.EBA.994.002.D) ✓ Akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) ✓ Pertimbangan Revisi: Revisi PNPB Usulan revisi PNPB diajukan dengan tujuan untuk Mengoptimalkan realisasi belanja, meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pemberdayaan di 2 (dua) Kebun Percobaan yaitu di Kab. Banyuasin dan Kab. OKI. Revisi POK Penyusunan Program dan Anggaran Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen

		karena adanya kebutuhan anggaran pada detail Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas. Pembayaran gaji dan tunjangan Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran detail Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor Pergeseran anggaran antar akun dalam satu sub komponen karena adanya kebutuhan anggaran detail PAM, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat, Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor, dan Pemeliharaan Personal Computer/Notebook/CCTV/Perangkat Zoom/Laptop/Soundsystem/Televisi.
18	11 Desember 2025	Revisi Perubahan Target PNB

4.2. Monitoring Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi 2025

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pertanian, termasuk BRMP Sumatera Selatan, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan pertanian melalui penerapan inovasi dan pengelolaan program yang transparan, efisien, dan berintegritas. Monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan sebagai instrumen pengendalian kinerja untuk memastikan pelaksanaan program sesuai rencana, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis hasil. Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) yang berfungsi mengelola pelaporan gratifikasi dan menumbuhkan budaya integritas pegawai sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Sinergi monev dan UPG diharapkan mampu mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan bebas gratifikasi guna mendukung pembangunan pertanian yang modern, berkelanjutan, dan berintegritas.

Kegiatan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) di BRMP Sumatera Selatan bertujuan menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, menyusun rekomendasi perbaikan sistem kerja, meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pelaporan gratifikasi dan etika kedinasan, serta mengidentifikasi potensi risiko gratifikasi pada unit kerja. Kegiatan ini mendukung penguatan tata kelola lembaga melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas, dengan sasaran seluruh pegawai, unit kerja teknis, serta tim pengawasan internal. Hasil yang diharapkan berupa data evaluasi kinerja, rekomendasi perbaikan kebijakan, peningkatan budaya integritas, dan peta risiko gratifikasi, sehingga terwujud unit kerja yang efektif, akuntabel, transparan, serta berintegritas tinggi di lingkungan BRMP Sumatera Selatan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Unit Pengelola Gratifikasi dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025, dengan pelaksanaan Monev On-Going di tiga kabupaten tersampling, yaitu Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Kabupaten Banyuasin. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan diawali dengan studi dokumen melalui penelaahan aspek administrasi, keuangan, dan pelaporan gratifikasi, kemudian dilanjutkan monitoring dan evaluasi melalui wawancara, Focus Group Discussion (FGD), serta observasi lapangan yang mencakup monev ex ante, on going, dan post evaluation.

Pada tahap pelaksanaan (on going), kegiatan meliputi pemeriksaan

kelengkapan dokumen, peninjauan lapangan, serta diskusi dan klarifikasi dengan penanggung jawab kegiatan, petani kooperator, dan pemangku kepentingan terkait. Tahap evaluasi akhir (post evaluation) dilakukan dengan memilih kegiatan yang akan dievaluasi dan melaksanakan seminar akhir untuk menilai kemanfaatan program. Selain itu, dilakukan sosialisasi Unit Pengelola Gratifikasi melalui pertemuan tatap muka dengan narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan serta penyebaran informasi berbasis digital melalui media sosial dan infografis. Kegiatan diakhiri dengan evaluasi pasca-sosialisasi melalui kuesioner, analisis hasil survei tingkat pemahaman pegawai, serta pelaporan hasil kepada pimpinan BRMP Sumsel sebagai bagian dari laporan tahunan.

4.2.1. Monev Tahap Perencanaan (Monev Ex-Ante)

A. Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap dokumen Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan Tahun Anggaran 2025, proposal secara umum telah sesuai dengan outline dan memenuhi komponen utama, meliputi cover, lembar pengesahan, ringkasan, pendahuluan, prosedur kerja, manajemen risiko, serta daftar pustaka, dengan kesesuaian isi per bab yang baik. Prosedur kerja telah memuat pendekatan, ruang lingkup aktivitas, dan prosedur pelaksanaan, namun masih diperlukan penambahan lokasi kegiatan, langkah mitigasi atas permasalahan yang diidentifikasi, serta uraian tenaga dan organisasi pelaksana yang mencakup personel, jangka waktu kegiatan, indikator capaian, dan pembiayaan. Kesiapan pelaksanaan kegiatan dinilai telah sesuai dengan rencana dan metodologi, meskipun belum memuat perubahan yang terjadi selama pelaksanaan. Secara keseluruhan proposal telah tersusun baik dan selaras dengan tujuan, sasaran, serta keluaran kegiatan, namun tim monev merekomendasikan agar evaluasi kegiatan dimasukkan dalam laporan akhir serta deskripsi kegiatan, khususnya lokasi pelaksanaan, dibuat lebih rinci untuk mendukung proses pemantauan dan verifikasi lapangan.

B. Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi (150 Ton Benih Padi SS)

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Ex Ante, proposal kegiatan perbenihan padi dinilai telah disusun secara lengkap sesuai outline yang dipersyaratkan dan memenuhi kaidah perencanaan teknis, mencakup seluruh komponen utama seperti pendahuluan, prosedur kerja, manajemen risiko, tenaga dan organisasi pelaksana, serta daftar pustaka. Kesesuaian isi per bab

telah tersusun selaras, dengan sasaran dan keluaran kegiatan berupa produksi 150 ton benih padi kelas sebar (SS) yang dirumuskan secara jelas dan konsisten. Prosedur kerja telah menggambarkan pendekatan, ruang lingkup, dan tahapan pelaksanaan secara operasional, sementara aspek manajemen risiko, sumber daya manusia, indikator capaian, serta pembiayaan menunjukkan kesiapan pelaksanaan kegiatan yang realistis dan layak dilanjutkan. Meskipun demikian, tingginya target output menimbulkan risiko teknis dan manajerial, seperti kondisi agroklimat, serangan organisme pengganggu tanaman, ketepatan waktu produksi, mutu pascapanen, serta koordinasi pelaksana. Oleh karena itu, disarankan penguatan mitigasi risiko melalui pengaturan lokasi produksi, penjadwalan adaptif, peningkatan pengawasan mutu, penguatan kapasitas SDM, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara berkala agar target produksi benih bermutu dapat tercapai secara optimal, tepat waktu, dan akuntabel.

C. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerapan Standar dalam Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Ex Ante, proposal kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar dalam Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan telah disusun secara sistematis dan memenuhi outline proposal yang dipersyaratkan, dengan kelengkapan komponen utama serta kesesuaian substansi antar bab yang baik dan selaras dengan kebijakan serta tujuan kegiatan. Prosedur kerja, tenaga pelaksana, lokasi, jadwal, dan pembiayaan telah direncanakan secara jelas sehingga kegiatan dinilai layak dilaksanakan dan memiliki peluang besar mencapai target. Namun demikian, proposal masih memerlukan penyempurnaan, terutama belum adanya bab manajemen risiko sesuai Permen Pertanian Nomor 38 Tahun 2021, belum disajikannya evaluasi awal (baseline) penerap standar, ketidakkonsistenan rujukan standar, serta belum dirumuskannya indikator capaian dan pembagian peran pelaksana secara rinci. Selain itu, potensi risiko pelaksanaan akibat faktor lapangan seperti cuaca, jadwal tanam, dan kesiapan peserta perlu diantisipasi melalui penguatan mitigasi risiko dan sistem monitoring evaluasi internal. Oleh karena itu, disarankan dilakukan penyempurnaan proposal melalui penambahan manajemen risiko, penajaman indikator capaian, dan penyeragaman standar agar pelaksanaan kegiatan berjalan lebih efektif, terukur, dan akuntabel.

4.2.2. Monev Tahap Pelaksanaan (Monev On – Going)

A. Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi (150 Ton Benih Padi SS)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) On-Going dilakukan untuk menilai efektivitas, kesesuaian, dan kualitas pelaksanaan kegiatan perbenihan padi mulai tahap persiapan hingga pasca panen melalui observasi lapangan, wawancara, pengecekan dokumen, serta evaluasi bersama stakeholder. Monev dilaksanakan di Kabupaten OKU Timur dan IP2MP Karang Agung Kabupaten Banyuasin, serta diperkuat dengan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai pengawasan eksternal.

- **Hasil Pelaksanaan di Kabupaten OKU Timur**

Pelaksanaan kegiatan perbenihan padi di Kabupaten OKU Timur menunjukkan kinerja yang baik hingga sangat baik pada aspek input, proses, output, dan outcomes. Kesiapan sumber daya manusia serta dukungan lintas instansi berjalan optimal melalui sosialisasi dan pendampingan teknis yang intensif mencakup seluruh tahapan perbenihan. Proses pelaksanaan didukung koordinasi yang efektif antar pelaksana serta kondisi lokasi yang memenuhi standar teknis, meskipun terdapat kendala keterlambatan musim tanam dan penyaluran sarana produksi yang mendekati waktu tanam. Capaian output menunjukkan produksi benih telah mencapai target dan memasuki tahap pasca panen serta pengujian mutu. Kegiatan juga memberikan dampak positif berupa peningkatan pengetahuan petani, bertambahnya minat menjadi penangkar, serta penguatan kapasitas kelembagaan petani dalam usaha perbenihan padi.

- **Hasil Pelaksanaan di IP2MP Karang Agung Kabupaten Banyuasin**

Pelaksanaan kegiatan di IP2MP Karang Agung Kabupaten Banyuasin berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan serta petunjuk teknis yang ditetapkan. Sosialisasi dan diseminasi standar perbenihan melalui demplot mampu meningkatkan pemahaman petani terhadap penerapan varietas unggul dan SOP produksi benih. Proses kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan kelompok tani dan stakeholder terkait, sehingga koordinasi berjalan baik dan mendukung kelancaran pelaksanaan. Dari sisi output, target produksi benih berhasil terlampaui, meskipun sebagian benih masih dalam tahapan uji mutu resmi. Kegiatan ini memberikan manfaat nyata melalui peningkatan ketersediaan benih unggul lokal, peningkatan keterampilan teknis pelaku perbenihan, serta meningkatnya minat petani sekitar untuk terlibat dalam usaha

penangkaran benih.

- Integrasi Temuan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal

Hasil evaluasi Inspektorat Jenderal memperkuat temuan Monev On-Going dengan menunjukkan bahwa BRMP Sumatera Selatan memiliki lingkungan pengendalian yang kuat dan berada pada kategori zona hijau. Namun demikian, masih terdapat beberapa risiko utama yang perlu mendapat perhatian, antara lain potensi gagal panen akibat OPT dan iklim, keterlambatan tanam karena pencairan anggaran, keterbatasan fasilitas penyimpanan, risiko penurunan mutu benih, serta potensi ketidaksinkronan distribusi dengan musim tanam pengguna. Selain itu, dokumen manajemen risiko dan pembentukan Unit Pengelola Risiko belum sepenuhnya optimal. Temuan tersebut sejalan dengan kondisi di lapangan dan menjadi dasar penting dalam penyusunan langkah perbaikan dan rekomendasi tindak lanjut kegiatan.

B. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerapan Standar dalam Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) On Going pada aspek masukan (input) menunjukkan bahwa kegiatan Penguatan Kapasitas Standar telah dilaksanakan dengan kinerja cukup baik hingga sangat baik, meskipun penilaian baru dapat dilakukan pada tahap input karena kegiatan inti belum sepenuhnya berjalan akibat adanya blokir anggaran. Sosialisasi internal telah dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kesiapan teknis pelaksana, sementara sosialisasi eksternal direncanakan pada minggu ketiga November 2025 seiring dimulainya pelaksanaan kegiatan secara penuh. Standar yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan kegiatan, mengacu pada SNI Benih Padi Inbrida (SNI 6233:2015) dan SNI IndoGAP (SNI 8969:2021), didukung oleh tim pelaksana lintas disiplin serta koordinasi awal dengan stakeholder terkait seperti BPSB dan BPTPH. Secara umum, aspek input menunjukkan kesiapan awal kegiatan yang memadai, namun penilaian proses, output, dan outcome belum dapat dilakukan secara komprehensif pada periode Monev ini.

C. Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan

- Aspek Pelaksanaan di Lapangan

Pelaksanaan pendampingan Program Strategis Swasembada Pangan di Kabupaten PALI menunjukkan kinerja baik hingga sangat baik, ditandai dengan sosialisasi efektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan

meningkatkan pemahaman terhadap tujuan serta standar teknis program. Standar teknis yang diterapkan telah sesuai kebutuhan, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala kondisi biofisik lahan dan keterbatasan alat berat pada kegiatan CSR. Sinergi lintas sektor berjalan baik melalui dukungan tim interdisiplin dan koordinasi rutin, dengan capaian kegiatan OPLA sebesar 88,62%, CSR tahap I 99,71%, dan CSR tahap II masih rendah yaitu 6,19%.

- **Aspek Proses**

Tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan berlangsung koordinatif dan komunikatif dengan melibatkan petani, penyuluh, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Mekanisme koordinasi yang intensif memungkinkan penyesuaian cepat terhadap kendala lapangan, termasuk perubahan lokasi CSR dari Desa Betung ke Desa Betung Barat akibat kondisi lahan yang rawan genangan. Secara umum, pelaksanaan kegiatan dinilai memiliki tingkat kesesuaian tinggi dengan rencana awal.

- **Aspek Luaran (Output)**

Kegiatan pendampingan dan sosialisasi melalui OPLA dan CSR telah meningkatkan kapasitas pengetahuan dan sikap petani terhadap penerapan standar pengelolaan lahan dan air berkelanjutan. Namun, dampak pembelajaran dari demplot masih terbatas dan memerlukan pendampingan lanjutan agar praktik baik dapat direplikasi secara lebih luas oleh petani sekitar.

- **Aspek Manfaat (Outcomes)**

Bimbingan teknis dan sosialisasi standar pertanian memberikan manfaat langsung berupa peningkatan kemampuan peserta, khususnya Brigade Pangan, dalam menerapkan praktik pertanian sesuai standar. Demplot telah berfungsi sebagai media pembelajaran, namun manfaat jangka panjang dan tingkat adopsi berkelanjutan masih perlu dievaluasi lebih lanjut karena indikator peningkatan penerapan standar belum dapat diukur secara kuantitatif pada saat Monev berlangsung.

4.2.3. Monev Tahap Akhir (Monev Post Evaluation)

A. Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan

Hasil monitoring dan evaluasi tahap akhir menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan program strategis telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota sasaran dan mencakup berbagai komponen program Kementerian Pertanian,

seperti LTT reguler, padi gogo, oplah, CSR, Brigade Pangan, dan kegiatan pendukung lainnya yang memiliki dasar kebijakan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian. Pendampingan dilaksanakan secara sinergis antarinstansi, dengan peran BRMP lebih bersifat koordinatif, fasilitatif, dan penguatan teknis di lapangan. Namun, evaluasi pasca pelaksanaan masih menemukan keterbatasan dalam pengukuran capaian secara kuantitatif akibat belum terpetakannya aktivitas dan hasil pendampingan secara rinci per kabupaten, sehingga disarankan pelaporan akhir menggunakan pendekatan berbasis wilayah. Selain itu, terdapat perbedaan data antar level pelaporan terkait luas tanam, oplah, dan realisasi produksi yang dipengaruhi perbedaan waktu penarikan data dan asumsi pelaksanaan di lapangan, termasuk perbedaan persepsi mengenai dampak oplah terhadap Indeks Pertanaman (IP), sehingga diperlukan penyamaan persepsi dan sinkronisasi data lintas instansi pada periode selanjutnya.

B. Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS

Monitoring dan evaluasi tahap akhir kegiatan produksi benih sumber padi menunjukkan bahwa seluruh tahapan kegiatan telah dilaksanakan mulai dari penetapan CPCL, persiapan lahan, tanam, pemeliharaan, panen, hingga sertifikasi benih, serta berkontribusi strategis dalam mendukung ketersediaan benih di Provinsi Sumatera Selatan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Hasil post evaluation menekankan perlunya penyempurnaan laporan melalui penyajian data produksi dan sertifikasi secara tabulatif yang memuat varietas, luas tanam, produktivitas, total produksi, dan status kelulusan sertifikasi agar alur produksi dan kontribusi petani tergambar lebih transparan. Evaluasi juga menemukan sebagian benih belum lulus sertifikasi akibat kendala pascapanen dan penyimpanan, terutama terkait daya tumbuh dan kadar air yang dipengaruhi keterbatasan fasilitas gudang, sehingga keberhasilan perbenihan perlu didukung penguatan manajemen pascapanen dan sarana pendukung. Oleh karena itu, laporan akhir disarankan memuat narasi komprehensif mengenai proses sertifikasi, hasil uji laboratorium, kendala yang dihadapi, serta rencana perbaikan dan tindak lanjut ke depan.

C. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025

Hasil monitoring dan evaluasi tahap akhir menunjukkan bahwa kegiatan penguatan kapasitas telah dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan demonstrasi plot (demplot) sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta

kapasitas penerapan standar pertanian dan pembelajaran langsung di lapangan. Namun, post evaluation menilai pengukuran peningkatan kapasitas peserta masih perlu diperkuat, khususnya dengan mencantumkan secara eksplisit target produksi demplot dalam laporan agar outcome kegiatan dapat dievaluasi lebih jelas. Selain itu, materi diseminasi disarankan lebih disederhanakan dan difokuskan agar pesan utama tersampaikan secara efektif, sehingga kegiatan tidak hanya menghasilkan output pelaksanaan, tetapi juga outcome berupa peningkatan kapasitas penerap standar yang terukur serta mendukung percepatan tanam dan peningkatan produksi.

4.2.4. Menyusun Rekomendasi Strategis Perbaikan Sistem Berdasarkan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), dan tahap akhir (post evaluation), diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas, efisiensi, serta berbagai tantangan dalam pelaksanaan kegiatan BRMP Sumatera Selatan. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi strategis yang bersifat sistemik dan lintas tahapan guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan ke depan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekomendasi Strategis Perbaikan Sistem Kerja Berdasarkan Hasil Evaluasi

No.	Strategi Perbaikan Sistem Kerja	Permasalahan Utama yang Ditemukan	Rekomendasi Strategis
1.	Penguatan Perencanaan Berbasis Risiko dan Baseline	Proposal belum memuat baseline, indikator capaian rinci, dan manajemen risiko secara konsisten	• Wajib menyusun baseline kuantitatif • Menambahkan bab Manajemen Risiko sesuai Permen 38/2021 • Menetapkan indikator output–outcome per tahapan
2.	Penyelarasan Perencanaan dengan Dinamika Anggaran dan Kalender Tanam	Keterlambatan pencairan anggaran berdampak pada keterlambatan tanam dan pelaksanaan kegiatan	• Menyusun rencana kerja adaptif berbasis kalender tanam • Koordinasi awal dengan pengelola keuangan • Menyediakan buffer time pelaksanaan

3.	Standardisasi Sistem Pendampingan Teknis	Variasi pemahaman petani terhadap standar, khususnya PHT dan pascapanen	• Menyusun SOP pendampingan teknis per fase • Penguatan PHT melalui pelatihan dan demplot • Pendampingan terpadu lintas disiplin
4.	Penguatan Manajemen Pascapanen dan Infrastruktur	Penurunan mutu benih akibat fasilitas pengeringan dan gudang terbatas	• Menyusun SOP pascapanen rinci • Peningkatan kapasitas gudang dan ventilasi • Penerapan sistem rotasi stok benih
5.	Penetapan dan Penguatan Unit Pengelola Risiko (UPR)	UPR perbenihan belum ditetapkan dan risk monitoring belum berjalan	• Menetapkan UPR khusus kegiatan strategis • Sosialisasi dokumen MR internal • Monitoring risiko secara triwulanan
6.	Penguatan Sistem Pelaporan Berbasis Data dan Wilayah	Data pelaporan belum terpetakan per kabupaten dan belum seragam lintas level	• Pelaporan berbasis kabupaten/kota • Penyajian data dalam tabulasi standar • Sinkronisasi data pusat–daerah
7.	Penguatan Orientasi Outcome dan Dampak	Evaluasi masih dominan pada output, outcome belum terukur optimal	• Menetapkan indikator outcome terukur • Mengaitkan demplot dengan target produksi • Melakukan evaluasi pasca kegiatan
8.	Integrasi Monev Internal dengan Temuan Irjen	Dokumen MR dan pengendalian risiko belum optimal sejak awal kegiatan	• Menjadikan temuan Irjen sebagai dasar perbaikan sistem kerja • Integrasi Monev internal dan pengawasan eksternal
9.	Penguatan Sinkronisasi Distribusi dan Pemanfaatan Benih	Risiko keterlambatan distribusi dan penumpukan stok benih	• Menyusun rencana distribusi sejak awal • Koordinasi kebutuhan benih dengan kabupaten/ kota • Menghubungkan penangkar dengan calon pengguna
10.	Penyempurnaan Substansi Laporan Akhir	Laporan belum menyajikan alur produksi, sertifikasi, dan pembagian hasil secara rinci	• Penyajian data produksi dan sertifikasi secara transparan • Narasi kendala dan tindak lanjut dalam laporan akhir

4.2.5. Peningkatkan Kesadaran Pegawai Terhadap Pentingnya Pelaporan Gratifikasi dan Etika Kedinasan

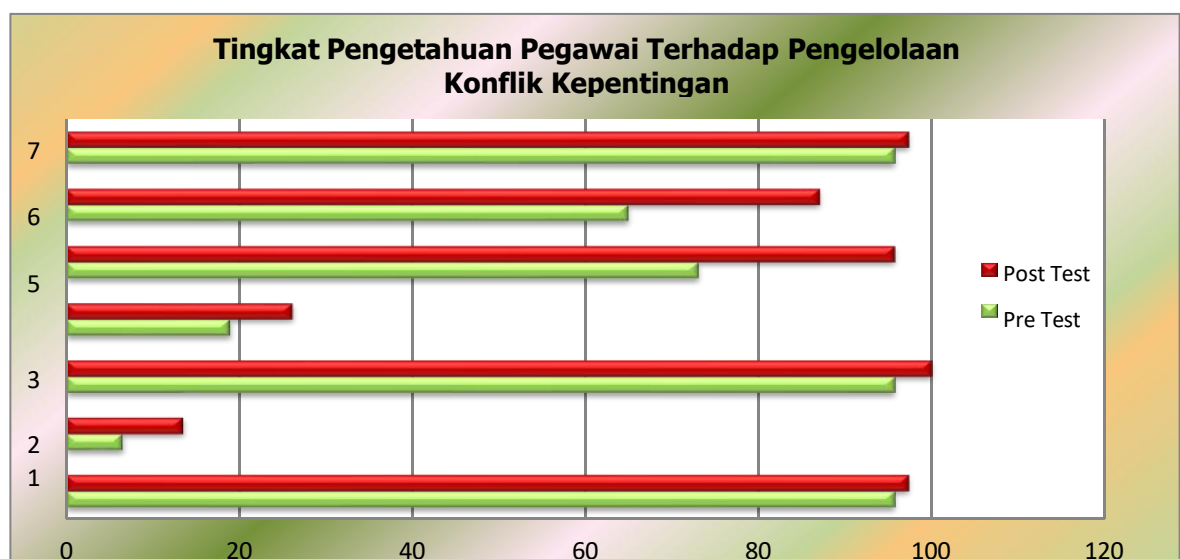
Peningkatan kesadaran pegawai terhadap pelaporan gratifikasi dan etika kedinasan

dilakukan melalui sosialisasi yang dievaluasi menggunakan kuesioner pre-test dan post-test. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pegawai pada seluruh aspek yang disosialisasikan, meskipun tingkat peningkatannya bervariasi pada setiap indikator.

4.2.6. Pengetahuan Terhadap Pengelolaan Benturan Kepentingan

Pada aspek pengelolaan benturan kepentingan, pemahaman pegawai meningkat rata-rata sebesar 9,50% (Gambar 1), menunjukkan sosialisasi cukup efektif dalam memperkuat pemahaman terkait konsep, sumber, mekanisme, dan pengawasan konflik kepentingan. Tingkat pemahaman pegawai yang sebelumnya sudah tinggi juga mengalami peningkatan setelah pelaksanaan sosialisasi (post-test).

Peningkatan signifikan terjadi pada pemahaman cakupan pengelolaan konflik kepentingan yang berlaku di instansi pusat maupun daerah, termasuk pemahaman peran Pejabat Pengelola Konflik Kepentingan dan penerapan cooling off period sebagai mekanisme preventif. Namun, evaluasi menunjukkan masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami kewajiban deklarasi konflik kepentingan, sehingga sosialisasi lanjutan perlu menekankan aspek pelaporan dan konsekuensi administratif agar penerapannya lebih konsisten.



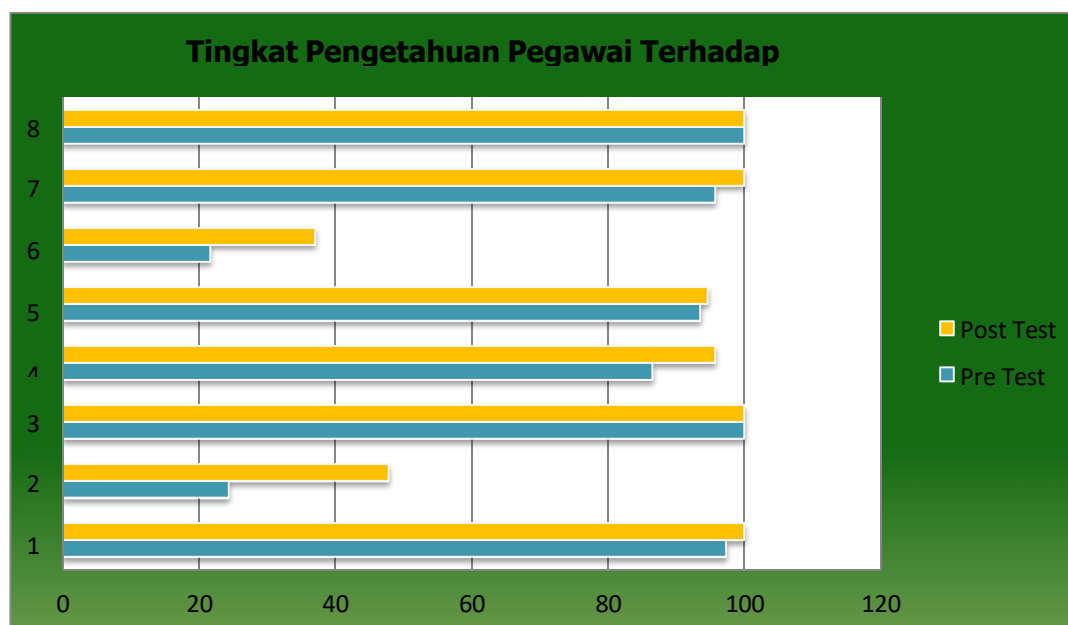
Gambar 1. Tingkat Pengetahuan Pegawai Terhadap Pengelolaan Konflik Kepentingan

- 1 : Konflik kepentingan terjadi ketika pejabat pemerintah memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang diambilnya.
- 2 : Pengelolaan konflik kepentingan hanya diperlukan di instansi

- pusat, tidak berlaku untuk instansi daerah.
- 3 : Salah satu sumber konflik kepentingan adalah hubungan keluarga, bisnis, atau jabatan ganda.
 - 4 : Pejabat pemerintah tidak wajib mendeklarasikan konflik kepentingan yang dihadapinya.
 - 5 : Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan memiliki tugas membantu pengawasan dan pengendalian situasi benturan kepentingan di instansinya.
 - 6 : Cooling off period atau masa tunggu merupakan salah satu mekanisme pengendalian konflik kepentingan bagi pejabat yang berpindah jabatan.
 - 7 : Pengawasan konflik kepentingan dilakukan oleh atasan langsung pejabat dan dapat melalui mekanisme pengaduan.

4.2.7. Pengetahuan Terhadap Gratifikasi

Pada aspek pengetahuan gratifikasi, pemahaman pegawai meningkat rata-rata sebesar 7,03% setelah sosialisasi, dengan hasil post-test menunjukkan tingkat pemahaman sangat baik terhadap definisi, kewajiban, dan tata cara pelaporan gratifikasi. Peningkatan paling menonjol terjadi pada pemahaman bahwa tidak semua pemberian kepada ASN merupakan suap serta jenis pemberian yang termasuk gratifikasi wajib lapor, menunjukkan keberhasilan sosialisasi dalam meluruskan persepsi keliru. Sementara itu, indikator yang sejak awal telah dipahami dengan baik hanya mengalami peningkatan kecil, menandakan sosialisasi berperan sebagai penguatan pemahaman yang sudah ada.



Gambar 2. Tingkat Pengetahuan Pegawai Terhadap Gratifikasi

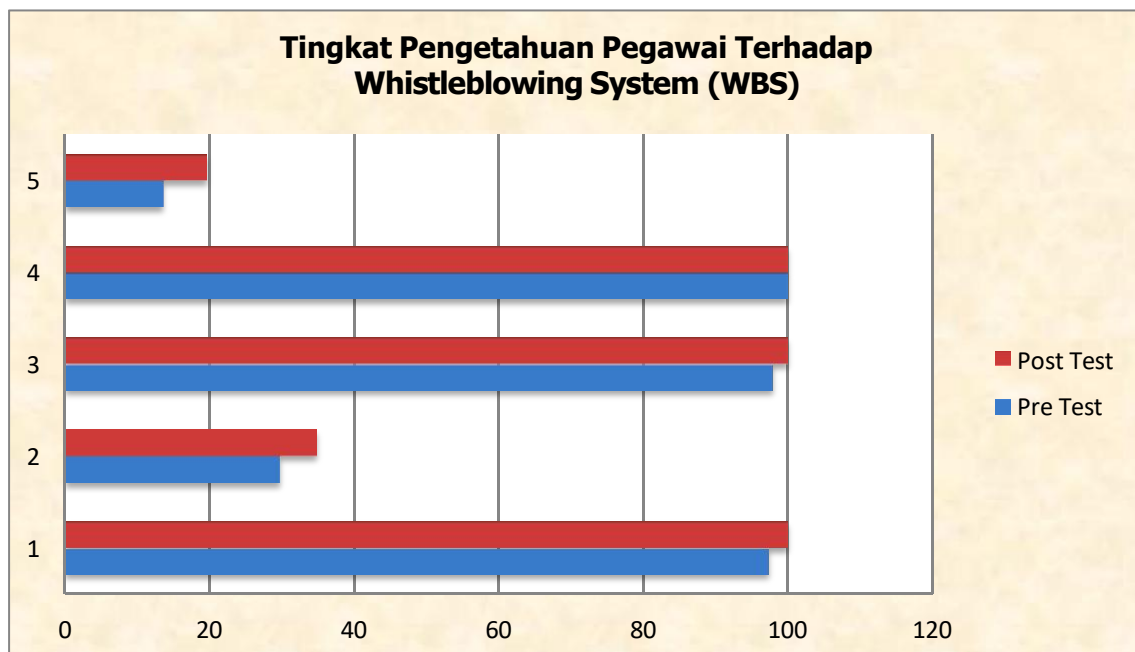
Keterangan :

- 1 Gratifikasi mencakup pemberian uang, barang, tiket perjalanan, fasilitas, atau manfaat lain yang diterima karena jabatan.
- 2 Semua bentuk pemberian kepada ASN dianggap suap dan tidak boleh

- diterima.
- 3 Pegawai negeri wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau KPK.
 - 4 Hadiah dari keluarga dekat seperti orang tua, saudara kandung, atau menantu tidak termasuk gratifikasi sepanjang tidak ada konflik kepentingan.
 - 5 Pemberian cenderamata atau plakat kepada instansi dalam kegiatan resmi kenegaraan tidak wajib dilaporkan selama tidak ditujukan kepada individu.
 - 6 Pemberian dalam bentuk barang dari rekan kerja pada acara ulang tahun dengan nilai di bawah Rp300.000 termasuk gratifikasi yang wajib dilaporkan.
 - 7 Pelaporan gratifikasi wajib memuat identitas penerima, pemberi, waktu, tempat, jenis, nilai, dan kronologis pemberian.
 - 8 Pegawai yang menolak pemberian gratifikasi dengan sopan telah menjalankan salah satu bentuk pengendalian gratifikasi.

4.2.8. Pengetahuan Terhadap Whistleblowing System (WBS)

Pada aspek Whistleblowing System (WBS), rata-rata peningkatan pemahaman pegawai tercatat sebesar 3,22%, yang relatif lebih rendah dibandingkan dua aspek lainnya. Hal ini disebabkan oleh tingkat pemahaman awal pegawai yang sudah cukup tinggi terhadap konsep dasar WBS, seperti definisi, tujuan, dan cakupan pelaporan. Pada aspek Whistleblowing System (WBS), rata-rata peningkatan pemahaman pegawai tercatat sebesar 3,22%, yang relatif lebih rendah dibandingkan dua aspek lainnya. Hal ini disebabkan oleh tingkat pemahaman awal pegawai yang sudah cukup tinggi terhadap konsep dasar WBS, seperti definisi, tujuan, dan cakupan pelaporan.



Gambar 3. Tingkat Pengetahuan Pegawai Terhadap Whistleblowing System (WBS)

Keterangan:

1. Whistleblowing System (WBS) adalah sistem yang digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja
2. WBS hanya dapat digunakan oleh pegawai internal instansi
3. Tujuan utama WBS adalah mendorong partisipasi pegawai dan masyarakat dalam mengungkap pelanggaran secara bertanggung jawab
4. Pelaporan melalui WBS dapat mencakup dugaan pelanggaran integritas, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan korupsi
5. Pelapor (whistleblower) dapat dikenai sanksi disiplin karena melaporkan dugaan pelanggaran

Masih terbatasnya peningkatan pada beberapa indikator WBS menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi lanjutan yang lebih aplikatif, khususnya melalui contoh kasus dan simulasi pelaporan, agar pemahaman pegawai tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga operasional.

4.2.9. Implikasi Hasil Sosialisasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pengendalian gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pegawai. Peningkatan pemahaman ini diharapkan berkontribusi pada penguatan budaya integritas, pencegahan praktik korupsi, serta peningkatan kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal pemerintah. Namun demikian, variasi tingkat peningkatan pada masing-masing aspek menunjukkan perlunya strategi sosialisasi berkelanjutan dan lebih terfokus, khususnya pada materi yang masih memiliki tingkat pemahaman relatif rendah. Dengan demikian, upaya pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan dapat diterapkan secara konsisten dan efektif di lingkungan kerja BRMP Sumatera Selatan.

4.2.10. Peta Risiko Gratifikasi (*Gratification Risk Map*) pada Unit Kerja BRMP Sumatera Selatan

Dalam rangka memperkuat tata kelola, pengendalian intern, dan budaya integritas di BRMP Sumatera Selatan, disusun Matriks Risiko Gratifikasi (High Level) yang mengintegrasikan hasil Monev tahap ex-ante, on-going, dan post evaluation serta temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Matriks ini mengidentifikasi risiko strategis pada kegiatan dengan intensitas interaksi eksternal tinggi, pengambilan keputusan teknis, serta proses penilaian dan verifikasi hasil kegiatan. Secara umum, risiko gratifikasi berada pada kategori rendah hingga sedang dengan dampak relatif tinggi pada beberapa tahapan, terutama kegiatan

pendampingan lapangan dan koordinasi lintas pihak. Risiko penerimaan fasilitas dan potensi konflik kepentingan memerlukan pengendalian melalui pengawasan melekat, penegasan larangan gratifikasi, dan transparansi keputusan, sementara risiko pada proses penilaian dan sertifikasi memiliki kemungkinan rendah namun berdampak signifikan terhadap reputasi. Hasil evaluasi juga menunjukkan perlunya penguatan manajemen risiko sejak tahap perencanaan melalui penetapan UPR, penyusunan dokumen risiko, dan integrasi pengendalian gratifikasi dalam seluruh siklus kegiatan. Secara keseluruhan, matriks ini menjadi instrumen strategis untuk menentukan prioritas pengendalian serta memastikan pelaksanaan kegiatan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sesuai prinsip SPIP dan Zona Integritas.

Tabel 5. Matriks Risiko Gratifikasi BRMP Sumatera Selatan

No.	Risiko Utama Gratifikasi	Tahap Kegiatan	L	I	Level Risiko	Strategi Pengendalian Utama
1.	Penerimaan fasilitas/ jamuan dari mitra atau petani selama pendampingan dan kegiatan lapangan	On-Going	3	4	12 (sedang)	Sosialisasi gratifikasi, pengawasan melekat, penegasan larangan sebelum kegiatan
2.	Gratifikasi terkait penilaian, verifikasi, atau sertifikasi hasil kegiatan	On-Going – Post	2	5	10 (Sedang)	Tim kolektif, SOP teknis, dokumentasi hasil dan berita acara
3.	Konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan teknis (lokasi, jadwal, distribusi hasil)	Ex-Ante – Post	3	4	12 (sedang)	Pemisahan peran, Koordinasi lintas instansi, transparansi dasar keputusan
4.	Risiko gratifikasi akibat belum optimalnya manajemen risiko di awal kegiatan	Ex-Ante	2	4	8 (Rendah– Sedang)	Penyusunan MR, Penetapan UPR, Monitoring risiko berkala

V. KINERJA HASIL KEGIATAN

5.1. Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menetapkan program strategis swasembada pangan sebagai bagian dari program prioritas nasional 2024–2029 guna memperkuat kemandirian bangsa di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global yang berdampak pada ketahanan pangan. Upaya percepatan peningkatan produksi padi dilakukan melalui perluasan dan peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT), optimalisasi lahan, cetak sawah, serta penerapan pertanian modern yang dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, akademisi, dan petani. Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 808/Kpts./KP.250/A/09/2025 tanggal 9 September 2025 tentang Kegiatan Swasembada Pangan, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan mendapat penugasan melakukan pendampingan dan pengawalan peningkatan serta perluasan LTT di 11 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan target Luas Tambah Tanam (LTT) seluas 1.154.483 Ha berupa LTT Reguler 1.006.112 Ha, LTT Oplah tahun 2024 seluas 67.693 Ha, LTT Opla tahun 2025 seluas 50,356 Ha, LTT Cetak Sawah 48.000, LTT dan LTT Padi Gogo seluas 30.324 Ha. Pendampingan dilakukan melalui koordinasi lintas stakeholder, sosialisasi dan pembinaan petani, serta monitoring penerapan pertanian modern untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman (IP 300 dan IP 400) sehingga target peningkatan LTT dapat tercapai dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan produksi padi serta percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional.

Pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT) Reguler

5.1.1. Pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT) Reguler

a) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)

Target LTT padi Kabupaten OKU pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 6.794 hektar dengan realisasi LTT padi tercatat sebesar 2.650,8 hektar. Dengan demikian, capaian LTT Tahun 2025 baru mencapai sekitar 39,02% dari target, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program LTT masih berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025 menunjukkan dinamika capaian antar triwulan, dimana Triwulan I menjadi capaian tertinggi sebesar 868,8 ha yang didorong optimalisasi musim tanam awal tahun, terutama dari Kecamatan Pengandonan, Sinar Peninjauan,

Muara Jaya, dan Semidang Aji. Pada Triwulan II realisasi menurun menjadi 542,6 ha akibat kendala ketersediaan air, kesiapan lahan, dan faktor teknis di beberapa kecamatan, kemudian kembali turun pada Triwulan III menjadi 437,3 ha sebagai capaian terendah karena minimnya aktivitas tanam. Memasuki Triwulan IV, realisasi meningkat signifikan menjadi 802,15 ha seiring percepatan tanam akhir tahun. Secara kumulatif, capaian tertinggi berasal dari Kecamatan Sinar Peninjauan (533,5 ha), Semidang Aji (456,3 ha), dan Pengandonan (404 ha), sedangkan kontribusi terendah terdapat di Kedaton Peninjauan Raya, Peninjauan, dan Ulu Ogan, menunjukkan ketimpangan capaian antar wilayah.

Tabel 7. Data breakdown Realisasi LTT per Kecamatan Triwulan IV 2025

No	Kecamatan	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Lengkiti	83	12	0	45	140
2	Sosoh Buay Rayab	70	52	10	43	175
3	Pengandonan	154	84,5	154,5	11	404
4	Muara Jaya	117	0	116	0	233
5	Semidang Aji	109,8	111,35	8	227,15	456,3
6	Ulu Ogan	10	0	0	23	33
7	Peninjauan	7	7	0	5,5	19,5
8	Sinar Peninjauan	118	195	43	177,5	533,5
9	Lubuk Raja	26	21	5	103	155
10	Lubuk Batang	80	0	96	67	243
11	Baturaja Timur	84	42,75	3,75	92,5	223
12	Baturaja Barat	10	13	0	4,5	27,5
13	Kedaton Peninjauan Raya	0	4	1	3	8
		868,8	542,6	437,3	802,15	2650,8

Secara keseluruhan, realisasi LTT masih jauh dari target tahunan akibat berbagai hambatan dan kendala baik teknis dan non teknis. Faktor teknis meliputi curah hujan yang tidak menentu, dampak banjir tahun 2024 yang merusak lahan, bendungan, dan jaringan irigasi, berkurangnya debit air, serta keterbatasan dan kerusakan alat mesin pertanian yang menyebabkan keterlambatan pengolahan lahan dan tanam. Sementara itu, faktor nonteknis dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga kerja, tingginya biaya produksi, serta pergeseran tenaga kerja ke sektor perkebunan dan peralihan komoditas dari padi ke jagung yang dinilai lebih menguntungkan. Kendala juga bervariasi antar wilayah BPP, seperti kerusakan irigasi, mundurnya musim tanam, akses lahan terputus, kondisi lahan rawa dan gambut, serta rendahnya minat petani karena padi bukan sumber pendapatan utama. Secara keseluruhan, kombinasi faktor alam, infrastruktur, keterbatasan sarana produksi, dan kondisi sosial ekonomi

petani menyebabkan rendahnya intensitas tanam dan belum optimalnya pencapaian target LTT padi di Kabupaten OKU sehingga diperlukan penguatan perencanaan, peningkatan pendampingan teknis, dan optimalisasi potensi lahan untuk meningkatkan capaian pada tahun berikutnya.

b) Kabupaten Lahat

Target luas tanam padi reguler Kabupaten Lahat pada tahun 2025 sebesar 24.481 hektar dengan capaian LTT reguler sebesar 18.567 hektar, atau baru 75,84% dari target yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan bahwa secara kumulatif, realisasi LTT masih berada di bawah dari target tahunan yang telah direncanakan (Tabel 1).

Tabel 8. Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Kab. Lahat S.d Desember 2025

No.	Kecamatan	LBS (Ha)	Realisasi LTT (Ha)
1.	Merapi Timur	748	447
2.	Merapi Barat	202	180
3.	Merapi Selatan	375	451
4.	Lahat	148	225
5.	Lahat Selatan	427	479
6.	Gumay Talang	31	83
7.	Pseksu	49	14
8.	Pulau Pinang	162	366
9.	Gumay Ulu	90	224
10.	Pagar Gunung	716	1.280
11.	Tanjung Tebat	1.112	1.573
12.	Kota Agung	1.327	1.502
13.	Mulak Ulu	814	430
14.	Mulak Sebingkai	428	560
15.	Tanjung Sakti Pumu	829	653
16.	Tanjung Sakti Pumi	804	680
17.	Pajar Bulan	595	1.570
18.	Suka Merindu	691	1.656
19.	Jarai	1.224	2.569
20.	Muara Payang	183	986
21.	Kikim Barat	85	100
22.	Kikim Tengah	235	269
23.	Kikim Selatan	1.258	1.857
24.	Kikim Timur	118	413
Total		12.652	18.567

Sumber: data sekunder 2025

Realisasi tanam di Kabupaten Lahat mencapai 18.567 hektar, melampaui luas baku sawah (LBS) sebesar 12.652 hektar yang menunjukkan peningkatan intensitas tanam dan efektivitas percepatan tanam di berbagai kecamatan. Capaian tertinggi terlihat di Kecamatan Pajar Bulan, Suka Merindu, Jarai, dan Kikim Selatan yang berhasil mengoptimalkan lahan dan meningkatkan frekuensi

tanam, sementara Pagar Gunung, Tanjung Tebat, dan Kota Agung turut memberikan kontribusi signifikan. Namun, beberapa wilayah seperti Psekus dan Merapi Timur masih berada di bawah potensi sehingga memerlukan penguatan pendampingan dan dukungan input produksi. Secara bulanan, realisasi tanam umumnya masih sedikit di bawah target meskipun sempat mendekati target pada Maret–April, dengan penurunan signifikan pada Juni akibat musim kopi dan keterbatasan sumber daya produksi. Setelah itu realisasi meningkat secara bertahap namun belum sepenuhnya mencapai target, sehingga diperlukan strategi percepatan tanam, penyediaan input tepat waktu, dan koordinasi lintas wilayah untuk mengoptimalkan pencapaian LTT tahunan.

Belum optimalnya capaian Luas Tambah Tanam (LTT) padi di Kabupaten Lahat disebabkan oleh berbagai faktor teknis dan nonteknis, terutama kerusakan jaringan irigasi akibat bencana alam dan alih fungsi lahan di beberapa kecamatan seperti Mulak Ulu, Pulau Pinang, Kikim Selatan, dan Pajar Bulan yang mengakibatkan ratusan hektar sawah kekurangan suplai air. Selain itu, sebagian wilayah tadah hujan masih memiliki Indeks Pertanaman (IP) 100 dan mengalami kondisi kering sehingga petani harus menunggu curah hujan. Proses perbaikan irigasi yang sedang berlangsung juga menyebabkan penundaan tanam, sementara musim panen kopi yang lebih menguntungkan menyerap tenaga kerja petani sehingga jadwal tanam padi bergeser. Kombinasi keterbatasan air, infrastruktur pertanian yang belum optimal, serta faktor sosial ekonomi petani menyebabkan capaian LTT baru mencapai 68,04% dari target tahunan.

Upaya percepatan LTT dilakukan melalui perbaikan jaringan irigasi yang didanai APBD dan APBN, penambahan dan percepatan distribusi benih serta sarana produksi, monitoring kesiapan tanam secara berkala, dan penguatan koordinasi dengan dinas pertanian serta stakeholder terkait. BRMP Sumatera Selatan bersama Tim Swasembada Pangan juga melaksanakan konsolidasi data LBS, pendampingan lapang intensif oleh penyuluh, serta gerakan tanam serempak untuk mengejar target nasional LTT Kabupaten Lahat sebesar 24.481 ha menuju IP 200. Seluruh langkah ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lahan, mempercepat tanam, serta meningkatkan kontribusi Kabupaten Lahat dalam mendukung swasembada pangan nasional.

c) Kabupaten Musi Rawas

Target LTT padi reguler Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2025 sebesar

28.920 hektar dengan realisasi mencapai 29.667 Hektare (102,58 %). Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kepmentan 808/Kpts./KP.250/A/09/2025.

Tabel 9. Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Kabupaten Musi Rawas 2025

No	Kecamatan	LBS	LBS Aktif	LBS tdk Aktif	Realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) Tahun 2025												Jumlah
					Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	STLU Terawas	2.651	1.852	799	770	896	592	247	65	158	486	439	468	187	65	365	4.738
2	Selangit	18	0	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumberharta	2.499	2.100	399	839	973	490	329	291	181	639	1.015	490	115	13	96	5.470
4	Tugumulyo	2.700	2.200	500	656	596	519	628	490	510	517	520	293	270	359	455	5.782
5	Purwodadi	1.522	1.410	112	202	664	576	212	89	32	174	265	752	287	0,25	22	3.274
6	Muara Beliti	1.462	1.250	212	251	243	400	426	280	191	304	199	77	141	156	222	2.890
7	TP Kepungut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jayaloka	11	0	11	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
9	Suka Karya	100	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
10	Muara Kelingi	341	200	141	106	42	-	11	88	114	1	1	-	20	78	160	621
11	BTS Ulu	140	125	15	9	4	95	8	-	4	23	-	-	10	10	8	171
12	Tuah Negeri	532	200	332	152	53	4	8	68	63	10	2	0,50	3,75	58	7,25	429
13	Muara Lakitan	228	150	78	83	5	-	5	44	75	44	9	6,5	8,50	33	60	373
14	Megang Sakti	2.765	2.500	265	1.025	667	516	451	498	513	620	635	256,75	182,75	271,5	267	5.903
Jumlah		14.969	11.987	2.982	4.104	4.143	3.192	2.325	1.913	1.841	2.788	3.084	2.343,2	1.224,2	1.046,25	1.663,25	29.667

Meskipun target LTT Kabupaten Musi Rawas tercapai bahkan melebihi target, namun terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat optimalnya peningkatan produksi pertanian di kabupaten ini. Permasalahan pertanian di Kabupaten Musi Rawas yang dapat menghambat capaian produksi optimal meliputi keterbatasan ketersediaan air irigasi pada musim kemarau, kerusakan dan belum optimalnya fungsi jaringan irigasi, serta tingginya ketergantungan petani terhadap curah hujan yang tidak stabil sehingga menghambat pengolahan lahan. Selain itu, faktor sosial dan kelembagaan petani juga turut berpengaruh, seperti rendahnya minat generasi muda untuk bertani, kekhawatiran petani terhadap serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang menyebabkan penundaan tanam, serta kebiasaan sebagian petani mengistirahatkan lahan setelah panen tanpa segera melakukan olah tanah. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan alat mesin pertanian (alsintan) yang menghambat percepatan pengolahan lahan dan pelaksanaan tanam secara optimal.

Optimalisasi target swasembada pangan di Kabupaten Musi Rawas dilakukan melalui peningkatan pendampingan yang terarah, intervensi program yang tepat, serta perbaikan sarana dan prasarana pertanian guna mendorong peningkatan Indeks Pertanaman. Peran BRMP Sumatera Selatan sebagai penanggung jawab pendamping menjadi strategis melalui penguatan

pendampingan teknis budidaya, penerapan inovasi teknologi, penggunaan varietas unggul genjah, optimalisasi sumber daya air, serta peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok tani. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, BRMP Sumsel, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta dukungan Bulog dalam pembelian hasil panen dan pembayaran tepat waktu diharapkan mampu mempercepat peningkatan luas tambah tanam, mendukung pencapaian swasembada pangan, serta meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

d) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Sampai dengan akhir bulan Desember 2025 (Triwulan IV), Luas Tambah Tanam Padi terhitung dari bulan Januari hingga Desember 2025 diperkirakan sebanyak 12.897 hektar. Data LTT tersebut memenuhi target yang ditetapkan pusat untuk LTT di wilayah kabupaten OKU Selatan, yaitu seluas 12.230 hektar. Data LTT per kecamatan di wilayah kabupaten OKU Selatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Kabupaten OKU Selatan 2025

No.	Kecamatan	LBS (Ha)	LBS Aktif	LBS Tidak Aktif	Diluar LBS	Standing Crop per bulan November		PERFORMA MT			LTT Nov	LTT Des	Reals LTT Jan-Des25
						Padi	Non Padi	MT I	MT II	MT III			
	OKU Selatan	8.821	8.147	674	-	2.905	-	3.903	3.789	3.886	1,910	1,412	13,052
1	Banding Agung	324	305	19		15		160	237	101	100	4	572
2	Buana Pemaca	228	221	6		-		144	16	102	72	0	246
3	Buay Pemaca	997	859	138		175		877	249	424	137	370	1552
4	BPR Ranau Tengah	785	736	48		234		33	82	326	113	32	757
5	Buay Rawan	266	257	9		129		224	0	255	0	129	384
6	Buay Runjung	617	593	24		498		244	457	453	62	31	1160
7	Buay Sandang Aji	442	406	35		74		47	286	158	45	12	561
8	Kisam Ilir	267	216	51		62		119	180	108	80	63	528
9	Kisam Tinggi	255	231	25		149		86	155	149	106	0	496
10	Mekakau Ilir	379	373	6		130		121	122	130	207	42	501
11	Muara Dua	578	533	45		147		383	128	236	267	5	833
12	Muara Dua Kisam	1.044	1.043	1		471		226	332	554	198	88	1215
13	Pulau Beringin	841	767	74		407		125	379	308	125	133	1066
14	Runjung Agung	126	117	8		2		48	0	277	0	124	449
15	Simpang	522	516	6		144		520	485	56	268	100	1242
16	Sindang Danau	555	457	98		13		139	442	33	0	195	698
17	Sungai Are	127	66	61		12		35	84	3	18	2	144
18	Tiga Dihaji	189	180	10		166		139	17	176	22	2	258
19	Warkuk Ranau Selatan	278	270	9		77		233	138	37	90	80	390

e) Kabupaten Empat Lawang

Pelaksanaan kegiatan pendampingan luas tambah tanam (LTT) Reguler Padi di Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan di 10 (sepuluh) Kecamatan, yakni

Kecamatan Muara Pinang, Lintang Kanan, Pendopo Induk, Pendopo Barat, Pasemah Air Keruh, Ulu Musi, Sikap Dalam, Talang Padang, Tebing Tinggi, dan Saling. Dari target 19.000 hektar LTT Reguler Padi pada Tahun 2025, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terealisasi seluas 19.405,2 hektar (102%).

Capaian Luas Tambah Tanam (LTT) tahun 2025 tercatat melampaui target sebesar 402,2 hektar dari target 19.000 hektar, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis. Keterbatasan alat mesin pertanian, khususnya traktor roda dua, menyebabkan pengolahan lahan harus dilakukan secara bergiliran sehingga jadwal tanam mundur dan luas tanam tidak optimal. Selain itu, banyak jaringan irigasi yang sudah tua, rusak, dan kurang terawat sehingga distribusi air tidak berjalan maksimal di berbagai kecamatan seperti Muara Pinang, Saling, Sikap Dalam, Talang Padang, Pasemah Air Keruh, Pendopo, Pendopo Barat, Tebing Tinggi, dan Ulu Musi. Kerusakan saluran irigasi, berkurangnya debit air, hingga kekeringan lahan menyebabkan ratusan hektar sawah tidak memperoleh pengairan yang memadai bahkan sebagian mengalami alih fungsi menjadi perkebunan.

Di sisi lain, terdapat kendala sosial budaya dan faktor eksternal yang turut memengaruhi capaian LTT, seperti pembagian air irigasi yang tidak merata antara wilayah hulu dan hilir yang memicu konflik antarpetani, kecenderungan petani beralih ke komoditas yang lebih menguntungkan seperti kopi dan karet, serta alih fungsi lahan ke perkebunan. Permasalahan lain meliputi jadwal tanam yang tidak serempak sehingga pengendalian hama menjadi kurang efektif, tingginya ketergantungan pada sawah tadah hujan, serta dampak perubahan iklim yang menyebabkan pola hujan tidak menentu dan memperbesar risiko kekeringan maupun banjir. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan pengelolaan pertanian dan pencapaian target produksi masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks.

f) Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir (PALI)

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memiliki target luas tanam padi reguler pada tahun 2025 sebesar 12.840 hektar dan Indeks Pertanaman (IP) 200. Berdasarkan hasil pemantauan hingga bulan Desember 2025, capaian Luas Tambah Tanam (LTT) reguler Kabupaten PALI tercatat sebesar 4.856,75 hektar, atau setara dengan 37,83% dari target yang ditetapkan melalui Kepmentan. Angka ini menunjukkan bahwa secara kumulatif, realisasi LTT masih berada di

bawah dari target tahunan yang telah direncanakan (Tabel.16)

Tabel 9. Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Kabupaten PALI 2025

No.	Kecamatan	LBS (Ha)	Realisasi (Ha)
1.	Talang Ubi	364	574,50
2.	Tanah Abang	3.364	2.216,25
3.	Abab	1.905	1.304,00
4.	Penukal	142	420,00
5.	Penukal Utara	624	342,00
Total		6.399	4.856,75

Apabila ditinjau lebih lanjut dengan membandingkan antara capaian LTT dan Luas Baku Sawah (LBS) Kabupaten PALI yang diketahui sebesar 6.399 hektar, maka realisasi LTT reguler hingga Desember 2025 telah mencapai sekitar 75,90% dari total LBS. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi pemanfaatan lahan sawah yang tersedia, kegiatan budidaya padi di Kabupaten PALI telah berjalan cukup optimal. Sebagian besar lahan sawah yang ada telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanaman padi, baik pada musim tanam pertama maupun sebagian musim tanam berikutnya.

Perbedaan persentase capaian terhadap target Kepmentan (37,83%) dan terhadap LBS (75,90%) menggambarkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan kondisi riil di lapangan. Target yang ditentukan oleh pemerintah pusat mengandung asumsi bahwa seluruh lahan sawah dapat ditanami dua kali dalam setahun (IP 200), bahkan adanya tambahan perluasan areal tanam ke lahan-lahan potensial lainnya seperti lahan kering yang dapat dikembangkan untuk pertanaman padi.

Belum optimalnya capaian Luas Tambah Tanam (LTT) di Kabupaten PALI dipengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan air irigasi pada musim kemarau, tingginya ketergantungan terhadap curah hujan, serta faktor sosial dan kelembagaan petani seperti keterbatasan modal, belum meratanya kesiapan tanam dua kali setahun, dan kekhawatiran terhadap risiko gagal panen akibat perubahan iklim dan serangan OPT sehingga sebagian petani menunda musim tanam kedua. Meskipun demikian, capaian LTT sebesar 75,90% terhadap luas baku sawah menunjukkan potensi peningkatan yang masih besar melalui intervensi program yang tepat, pendampingan intensif, dan perbaikan sarana prasarana pertanian. Peran BRMP Sumatera Selatan sebagai penanggung jawab pendamping menjadi strategis melalui penguatan pendampingan teknis, penerapan inovasi teknologi, penggunaan varietas unggul genjah, optimalisasi

sumber daya air, serta peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok tani, yang didukung sinergi pemerintah pusat, daerah, penyuluh, dan petani guna mempercepat swasembada pangan serta meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

g) Kabupaten Musi Rawas Utara

Target LTT padi reguler Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu 2.059 ha dengan capaian 2.076,5 ha (100,85%). Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 memiliki luas baku sawah (LBS) sebesar 2.201 ha dengan agroekosistem didominasi lahan tadah hujan serta sebagian rawa lebak dan sawah irigasi. Dari total tersebut, seluas 1.860 ha merupakan lahan aktif yang biasa ditanami padi, sedangkan 341 ha tidak lagi ditanami selama empat tahun terakhir akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan serta kondisi rawa lebak dalam yang selalu tergenang air. Rendahnya minat petani menanam padi juga dipengaruhi kebiasaan masyarakat yang lebih berorientasi pada usaha perkebunan serta keterbatasan ketersediaan benih bermutu. Upaya pemecahan yang dilakukan meliputi pengembangan padi gogo pola tumpang sisip pada lahan perkebunan, pengajuan cetak sawah dan normalisasi saluran irigasi pada lahan rawa, sosialisasi dan pendampingan teknis melalui demplot untuk meningkatkan minat bersawah, serta pengembangan penangkar benih guna menjamin ketersediaan benih berkualitas.

Realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif sepanjang tahun. Pada Triwulan I (Januari–Maret), realisasi tanam mencapai 117 ha dari target 114 ha sehingga target tercapai sesuai rencana, dengan kontribusi utama berasal dari Kecamatan Karang Jaya dan Ulu Rawas. Pada Triwulan II, capaian meningkat signifikan dengan realisasi 906 ha dari target 537 ha atau lebih dari 166% akibat surutnya genangan lahan sehingga petani dapat mempercepat penyiapan lahan dan penanaman, terutama di Kecamatan Rawas Ilir dan Ulu Rawas. Memasuki Triwulan III, kegiatan tanam didominasi padi gogo sesuai karakter musim tanam lokal yang berlangsung Agustus–Oktober, dimana hingga September realisasi mencapai 411 ha melalui dukungan distribusi benih, gerakan tanam, serta percepatan tanam di lahan sawit belum menghasilkan (TBM).

Pada Triwulan IV, realisasi tanam tetap berjalan dengan capaian Oktober sebesar 416 ha sesuai target, sementara November dan Desember mengalami

penurunan karena percepatan tanam telah dilakukan pada bulan sebelumnya. Secara kumulatif hingga akhir Desember 2025, realisasi LTT mencapai 2.076,5 ha atau melampaui target kabupaten sebesar 2.059 ha. Keberhasilan ini didukung oleh stabilnya musim hujan pada paruh akhir tahun, pelaksanaan gerakan tanam padi gogo, pompanisasi, serta sinergi pemerintah daerah, penyuluh, dan petani di tujuh kecamatan, sehingga program peningkatan luas tanam di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat tercapai secara optimal.

h) Kota Palembang

Target LTT padi reguler Kota Palembang adalah seluas 6.273 ha dengan realisasi tanam seluas 3.057 ha (48,73 %) lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Realisasi tanam Kota Palembang baru dimulai pada bulan April karena lahan pada bulan-bulan sebelumnya masih tergenang, bahkan baru bisa tanam bulan Mei, Juni dan Juli.

Tabel 25. Realisasi Tanam Kota Palembang (Jan-Des) 2025

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Realisasi Tanam Padi (Ha)												Jumlah Realisasi Tanam Jan-Des 25
			Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agu 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	
Sumatera Selatan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang		0,50	3,20	1,40	137,84	755,72	1380,49	674,74	15,18	9,75	51,25	17,5	9,5	3057,1
	Lahan Baku Sawah	3295													3.057
		Alang-alang Lebar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bukit Kecil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gandus	0	0,5	0,15	25,09	210,8	305,82	5,35	3,6	2	0	0	0	553,30
		Iilir Barat I	0	0	0	0	0,11	1,57	2,36	4,39	0	0	0	0	8,43
		Iilir Barat II	0	0	0	0	0	5,68	2,22	0	0	0	0	0	7,9
		Iilir Timur I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Iilir Timur II	0	0	0	2,5	11,25	12,75	0,5	0	0	0	0	0	27
		Iilir Timur III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jakabaring	0	0	0	0	2,5	15,05	7,45	0	0	0	0	0	25
		Kalidoni	0,5	0	0	1	211,78	390,28	43,85	0	0	1	5	5	658,41
		Kemunings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kertapati	0	1,5	1,25	55,75	268,65	546,9	565,95	2,5	7,75	50,25	4,5	0	1505
		Plaju	0	0	0	53,5	49,63	70,95	31,75	0	0	0	0	0	205,83
		Sako	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Seberang Ulu I	0	0	0	0	0	0	9,31	4,69	0	0	0	0	14
		Seberang Ulu II	0	0,2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4,20
		Sematang Borang	0	1	0	0	1	31,50	2	0	0	0	8	4,5	48,00
		Sukarami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Realisasi tanam padi reguler Kota Palembang tahun 2025 pada pertanaman IP 100 mencapai 3.057 ha atau 92,83% dari target awal 3.273 ha, namun baru 48,4% dari target pusat revisi sebesar 6.273 ha. Beberapa lahan tidak tertanami antara lain di Iilir II seluas 1,75 ha akibat penimbunan lahan sawah, Seberang Ulu II seluas 1,44 ha dan Sematang Borang seluas 39 ha karena keterbatasan modal petani, sementara sebagian lahan di Kertapati tidak terlapor akibat keterlambatan pelaporan PPL. Bantuan benih untuk percepatan IP 200 yang diterima pada akhir Oktober belum optimal dimanfaatkan karena

genangan air yang masih tinggi hingga akhir tahun, ditambah trauma petani akibat gagal tanam sebelumnya, kekurangan modal, serta kekhawatiran banjir saat curah hujan tinggi. Kendala lain yang memengaruhi capaian meliputi status petani bukan pemilik lahan dan alih fungsi sawah menjadi permukiman, sehingga meskipun realisasi tanam meningkat dibanding tahun sebelumnya, target tahunan belum dapat tercapai sepenuhnya.

i) Kota Prabumulih

Target Luas Tambah Tanam (LTT) padi reguler Kota Prabumulih sebesar 319 ha. Hingga bulan Desember 2025, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi reguler Kota Prabumulih tercatat sebesar 164,72 ha, atau 51,62% dari target tahunan 319 ha. Meskipun realisasi ini masih berada di bawah target Kepmentan, namun capaian tersebut selaras dengan kondisi riil lahan sawah yang tersedia di Kota Prabumulih. Capaian LTT berdasarkan distribusi Luas Baku Sawah (LBS) ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 27. Realisasi LTT Padi reguler Kota Prabumulih s.d. Desember 2025

No	Lokasi/Kecamatan	LBS (ha)	Realisasi LTT (ha)
1	Prabumulih Barat	164	164,72
2	Cambai	1	0
Total		165	164,72

Jika dibandingkan dengan LBS Kota Prabumulih yang hanya sebesar 165 ha, maka realisasi LTT telah mencapai hampir 100% pemanfaatan lahan. Dengan demikian, dari sisi intensitas pemanfaatan lahan sawah yang tersedia, kegiatan pertanian padi di kota tersebut telah berjalan optimal.

Perbedaan capaian terhadap target Kepmentan sebesar 51,62% dan capaian terhadap Luas Baku Sawah (LBS) yang hampir 100% menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target kebijakan dan kondisi riil di lapangan. Kota Prabumulih hanya memiliki LBS seluas 165 ha yang tersebar di Kelurahan Payuputat (164 ha) dan Sungai Medang (1 ha), dimana lahan di Sungai Medang tidak dapat diusahakan karena pemiliknya sakit. Lahan sawah di Payuputat merupakan rawa lebak yang umumnya hanya memungkinkan satu kali tanam (IP 100) akibat keterbatasan pengelolaan air, tidak adanya tanggul penahan banjir, serta risiko genangan dari Sungai Lematang. Kondisi tersebut membuat target LTT 319 ha yang mensyaratkan IP 200 sulit dicapai, ditambah rendahnya minat petani untuk tanam lebih dari sekali karena risiko kerugian dan padi bukan

sumber pendapatan utama. Oleh karena itu, meskipun pemanfaatan lahan sudah optimal, diperlukan pendekatan adaptif melalui perbaikan pengelolaan air, pembangunan sarana pengendali banjir, serta penggunaan varietas unggul toleran genangan dan berumur genjah.

j) Kota Pagaralam

Pelaksanaan kegiatan pendampingan luas tambah tanam (LTT) Reguler Padi di Kota Pagar Alam dilaksanakan di 5 (lima) Kecamatan, yakni Kecamatan Dempo Selatan, Dempo Tengah, Dempo Utara, Pagar Alam Selatan dan Pagar Alam Utara). Dari target 6.050 hektar LTT Reguler Padi pada Tahun 2025, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi seluas 6.198 hektar (102,44 %).

Tabel 28. Realisasi Tanam LTT Reguler Kota Pagar Alam

NO	KECAMATAN	LBS (Ha)	LBS Aktif	LBS Non Aktif	Periode Januari-Desember Tahun 2025												JML
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Dempo Selatan	963	733	230	258	265	260	86	132	154	150	118	134	150	169	145	2.021
2	Dempo Tengah	357	350	8	102	108	115	14	16	34	45	38	24	66	43	39	643,5
3	Dempo Utara	611	602	9	187	128	120	53	107	78	103	94	90	123	93	102	1.277,5
4	Pagar Alam Selatan	555	535	20	132	174	155	25	65	75	85	58	87	80	67	78	1.080,5
5	Pagar Alam Utara	602	599	3	148	150	173	25	57	88	83	86	88	89	97	92	1.175,5
JUMLAH		3.088	2.818	270	827	825	823	203	377	429	466	394	423	508	469	454	6.198

Permasalahan pertanian di Kabupaten Musi Rawas yang menyebabkan capaian LTT belum optimal antara lain keterbatasan ketersediaan air irigasi pada musim kemarau, kerusakan dan belum optimalnya jaringan irigasi, ketergantungan pada curah hujan, serta faktor sosial dan kelembagaan petani, termasuk rendahnya minat generasi muda untuk bertani. Selain itu, kekhawatiran terhadap serangan OPT, kebiasaan petani menunda pengolahan lahan setelah panen, kekurangan alsintan, serta curah hujan yang tidak stabil turut menghambat percepatan tanam.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan peningkatan pendampingan melalui intervensi program yang tepat, perbaikan sarana prasarana, peningkatan indeks pertanaman, serta penguatan peran BRMP Sumatera Selatan dalam pendampingan teknis budidaya, penerapan inovasi teknologi, penggunaan varietas genjah, optimalisasi sumber daya air, dan penguatan kapasitas petani serta kelembagaan kelompok tani. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, BRMP, penyuluh, kelompok tani, serta dukungan Bulog dalam pembelian hasil panen dan pembayaran

tepat waktu diharapkan mampu mempercepat peningkatan luas tambah tanam, mendukung swasembada pangan, serta meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

k) Kota Lubuk Linggau

Target LTT reguler Kota Lubuk Linggau sebesar 2.159 Ha. Luas Baku Sawah Kota Lubuk Linggau seluas 1.129 Ha. Berdasarkan Tabel diats., luas tanam padi Kota Lubuk Linggau dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025 yakni seluas 2.049 hektare atau 95% dari target. LBS di Kota Lubuk Linggau mencapai 1.129 hektare dengan LBS aktif 1.092 hektare atau sekitar 96,7 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa infrastruktur pendukung pertanian telah berfungsi secara efektif pada sebagian besar kecamatan.

Tabel 29. Realisasi Tanam Padi di Kota Lubuk Linggau Tahun 2025

NO	Kec.	LBS	LBS Aktif	LBS Tidak Aktif	Target		Realisasi MT 2025 (HA)												Total Tanam	IP
					Dinas	SK 808	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Lubuk Linggau Barat I	134	134	0	278	292	44	0	19	30	15	4	0	100	4	1	42	4	263	196
2	Lubuk Linggau Barat II	60	60	0	35	37	11	0	4	8	6	6	3	0	1	5	2	0	45	75
3	Lubuk Linggau Selatan I	50	50	0	82	86	25	7	28	8	4	2	0	2	2	2	1	0	79	158
4	Lubuk Linggau Selatan II	595	560	35	1.237	1.298	140	155	43	115	32	101	121	49	35	140	80	148	1.158	207
5	Lubuk Linggau Timur I	16	16	0	46	48	7	8	4	3	2	2	4	1	2	1	4	1	40	247
6	Lubuk Linggau Timur II	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lubuk Linggau Utara I	246	246	0	356	374	41	0	51	48	60	42	33	3	1	132	19	11	441	179
8	Lubuk Linggau Utara II	27	27	0	23	24	10	1	0	1	3	0	0	2	0	4	3	0	24	90
	TOTAL	1.129	1.092	37	2.057	2.159	278	171	149	213	121	157	160	156	46	284	151	164	2.049	188

Analisis menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara potensi infrastruktur dan capaian realisasi tanam di Kota Lubuk Linggau. Kecamatan Lubuk Linggau Timur II tidak berkontribusi terhadap realisasi tanam karena LBS yang ada telah beralih fungsi menjadi lahan nonpertanian. Selain itu, beberapa kendala di lapangan juga menghambat pertanaman, antara lain keterbatasan alsintan olah lahan seperti traktor roda dua yang jumlahnya hanya 5 unit

sehingga harus digunakan secara bergiliran oleh petani, serta tidak adanya tambahan bantuan traktor pada tahun 2024. Kerusakan jaringan irigasi juga menjadi masalah, dimana terdapat 10 titik saluran jebol pada D.I. Air Malus–Batu Pepe yang berdampak pada sekitar 110 ha lahan sawah di Kelurahan Petanang Ilir, ditambah kegiatan rehabilitasi saluran sepanjang 1.175 meter pada September–Desember 2025 yang menyebabkan pengeringan saluran dan penurunan debit air irigasi. Kondisi distribusi air yang tidak merata juga memicu potensi konflik antar petani, sementara jadwal tanam yang tidak serentak menyebabkan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) tidak dapat dilakukan secara bersamaan sehingga berpotensi menurunkan produksi. Secara umum, Kota Lubuk Linggau telah menunjukkan pemanfaatan infrastruktur pertanian yang cukup baik, namun pemerataan keberhasilan di seluruh kecamatan masih perlu ditingkatkan melalui intervensi program, pendampingan, bantuan sarana prasarana, serta optimalisasi penerapan teknologi pertanian.

5.1.2. Pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Gogo

a) Kabupaten Ogan Komering Ulu

Target luasan kegiatan LTT Padi Gogo di Kabupaten OKU Tahun 2025 ditetapkan sebesar 756 hektar. Selanjutnya, melalui SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 500.6.10/OS/KPTS/XXXVII/01/2025 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering, ditetapkan luasan CPCL sebesar 330 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten OKU.

Hasil evaluasi lapangan menunjukkan adanya penyesuaian lokasi kegiatan LTT padi gogo di Kabupaten OKU, dimana rencana awal seluas 200 ha di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Lengkiti, direalisasikan menjadi 117 ha karena keterbatasan kesiapan teknis lahan. Sisa luasan dialihkan ke Desa Tungku Jaya (25 ha) dan Desa Air Wall (58 ha) agar kegiatan dapat dilaksanakan pada lahan yang lebih siap secara agronomis. Secara keseluruhan, kegiatan pengembangan padi gogo tersebar di lima lokasi dengan dukungan sarana produksi berupa 33 dus herbisida dan 6.600 kg benih Inpago 13 Fortiz yang telah didistribusikan kepada kelompok tani melalui KUD. Namun, hingga Desember 2025 realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) baru mencapai 65 ha atau 19,69% dari target daerah (330 ha) dan 8,59% dari target nasional (756 ha), menunjukkan capaian yang masih jauh dari perencanaan.

Rendahnya realisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu efektivitas herbisida yang kurang optimal dalam mengendalikan gulma, keterbatasan modal petani untuk pengolahan lahan dan pengendalian lanjutan, kondisi curah hujan yang belum mendukung pertumbuhan awal tanaman, serta naungan tanaman sawit yang mengurangi intensitas cahaya bagi padi gogo. Untuk meningkatkan capaian ke depan, diperlukan langkah perbaikan meliputi evaluasi jenis sarana produksi, penguatan pembiayaan petani, peningkatan pendampingan teknis, penyesuaian waktu tanam dengan kondisi iklim, seleksi lokasi yang lebih sesuai, penguatan komitmen kelompok tani dan KUD, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan berkontribusi terhadap pencapaian target swasembada pangan.

b) Kabupaten Lahat

Target luas tanam padi lahan kering (padi gogo) di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, seluas 557,10 hektar. Realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi gogo di Kabupaten Lahat hingga Desember 2025 mencapai 96,50 ha, dengan perkembangan bertahap pada September (13,5 ha), Oktober (21 ha), November (42 ha), dan Desember (20 ha). Kegiatan penanaman tersebar di beberapa desa di Kecamatan Kikim Timur dan Kikim Barat, yaitu Bunga Mas, Kencana Sari, Gunung Karto, Batu Urip, Mekar Jaya, dan Marga Mulya. Data realisasi dihimpun melalui laporan PPL, diverifikasi oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat, serta dikawal oleh Tim BRMP Sumsel sebelum dilaporkan ke tingkat pusat. Meskipun masih di bawah target usulan CPCL, capaian ini menunjukkan tren peningkatan yang dipengaruhi oleh kesiapan petani, ketersediaan sarana produksi, kondisi cuaca, kesiapan lahan, serta koordinasi lintas lembaga.

Pelaksanaan kegiatan menghadapi sejumlah kendala utama, antara lain keterlambatan turunnya hujan yang menyebabkan penundaan tanam, tingginya pertumbuhan gulma pada lahan sawit muda dengan keterbatasan herbisida, serta kendala teknis pelaporan berupa kesulitan pengambilan foto berkoordinat (geotagging). Selain itu, masalah administrasi status lahan di beberapa desa menyebabkan penundaan olah lahan, sementara sebagian petani mengundurkan diri akibat tekanan gulma dan keterbatasan sarana produksi. Faktor-faktor tersebut berdampak pada lambatnya realisasi LTT dan menurunnya partisipasi

petani di beberapa lokasi.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan langkah perbaikan melalui identifikasi lokasi alternatif yang siap tanam, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pendampingan teknis intensif oleh BRMP Sumsel dan penyuluh pertanian. Upaya lain meliputi penyediaan sarana produksi tepat waktu, pelatihan geotagging untuk meningkatkan kualitas pelaporan, penyelesaian administrasi lahan, peningkatan motivasi petani, serta penyesuaian kalender tanam berbasis pola curah hujan lokal. Melalui sinergi pemerintah daerah, penyuluh, dan kelompok tani, diharapkan pelaksanaan LTT padi gogo ke depan menjadi lebih efektif dan mampu meningkatkan kontribusi terhadap pencapaian swasembada pangan daerah.

c) Kabupaten Musi Rawas

Target pengembangan padi lahan kering di Kabupaten Musi Rawas seluas 1.368 ha. Pelaksanaan kegiatan padi gogo di Kabupaten Musi Rawas diawali dengan pengusulan dan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) seluas 575 ha yang tersebar di Kecamatan BTS Ulu, Tuah Negeri, Sumber Harta, Sukakarya, dan Muara Lakitan. Selain program tumpang sisip padi gogo (Tusippago), petani juga mengembangkan padi gogo secara swadaya dengan varietas lokal Dayang Rindu seluas sekitar 900 ha. Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, total realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi gogo mencapai 1.549 ha, terdiri dari 574 ha program APBN dan 976 ha swadaya petani. Capaian ini melampaui target Kepmentan sebesar 1.368 ha atau mencapai 113,23%, menunjukkan potensi besar pengembangan padi gogo di lahan kering serta kontribusi terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani.

Upaya percepatan tanam juga didukung melalui kegiatan pendampingan dan gerakan tanam bersama di berbagai lokasi, seperti di Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka serta Desa Cipto Kecamatan Sukakarya dengan penggunaan varietas unggul Inpago 13 Fortiz. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, penyuluh, BRMP Sumsel, serta kelompok tani, yang tidak hanya melakukan penanaman tetapi juga diskusi lapangan untuk memperkuat koordinasi dan memecahkan permasalahan teknis. Pendampingan juga dilakukan di Kecamatan Tuah Negeri dan wilayah lainnya untuk mendorong percepatan tanam serta memastikan bantuan benih dimanfaatkan secara optimal oleh petani.

BRMP Sumsel juga melakukan pengawalan dan monitoring percepatan

LTT di beberapa kecamatan seperti Sumber Harta dan BTS Ulu. Kegiatan monitoring mencakup evaluasi perkembangan tanam, pendampingan teknis budidaya, serta koordinasi dengan penyuluh dan kelompok tani terkait kendala di lapangan, seperti lamanya persiapan lahan dan kebutuhan sarana produksi. Antusiasme petani cukup tinggi karena varietas Inpago 13 Fortiz memiliki umur genjah, toleran terhadap kondisi lahan kering, serta potensi produksi yang baik sehingga dapat menjadi alternatif pengembangan padi di luar lahan sawah irigasi.

Meskipun capaian LTT cukup baik, masih terdapat beberapa kendala teknis dan sosial budaya, antara lain pembagian air irigasi yang belum optimal, kerusakan saluran sekunder di DI Kelingi Tugumulyo yang berdampak pada sekitar 417 ha sawah, alih fungsi lahan sawah menjadi kolam ikan atau komoditas lain, serta keterbatasan alsintan yang memperlambat pengolahan lahan. Selain itu, sebagian masyarakat masih mempertahankan sistem tanam dan panen manual berbasis gotong royong sehingga penggunaan mekanisasi belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, BRMP Sumsel, penyuluh, kelompok tani, serta dukungan Bulog dalam penyerapan hasil panen guna mempercepat peningkatan LTT dan mendukung pencapaian swasembada pangan.

d) Kabupaten Empat Lawang

Berdasarkan Nomor 808/Kpts./KP.250/A/09/2025 tanggal 9 September 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts/PW.020/M/03/2025 tentang Penanggungjawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan, target padi gogo di Kabupaten Empat Lawang adalah 48 ha. Namun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang Nomor 520/04/KEP/PERTANIAN/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Usulan Kelompok Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Manfaat Bantuan Benih Padi Gogo dalam Program Pengembangan (Tumpang Sari/Intercropping) di Lahan Perkebunan Sawit, Perkebunan Karet atau Perkebunan Lainnya dalam rangka mendukung Swasembada Pangan Nasional di Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan semula target padi gogo di Kabupaten Empat Lawang adalah 48 ha menjadi 60 ha.

Bantuan benih padi gogo telah didistribusikan kepada kelompok tani sesuai SK CPCL Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang pada 12 Maret 2025,

yaitu kepada Poktan Talang Lama dan Poktan Flamboyan di Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi serta Poktan Serasan Indah di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang. Selain itu, bantuan herbisida telah disalurkan pada Mei 2025, sementara bantuan pestisida masih dalam proses penyaluran.

Realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi gogo mencapai 60 ha (100%) dengan rincian capaian pada April 2025 seluas 31 ha, Mei 22,8 ha, dan Juni 6,2 ha. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain waktu tanam yang bersamaan dengan panen padi dan kopi sehingga petani memprioritaskan panen, sebagian lahan belum siap tanam atau masih ditanami jagung, curah hujan yang rendah, serta keterbatasan tenaga kerja. Selain itu, pertumbuhan tanaman di beberapa lokasi kurang optimal akibat kondisi lahan kering yang kekurangan air serta adanya dugaan serangan hama orong-orong yang menyebabkan batang menguning dan akar tanaman rusak.

e) Kabupaten PALI

Kabupaten PALI ditetapkan memperoleh target pengembangan padi lahan kering pada tahun 2025 seluas 800 hektar. Proses pengusulan dan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) padi gogo di Kabupaten PALI dilakukan melalui pendampingan langsung oleh BRMP Sumatera Selatan guna memastikan kelayakan teknis lokasi dan kesiapan pelaksanaan kegiatan. Kabupaten PALI mengusulkan CPCL dalam tiga tahap dengan total luas 1.636 ha yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Tanah Abang, Abab, Talang Ubi, Penukal, dan Penukal Utara, sementara usulan tahap ketiga difokuskan pada Kecamatan Talang Ubi. Kegiatan ini bertujuan mendukung pengembangan padi lahan kering melalui identifikasi lokasi yang potensial serta kesiapan pembukaan lahan dan penanaman.

Berdasarkan pemantauan hingga Desember 2025, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi gogo di Kabupaten PALI mencapai 2.131,49 ha atau 266,44% dari target 800 ha. Keberhasilan ini didukung oleh pendampingan intensif BRMP Sumsel, komitmen pemerintah daerah dan dinas pertanian, tingginya partisipasi petani, kondisi musim tanam yang mendukung, serta adanya perluasan area tanam di luar target awal. Capaian tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan potensi produksi padi dan menunjukkan bahwa Kabupaten PALI memiliki peluang besar menjadi salah satu sentra pengembangan padi lahan kering di Sumatera Selatan.

f) Kota Prabumulih

Luas Tambah Tanam (LTT) padi gogo Kota Prabumulih sebesar 195 ha. Namun demikian, berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian teknis yang dilakukan, hanya 50 ha yang disetujui dalam daftar Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL). Penyesuaian ini dilakukan karena dari total 82 hektar lahan sawit Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang tersedia, hanya 50 ha yang memenuhi kriteria untuk dilakukan tumpang sisip padi gogo.

Berdasarkan hasil pendampingan di lapangan, penyusutan luas lahan yang dapat ditanami padi gogo di Kota Prabumulih dipengaruhi oleh keterbatasan kelayakan teknis lahan PSR serta kesiapan petani dan dukungan sarana. Dari total potensi 82 ha lahan PSR, tidak seluruhnya layak untuk tumpang sisip padi karena kerapatan tanaman sawit muda, keterbatasan cahaya matahari, serta kondisi kelembapan dan aerasi tanah yang kurang sesuai. Selain itu, sebagian kelompok tani masih memiliki keterbatasan pengetahuan budidaya padi gogo di bawah tegakan sawit, minimnya alat mekanisasi, dan keterbatasan modal usaha tani. Penetapan target LTT sebesar 50 ha merupakan hasil evaluasi teknis terhadap kondisi lahan dan kesiapan petani, dimana keberhasilan pengembangan padi gogo sangat dipengaruhi oleh kesesuaian lahan, adaptasi petani, serta penerapan teknologi budidaya yang tepat. Ke depan, BRMP Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah dan penyuluh pertanian akan terus memperkuat pendampingan melalui penilaian kelayakan lahan, penyuluhan teknologi, dan monitoring pertanaman guna mengoptimalkan pemanfaatan lahan PSR serta mendukung pencapaian swasembada pangan di Kota Prabumulih dan Sumatera Selatan.

g) Kabupaten Musi Rawas Utara

Target Luas Tambah Tanam padi gogo di Kab Musi Rawas Utara tahun 2025 seluas 310 hektar, untuk realisasi tanam pada Bulan Juli hingga September sudah tertanam seluas 205 ha, dimana benih dan Herbisida sudah disalurkan kepada petani pada bulan Mei melalui provinsi dari Kementerian Pertanian. Pertanaman padi gogo di Kab. Musirawas baru ada pertanaman di bulan Juli 2025.

Realisasi luas tanam padi di Kabupaten Musi Rawas Utara selama Juli–Desember 2025 menunjukkan peningkatan bertahap seiring masuknya musim hujan dan adanya upaya percepatan tanam melalui gerakan tanam padi gogo,

pompanisasi, serta pemanfaatan lahan sawit belum menghasilkan (TBM). Pada Juli realisasi mencapai 108 ha sawah dan 2 ha padi gogo, kemudian Agustus 43 ha, September meningkat menjadi 411 ha, Oktober 416 ha, November 123 ha, dan Desember 276 ha. Peningkatan ini didorong oleh dukungan benih Inpago 13 Fortiz, gerakan tanam bersama pemerintah daerah, dinas pertanian, dan TNI di beberapa kecamatan seperti Karang Jaya, Rawas Ulu, Karang Dapo, dan Nibung. Secara keseluruhan hingga akhir Desember 2025, capaian Luas Tambah Tanam (LTT) padi di Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai 2.076,5 ha atau melampaui target kabupaten sebesar 2.059 ha.

h) Kota Pagaralam

Program padi gogo di Kota Pagar Alam dengan target 40 hektar (Kepmentan 808), dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap usulan CPCL. Tahap pertama seluas 16 hektar ditanam bulan Maret-April di 10 (sepuluh) kelompok tani yang ada di Kecamatan Dempo Selatan, dan tahap kedua dengan luasan 31 hektar ditanam di Kecamatan Dempo Utara pada 1 (satu) poktan dan di Kecamatan Dempo Selatan pada 3 (tiga) poktan. Tahap kedua ditanam pada bulan September dan Oktober. Benih yang digunakan pada program padi gogo ini adalah varietas Inpari 32 dan merupakan benih bantuan. Selain benih padi pada program padi gogo ini juga dapat bantuan herbisida dan pestisida. Namun untuk bantuan pestisida sampai laporan ini dibuat belum tersalurkan. Dari target 40 hektar sudah terealisasi tanam seluas 47 hektar.

Dalam rangka mendukung program strategis Kementerian Pertanian, BRMP Sumatera Selatan melaksanakan pendampingan percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) melalui kegiatan Tim Satgas Swasembada Pangan di Kota Pagaralam pada 10–12 September 2025, meliputi pertemuan dengan penyuluh dan kelompok tani di BPP Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan serta Gerakan Tanam Bersama padi gogo di Kelurahan Kance Diwe. Kegiatan ini membahas evaluasi realisasi CPCL tahap I seluas 16 ha pada 10 kelompok tani yang ditanam Maret–April namun sebagian mengalami kegagalan akibat kekeringan, serta percepatan CPCL tahap II seluas 31 ha yang ditanam September–Oktober dan telah berumur 1–2 bulan. Gerakan tanam tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan padi gogo di Kota Pagaralam sebagai kontribusi daerah dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

5.1.3. Pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT) Cetak Sawah Rakyat (CSR)

a) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)

Berdasarkan hasil Survey Investigasi Design (SID), total ketersediaan lahan CSR Kabupaten OKU tercatat seluas 308 ha. Dari evaluasi di lapangan dan kesiapan lahan, total luasan lahan yang dapat diikuti sertakan dalam kegiatan CSR adalah seluas 288,32 ha dan telah direalisasikan dengan penandatanganan kontrak konstruksi pada 17 September 2025.

Berdasarkan kompilasi data hingga Desember 2025, kegiatan land clearing sebagai tahap awal program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kabupaten OKU telah mencapai realisasi fisik 106,026 ha atau sekitar 36,77% dari total target kontrak. Capaian tersebut tersebar di beberapa desa, yaitu Desa Mendala 23,37 ha (96,63%), Desa Karya Jaya 36,29 ha (56,76%), dan Desa Marga Bakti 37,07 ha (23,75%), sementara Desa Lubuk Kemiling, Tanjung Dalam, dan Batumarta I belum memulai kegiatan. Perbedaan progres dipengaruhi oleh kondisi medan, ketersediaan alat berat, serta kendala banjir seperti yang terjadi di Desa Karya Jaya sehingga pekerjaan konstruksi dihentikan sementara. Medan rawa lebak yang dalam dan sulit diprediksi juga menjadi tantangan, bahkan menyebabkan beberapa unit excavator terperosok sehingga memperlambat pekerjaan.

Selain kendala teknis tersebut, keterbatasan alat berat juga menjadi faktor utama yang menghambat percepatan kegiatan. Saat ini tersedia sekitar 14 unit alat berat yang terdiri dari 12 excavator dan 2 bulldozer, sementara kebutuhan ideal mencapai 18 excavator, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 8 unit. Di sisi lain, pada 11 Desember 2025 telah dilaksanakan kegiatan penyerahan alsintan, saprodi, dan sertifikat kelas kelompok tani serta tanam perdana padi program CSR di Desa Mendala oleh Wakil Bupati OKU bersama BRMP Sumsel dan unsur Forkopimda. Bantuan yang diserahkan antara lain 5 unit traktor roda empat, 3 unit rotavator, dan 1 unit combine harvester untuk Brigade Pangan, sebagai dukungan peningkatan produktivitas pertanian dan percepatan pengembangan cetak sawah dengan target Kabupaten OKU seluas 288,31 ha.

b) Kabupaten Musi Rawas

Pada tahun 2025, kegiatan CSR direncanakan seluas 200 hektar di Kecamatan BTS Ulu melalui proses pengusulan berjenjang dari BPP hingga pemerintah provinsi, karena wilayah tersebut dinilai memiliki potensi

pengembangan lahan pertanian baru dari sisi ketersediaan lahan dan dukungan infrastruktur.

Namun, pelaksanaan program tidak dapat dilanjutkan meskipun tahap SID dan kontrak konstruksi seluas 200 ha telah disiapkan. Proses konstruksi terhenti karena dokumen lingkungan belum selesai setelah hasil pertimbangan teknis Kantah menunjukkan lokasi berada pada area plasma PT Perkebunan Hasil Musi Lestari yang bekerja sama dengan KUD Tani Mandiri dan KUD Alpa Mandiri. Permasalahan tersebut menyebabkan kegiatan cetak sawah di Desa Palawe, Kecamatan BTS Ulu, resmi dibatalkan melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 520.3/884/DTPHP/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025.

c) Kabupaten Empat Lawang

Target CSR di kabupaten empat lawang seluas 236 ha, hingga akhir Desember 2025 masih dalam proses pengerjaan Konstruksi yang baru mencapai 140 ha. Pendampingan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kabupaten Empat Lawang dilakukan oleh Tim Satgas Swasembada Pangan BRMP Sumatera Selatan melalui kunjungan lapangan pada 19 Juni 2025 di Desa Tanjung Ning Lama Kecamatan Saling dan 14 Oktober 2025 di Kecamatan Muara Pinang, serta koordinasi nasional melalui Rakor dan Workshop Percepatan Konstruksi Cetak Sawah yang dipimpin Menteri Pertanian RI. Kegiatan ini bertujuan mempercepat pelaksanaan CSR sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung swasembada pangan melalui peningkatan LTT, optimasi lahan, validasi data, dan monitoring infrastruktur pertanian. Penetapan CPCL berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang mencakup 16 lokasi di 6 kecamatan dengan total verifikasi lahan 214,59 ha. Hingga saat ini, target CSR seluas 236 ha masih dalam tahap konstruksi dengan progres mencapai 140 ha, ditandai pula dengan pelaksanaan MC 0 serta tanam padi perdana seluas 11 ha di Desa Seleman Ilir yang melibatkan pemerintah daerah, aparat, penyuluh, dan petani sebagai bentuk komitmen bersama mendukung swasembada pangan.

Selain itu, penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan Brigade Pangan sebagai upaya peningkatan produktivitas pertanian berbasis teknologi modern pada lokasi CSR dan optimasi lahan. Koordinasi pembentukan Brigade Pangan dilaksanakan pada Oktober 2025 yang dilanjutkan dengan sosialisasi di Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, hingga terbentuk

Brigade Pangan “Madani Tani” berdasarkan SK Kepala Desa. Kegiatan ini diperkuat dengan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pada November 2025 yang melibatkan pemerintah daerah, penyuluh, dan petani, sehingga diharapkan mampu meningkatkan tata kelola kelembagaan, memperkuat kapasitas petani, serta mendukung pembangunan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan di Kabupaten Empat Lawang.

d) Kabupaten PALI

Kepala BRMP Sumatera Selatan bertanggung jawab melaksanakan pendampingan konstruksi cetak sawah di Kab. Pali dengan luasan target 3.200 ha. Berdasarkan Kepmentan yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan tugas pendampingan cetak sawah rakyat di Kab. Pali pada tahun 2025 dengan capaian realisasi konstruksi CSR seluas 1.140,70 hektar atau sebesar (35,65%).

Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kabupaten PALI direncanakan seluas sekitar 3.200 ha yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Tahap I seluas 200 ha dan Tahap II seluas ±3.171 ha. Tahap I yang berlokasi di Kecamatan Penukal Utara (Desa Tempirai, Tempirai Utara, dan Tempirai Timur) telah selesai 100% baik dari sisi SID maupun konstruksi, sehingga dapat dinilai berhasil sebagai tahap percontohan dengan perencanaan alat berat yang efisien dan pelaksanaan tepat waktu. Sementara itu, Tahap II mencakup wilayah yang lebih luas di beberapa kecamatan dengan progres konstruksi yang masih bervariasi antara 0% hingga 99%, dengan rata-rata capaian sekitar 29,67%. Perbedaan progres dipengaruhi oleh kondisi lahan, luas pekerjaan, distribusi alat berat, serta kompleksitas teknis di lapangan, sehingga diperlukan penguatan pengendalian pelaksanaan agar target kontrak dapat tercapai sesuai jadwal.

Secara keseluruhan, CSR di Kabupaten PALI memiliki potensi besar dalam meningkatkan luas baku sawah, Luas Tambah Tanam (LTT), indeks pertanaman, serta produksi padi daerah guna mendukung ketahanan pangan. Namun, hingga saat ini realisasi LTT baru mencapai 85 ha yang seluruhnya berasal dari lokasi Tahap I, karena sebagian besar lahan Tahap II masih dalam proses konstruksi dan belum siap tanam. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterlambatan kontrak, kondisi vegetasi lahan yang berat, kesiapan Brigade Pangan, serta kebutuhan pengamanan lahan pascakonstruksi. Oleh karena itu, diperlukan pengawalan terpadu lintas pemangku kepentingan agar percepatan penyelesaian konstruksi diikuti pemanfaatan lahan secara optimal sehingga potensi

peningkatan produksi dan keberlanjutan program dapat tercapai.

e) Kabupaten Musi Rawas Utara

Pembentukan Brigade Pangan di Desa Bukit Langkap dan desa Embacang baru yang merupakan penerima manfaat dari kegiatan Cetak Sawah Rakyat (CSR) tahun 2025 seluas 150 ha yang tengah dalam proses Konstruksi Land Clearing Total se Kabupaten Muratara ,Mseluas 46,07 ha, artinya pada kawasan tersebut bisa dibentuk satu unit Brigade Pangan, yang akan mengelola kegiatan proses produksi dan pengelolaan kawasan pertanaman pangan berupa budidaya padi. Setelah melalui proses sosialisasi selama 2 kali dan pelatihan makan pada tanggal 18 November 2025 telah terbentuk satu unit Brigade Pangan "KARYA LESTARI" yang merupakan kolaborasi antara Tim BRMP Sumsel, Dinas Pertanian dan Perikanan Muratara, Kepala Desa serta Penyuluh Pertanian Lapangan. Kelengkapan yang tidak terpisahkan dari Proses Berdirinya Brigade Pangan adalah Berita Acara Pembentukan, Susunan Pengurus sebanyak 15 orang serta Surat Perjanjian Kerjasama antara Brigade Pangan dan Petani Pemilik Lahan. Setelah Pembentukan Brigade Pangan maka langkah selanjutnya adalah pengusulan Alat mesin Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian untuk pelaksanaan pengelolaan lahan.

Total luas baku sawah (LBS) 1.860 ha hingga Akhir bulan November ter realisasi pertanaman 2.004 ha dan diprediksi hingga akhir desember seluas 2.110 ha, yang diperoleh dari pertanaman padi sawah reguler dan padi tadah hujan/gogo. Realisasi tanam padi gogo dari APBN 310 ha (100%) dilahan perkebunan sawit dan daerah aliran sungai yang potensial ditanami padi, Pendampingan dilakukan melalui percepatan gerakan tanam berkolaborasi dengan Pemerintah desa dan Koramil setempat serta upaya pompanisasi. Cetak sawah Rakyat dari 365 ha kontrak kontruksi sudah pada fase Land Clearing dan Land Levelling seluas 67 ha, dengan 2 Brigade Pangan sudah terbentuk.

5.1.4. Pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT) Optimalisasi Lahan Rawa (OPLA)

a) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)

Kegiatan Optimasi Lahan (Opla25) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2025 merupakan program strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan kondisi lahan dan peningkatan indeks

pertanaman. Kabupaten OKU memperoleh alokasi seluas 250 ha berdasarkan hasil Survey Investigasi Design (SID) dan seluruhnya telah dikontrakkan. Namun, pelaksanaan menghadapi dinamika berupa sengketa batas wilayah seluas 190 ha di Desa Tanjung Makmur, Kecamatan Sinar Peninjauan, yang berbatasan dengan Kabupaten OKU Timur. Permasalahan tersebut telah ditangani melalui mekanisme Adendum/Change Contract Order (CCO) sehingga tidak menghambat keberlanjutan program.

Pelaksanaan kegiatan yang dapat direalisasikan mencakup 140 ha di Desa Karya Jaya (57 ha) dan Desa Marga Bhakti (83 ha), Kecamatan Sinar Peninjauan. Hingga November 2025, seluruh luasan tersebut telah mencapai penyelesaian konstruksi 100% sesuai ketentuan teknis. Dari total area yang telah selesai, realisasi tanam mencapai 105 ha atau sekitar 75%, menunjukkan pemanfaatan lahan berjalan sesuai rencana. Sisa lahan seluas 35 ha di Desa Karya Jaya belum ditanami akibat kondisi pH tanah rendah dan sedang ditangani melalui pengajuan bantuan dolomit sebagai bahan amelioran agar seluruh lahan dapat segera dimanfaatkan.

Program Opla25 di Kabupaten OKU diproyeksikan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari IP150 menjadi IP200, sehingga lahan yang sebelumnya hanya ditanami satu kali per tahun dapat ditanami dua kali. Peningkatan IP ini diharapkan berdampak pada meningkatnya intensitas tanam dan produksi pangan, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, kontribusi terhadap ketahanan pangan daerah dan nasional, serta peningkatan pendapatan petani melalui siklus usaha tani yang lebih produktif dan berkelanjutan.

b) Kabupaten PALI

Pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan (OPLA) Tahun 2025 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan bagian dari implementasi program swasembada pangan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan. Program ini menugaskan BRMP Sumatera Selatan melakukan pendampingan optimasi lahan seluas 650 hektar dengan penyuluh pertanian sebagai ujung tombak penghubung antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaan di lapangan. Seluruh lokasi kegiatan telah memiliki dokumen Survey Investigasi dan Desain (SID) dengan capaian 100 persen sebagai dasar perencanaan teknis, khususnya dalam penataan sistem tata air, saluran, dan konstruksi yang sesuai dengan karakteristik lahan rawa.

Pelaksanaan konstruksi OPLA di Kabupaten PALI menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi fisik mencapai 100 persen dari target 650 hektar. Kegiatan konstruksi meliputi pembangunan dan perbaikan jaringan tata air yang berfungsi meningkatkan kesiapan lahan serta mengubah lahan rawa yang sebelumnya marginal menjadi lahan pertanian yang lebih produktif. Program ini dilaksanakan di beberapa kecamatan utama seperti Tanah Abang, Abab, dan Penukal Utara, sehingga menunjukkan pemerataan pembangunan pertanian berbasis potensi wilayah.

Keberhasilan konstruksi tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) yang mencapai sekitar 647,5 hektar atau 99,62 persen dari target. Tingginya capaian ini mencerminkan respons positif petani terhadap program OPLA yang didukung oleh pendampingan intensif dari penyuluh pertanian. Realisasi tanam juga menunjukkan pola adaptif terhadap kondisi agroklimat, dengan peningkatan aktivitas tanam terutama pada bulan Mei hingga Juni, serta adanya beberapa wilayah yang mampu melampaui alokasi tanam yang direncanakan.

Secara spasial, kegiatan optimasi lahan tersebar di beberapa desa utama yaitu Desa Prambatan (198 ha), Desa Tempirai (189 ha), Desa Pandan (105 ha), dan Desa Modong (102 ha) dengan rata-rata capaian sekitar 97,92 persen. Dukungan infrastruktur air seperti sumur bor, normalisasi saluran, dan pembuatan saluran baru menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Ke depan, keberlanjutan manfaat OPLA memerlukan pemeliharaan infrastruktur, penguatan pendampingan pasca tanam, serta pengelolaan air yang baik agar peningkatan luas tanam dapat diikuti dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

c) Kota Pagaram

Kegiatan Optimasi Lahan (Opla) di Kota Pagar Alam tahun 2025 menargetkan luasan awal 315 hektar yang tersebar pada 15 kelompok tani di tiga kecamatan, yaitu Dempo Selatan, Dempo Tengah, dan Dempo Utara. Seluruh dokumen Survey Investigasi dan Desain (SID) serta kontrak konstruksi telah mencapai 100%. Namun, hingga saat ini progres pengerjaan fisik di lapangan baru mencapai sekitar 50%. Setelah dilakukan verifikasi dan penyesuaian lokasi, luas lahan yang siap dioptimalkan menjadi sekitar 299 hektar.

Dalam mendukung keberhasilan program Opla, telah dilakukan

pembentukan Brigade Pangan (BP) pada 23 Oktober 2025 yang bertujuan memperkuat kelembagaan petani muda dan mendorong peningkatan indeks pertanaman serta produktivitas lahan. Brigade Pangan yang terbentuk diberi nama "Besemah Serame" dan terdiri dari petani muda milenial dari Kecamatan Dempo Utara, Dempo Tengah, dan Dempo Selatan. Organisasi ini memiliki struktur manajerial yang mencakup manajer, sekretaris, divisi produksi, alsintan, panen dan pemasaran, serta keuangan untuk mendukung pengelolaan kegiatan Opla secara efektif.

Pembentukan Brigade Pangan juga menghasilkan beberapa kesepakatan penting, antara lain kemudahan akses BBM untuk operasional alsintan melalui dukungan Pemerintah Kota Pagar Alam serta peluang pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal usaha tani. Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari petani muda yang menunjukkan komitmen untuk mengembangkan pertanian modern serta memperkuat peran generasi muda dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Selanjutnya pada 24 Oktober 2025 dilaksanakan pertemuan teknis di BPP Atung Bungsu yang melibatkan BRMP Sumsel, SMK PP Sembawa, penyuluh pertanian, Babinsa, dan anggota Brigade Pangan Besemah Serame. Pertemuan membahas langkah operasional pascapembentukan BP, termasuk penyusunan proposal bantuan alsintan dan sarana produksi serta pengelolaan lahan Opla. Monitoring lapangan pada 25 Oktober 2025 menunjukkan kegiatan konstruksi telah dimulai secara swakelola, salah satunya di Kelurahan Kance Diwe dengan tahap awal pembuatan saluran cacing sebagai bagian dari upaya optimalisasi lahan di tiga kecamatan sasaran.

Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan secara terarah dan terpadu melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini meliputi pendampingan teknis, sosialisasi kepada petani, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap beberapa program utama, yaitu Optimasi Lahan (Oplah), Cetak Sawah Rakyat (CSR), Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Reguler, dan LTT Padi Gogo.

Hingga 30 November 2025, capaian LTT padi reguler tercatat seluas 65.724 hektar dari target 128.125 hektar atau sebesar 51,29%, sedangkan LTT padi gogo mencapai 2.639 hektar dari target 3.983 hektar atau sebesar 66,27%. Sementara itu,

capaian kegiatan Opla25 di wilayah PALI, OKU, dan Kota Pagar Alam menunjukkan realisasi SID seluas 1.546 hektar dari target 2.114 hektar (73%), dengan kontrak konstruksi telah mencapai 100% dari target 1.546 hektar dan realisasi fisik mencapai 825 hektar atau sekitar 53%.

Adapun capaian kegiatan Cetak Sawah Rakyat (CSR25) di wilayah PALI, OKU, Muratara, Empat Lawang, dan Musi Rawas menunjukkan realisasi SID seluas 5.004 hektar dari target 5.044 hektar atau sekitar 110,5%. Kontrak konstruksi tercatat seluas 4.068 hektar dari target 4.287 hektar (95%), sedangkan realisasi fisik yang telah terlaksana mencapai 951 hektar atau sekitar 22%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap pelaksanaan konstruksi di lapangan dan memerlukan percepatan agar target program dapat tercapai secara optimal.

5.2. Produksi Benih Sumber Padi (150 Ton Benih Padi SS)

Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 memiliki luas panen padi 521,09 ribu hektar mengalami peningkatan sebesar 16,95 ribu ha atau 3,36 persen dibandingkan luas panen padi di 2023 yang sebesar 504,14 ribu Ha (BPS Sumsel 2024), kedepan tentunya pertanaman padi Provinsi Sumsel membutuhkan benih berkualitas untuk menjadi penghasil beras nasional yang diperhitungkan. Dengan agroekosistem yang beragam, maka luas tanam padi di sawah lebak 301.432 ha, pasang surut 231.998 ha, irigasi 107.385 ha, tadah hujan 112.578 ha dan lainnya 35.082 ha yang merupakan peluang dan juga tantangan dalam menghasilkan benih bermutu. Produksi benih dapat saja dihasilkan dari berbagai agroekosistem tersebut. Dari kegiatan ini diharapkan keluaran yang dicapai sesuai target yaitu 150 Ton benih padi SS.

5.2.1. Prosedur Penangkaran Benih

Dalam memproduksi benih padi, kelompok tani penangkar bekerjasama dengan anggota dan UPTD Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Provinsi Sumatera Selatan dengan menerapkan teknologi PTT padi antara lain: 1) olah tanah sempurna, 2) bibit muda kurang dari 21 hari, 3) 1-3 bibit per lubang, 4) pemupukan yang berimbang, 5) pengairan basah kering dan 6) pengendalian gulma dan OPT yang optimal, dan 7) adanya kegiatan roguing oleh kelompok tani atas bimbingan BPSB dan BRMP Sumsel.

Tabel 3. Prosedur Penangkar Benih Padi

	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Mengajukan permohonan dengan kelas benih untuk penangkaran (SS)	Koordinasi BPSB, lampirkan sertifikasi benih
2.	Menentukan tanggal semai, tanggal tanam	Koord BPSB dan petani penangkar
3.	Pemeriksaan I (Umur 1 bulan)	BPSB + Kelompok tani +BRMP
4.	Pemeriksaan II (Umur Primordia)	BPSB + Kelompok tani + BRMP
5.	Pemeriksaan III (Keluar Malai) + Rouging	BPSB + Kelompok tani +BRMP
6.	Penentuan Waktu Panen	BPSB + Kelompok tani
7.	CBKS (Calon Benih Kering Sawah)	Kelompok tani
8.	Proses menjadi calon benih	Kelompok tani
9.	Uji Laboratorium	BPSB
10.	Keluar Draft Sertifikat	BPSB
11.	Cetak Label + Packing	Kelompok tani

Benih pokok diproduksi oleh produsen atau penangkar benih dengan pengendalian mutu melalui proses sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Pengawasan mutu benih mencakup seluruh tahapan produksi mulai dari perbanyakan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dan pemasaran melalui kegiatan pengujian mutu, pengawasan, pengaturan, dan sertifikasi. Keberhasilan pengembangan varietas unggul sangat ditentukan oleh ketersediaan benih bermutu tinggi yang cukup dan tepat waktu, sehingga sistem penyediaan benih seperti Jabalsim dan produksi benih berbasis komunitas perlu terus dikembangkan. Dalam mendukung hal tersebut, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan melalui Unit Penangkaran Benih Sumber telah menginisiasi pembentukan kelompok penangkar benih di tingkat petani serta melakukan pembinaan melalui pertemuan kelompok yang melibatkan penyuluh dan petugas BPSB.

5.2.2. Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan Padi

Kegiatan Perbenihan Padi BRMP Sumatera Selatan dilaksanakan secara partisipatif dengan Kelompok Tani Suka Maju Desa Sukanegara dan Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Ganti Warno Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari bulan April sampai dengan Desember 2025 pada lahan irigasi seluas 60 ha dengan varietas Inpari 32, Inpari 42, Inpari 50, dan Padjajaran. Sebaran varietas dan luasan lahan Kegiatan Perbenihan secara rinci disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Sebaran Varietas dan Luasan Lahan

No.	Lokasi	Varietas	Luas (Ha)
1.	Desa Sukanegara	Inpari 42	10
		Inpari 50	10
		Padjajaran	10
2.	Desa Ganti Warno	Inpari 32	20
		Inpari 42	8
3.	IP2SIP Karang Agung	Inpari 42	2
Total Luas			60

Koordinasi kegiatan perbenihan padi dilakukan secara intensif dengan berbagai instansi terkait, seperti BB Padi, Dinas Pertanian Provinsi, dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Kegiatan diawali dengan verifikasi lokasi di Desa Rantau Durian 2, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir

(OKI), namun lokasi tersebut belum memenuhi persyaratan teknis untuk kegiatan perbenihan. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan UPTD BPSB Kabupaten OKU Timur, sehingga disepakati bahwa kegiatan perbenihan dilaksanakan di Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi kepada kelompok tani penangkar yang melibatkan BPSB, penyuluh pertanian, dan petani pelaksana. Dalam kegiatan ini dibahas berbagai aspek penting seperti penetapan jadwal tanam, verifikasi mutu dan ketersediaan benih, kesiapan lahan dan sistem irigasi, mekanisme distribusi pupuk, penguatan peran penyuluh pertanian lapangan, serta penetapan sistem monitoring dan evaluasi kegiatan. Melalui koordinasi dan pendampingan yang terencana, diharapkan kegiatan perbenihan padi di Belitang III dapat berjalan optimal dan menghasilkan benih bermutu untuk mendukung peningkatan produksi padi dan ketahanan pangan di Sumatera Selatan.



Gambar 3. Koordinasi dan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kegiatan

a) Persiapan Lahan

Pendampingan dan pengawalan pengolahan lahan dan persemaian kegiatan perbenihan padi dilakukan dengan olah tanah sempurna menggunakan traktor kemudian diratakan sehingga memudahkan pada saat bibit ditanam.



Gambar 3. Pengolahan lahan

b) Persemaian

Pelaksanaan persemaian padi dilakukan dengan metode tanam pindah pada petakan lahan yang telah disiapkan, diawali dengan seleksi benih melalui perendaman untuk memisahkan benih tenggelam dan mengapung. Perendaman selama 12 jam menggunakan fungisida dan ZPT bertujuan mencegah penyakit serta merangsang pertumbuhan akar, kemudian benih diperam selama 24 jam hingga berkecambah sebelum disemai. Penyemaian berlangsung selama 15–20 hari sebelum bibit dipindahkan ke lahan tanam. Hasil pengamatan menunjukkan pertumbuhan persemaian empat varietas (Inpari 32, Inpari 42, Inpari 50, dan Padjajaran) cukup baik, ditandai daun berwarna hijau, pertumbuhan seragam, serta persentase tumbuh rata-rata di atas 95% pada umur 15 hari setelah tanam.



Gambar 5. Persemaian Padi

c) Penanaman

Pengaturan populasi tanaman dilakukan melalui penerapan sistem tanam jajar legowo 4:1, dengan jumlah populasi minimum ± 250.000 rumpun per hektar. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi pemanfaatan cahaya matahari, sirkulasi udara, dan ruang tumbuh tanaman, sekaligus mempermudah pemeliharaan, pengendalian OPT, dan pelaksanaan roguing. Pelaksanaan tanam dilakukan secara bertahap mulai dari 15 Juni 2025.



Gambar 8. Pelaksanaan Tanam Perbenihan Padi di Desa Sukanegara

d) Pemeliharaan

Pada usia 15–20 hari setelah tanam, tanaman padi berada pada fase vegetatif awal atau pembentukan anakan sehingga memerlukan pemeliharaan optimal. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyulaman bibit yang mati atau tumbuh kurang baik serta pengaturan pengairan dengan ketinggian air sekitar 5–7 cm. Pengendalian gulma dilakukan melalui penyiangan secara manual, mekanik, atau kimiawi untuk mengurangi persaingan unsur hara.

Pada fase ini juga dilakukan pemupukan susulan pertama menggunakan pupuk NPK cair dan pupuk tanah seperti Urea, SP-36, dan KCl (± 100 kg Urea/ha) guna merangsang pertumbuhan anakan, memperkuat akar, dan meningkatkan kehijauan daun. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara preventif maupun kuratif melalui penyemprotan pada pagi atau sore hari, dengan perhatian khusus pada hama penggerek batang.

Selain itu, telah dilaksanakan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Tikus di Desa Sukanegara, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur pada hamparan 30 hektar, dengan pengendalian aktif seluas 5 hektar. Serangan tikus pada tanaman umur 1–15 HST tergolong cukup tinggi (7–10 lubang aktif/ha). Kegiatan diikuti 26 petani Poktan Suka Maju dan dipimpin oleh Kepala BRMP Sumsel bersama tim, POPT, dan PPL setempat.



Gambar 10. Pelaksanaan Penyemprotan Hama dan Penyakit

e) Panen dan Pasca Panen

Panen padi dilakukan saat tanaman mencapai masak fisiologis, ditandai 90–95% gabah telah menguning untuk menjamin viabilitas dan daya kecambah benih. Setelah panen, gabah segera dirontokkan guna mencegah kerusakan dan penurunan mutu. Kegiatan panen perbenihan di Desa Ganti Warno dan Desa Suka Negara, Kecamatan Belitang III, meliputi varietas Pajajaran, Inpari 32,

Inpari 42, dan Inpari 50 Marem. Benih selanjutnya melalui tahapan penjemuran, pengolahan, dan uji laboratorium untuk sertifikasi, dengan hasil ubinan menunjukkan potensi produksi yang baik dan mendukung target produksi benih sumber. Hasil ubinan masing-masing varietas disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Ubinan Kegiatan Perbenihan Padi

Kelompok Tani	Varietas	Hasil Ubinan (ton/ha)
Mekar Jaya	Inpari 42	4,62
Mekar Jaya	Inpari 32	5,02
Suka Maju	Inpari 42	4,89
Suka Maju	Inpari 50	4,75
Suka Maju	Padjajaran	3,25
IP2SIP Karang Agung	Inpari 42	3,52

Tahap panen dan pascapanen menjadi faktor krusial dalam perbenihan karena kesalahan dapat menyebabkan benih tidak lolos uji mutu. Titik kritis meliputi pencegahan pencampuran varietas, pembersihan alat panen, serta pengeringan gabah segera setelah panen. Penjemuran dilakukan menggunakan alas terpal hingga kadar air mencapai 10–11% (sekitar 3 hari cuaca cerah), kemudian dilanjutkan pembersihan menggunakan seed cleaner untuk memisahkan gabah hampa dan kotoran lainnya.



Gambar 10. Pelaksanaan Panen dan Pasca Panen

f) Sertifikasi

Sertifikasi benih bertujuan menjamin kemurnian dan kebenaran varietas serta ketersediaan benih bermutu secara berkelanjutan. Proses sertifikasi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pemeriksaan lapangan, pemeriksaan laboratorium, dan pengawasan pemasangan label oleh BPSB Provinsi Sumatera Selatan. Sertifikasi ini menjadi jaminan mutu agar benih memenuhi standar nasional dan siap didistribusikan kepada petani guna mendukung peningkatan hasil panen dan keberlanjutan pertanian.

Pendampingan pascapanen dilakukan melalui pengambilan sampel benih untuk uji laboratorium, sekaligus observasi penanganan hasil panen petani mitra, termasuk proses pengeringan dan penyimpanan gabah. Tim memberikan arahan teknis guna menjaga mutu benih serta melakukan verifikasi penerapan teknologi budidaya agar sesuai ketentuan perbenihan. Sampel yang diambil dari gudang petani mitra kemudian diuji di laboratorium untuk memastikan pemenuhan standar benih bersertifikat.

Pengemasan dan pelabelan merupakan tahap akhir yang penting dalam perbenihan untuk melindungi benih dari kerusakan fisik dan pengaruh lingkungan serta mempertahankan kadar air dan daya kecambah selama penyimpanan dan distribusi. Label berfungsi sebagai identitas dan bukti keaslian benih, sehingga mutu tetap terjaga dan benih siap disalurkan kepada pengguna dengan jaminan kualitas.



Gambar 10. Pengambilan Sampel Benih dan Pengemasan serta Pelabelan Benih

5.3. Penguatan Kapasitas Penerapan Standar Dalam Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, namun menghadapi tantangan serius berupa alih fungsi dan degradasi lahan akibat pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pertanian melaksanakan program Upaya Khusus (UPSUS) percepatan dan perluasan tanam padi dan jagung yang didukung melalui penerapan standar pertanian guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan keberlanjutan produksi pangan. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) berperan dalam memperkuat penerapan standar melalui bimbingan teknis, pendampingan, serta integrasi inovasi teknologi dan modernisasi pertanian guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar, program ini bertujuan meningkatkan kemampuan 149 penerap standar SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida, melaksanakan display standar seluas 2 hektare, serta mendorong peningkatan produktivitas padi secara berkelanjutan dan berdaya saing.

Tahapan pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar meliputi bimbingan teknis dan pelaksanaan demplot tanaman padi. Bimbingan teknis dilaksanakan melalui penyampaian materi oleh narasumber dari instansi terkait selama ± 2 jam menggunakan metode ceramah, diskusi partisipatif, praktik, serta kunjungan lapangan untuk meningkatkan pemahaman peserta. Selain itu, kegiatan demplot dilaksanakan sebagai penerapan langsung Standar Nasional Indonesia (SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida) di lahan seluas 2 hektar yang berlokasi di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Karang Agung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Demplot ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan contoh praktik terbaik penerapan standar budidaya padi, meliputi tahapan persiapan lahan, pemilihan dan penyiapan benih, penanaman dan pemeliharaan tanaman, pemupukan, roguing, hingga panen dan pascapanen benih sesuai standar mutu nasional.

5.3.1. Bimbingan Teknis Padi Terstandar Mendukung Swasembada Pangan di Sumatera Selatan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perbenihan Padi Terstandar Mendukung Swasembada Pangan di Sumatera Selatan pada Kamis, 20 November 2025 bertempat di Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) Jalan

P2 Desa Suka Mulya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin.

a. Pelaksanaan Bimtek

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala BRMP Sumatera Selatan yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas perbenihan sebagai fondasi pencapaian swasembada pangan, dilanjutkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin yang secara resmi membuka kegiatan serta menegaskan peran pemerintah daerah dalam pendampingan petani. Selanjutnya dilakukan pre test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta sebagai dasar evaluasi peningkatan kompetensi setelah pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek). Pre test berfungsi memetakan pemahaman awal peserta terkait perbenihan, budidaya, dan standar mutu sehingga efektivitas pelatihan dapat diukur secara objektif.

Materi Bimtek disampaikan oleh berbagai narasumber sesuai bidang keahlian, meliputi penerapan Good Agricultural Practices (GAP) tanaman pangan, peran pemerintah daerah dalam pendampingan perbenihan, pengendalian hama dan penyakit tanaman padi berbasis Pengendalian Hama Terpadu (PHT), serta proses sertifikasi benih padi oleh BPSB yang mencakup tahapan pemeriksaan lapangan hingga pengujian mutu laboratorium. Selain itu, disampaikan pula sosialisasi E-book "Mengetahui Mutu Beras Berdasarkan SNI 6128:2020" guna meningkatkan pemahaman peserta terhadap klasifikasi dan parameter mutu beras sebagai bagian penting dalam rantai pasok pangan nasional. Sesi diskusi berlangsung aktif dengan berbagai pertanyaan peserta terkait penerapan teknik budidaya, pengendalian OPT, serta dukungan infrastruktur pertanian.

Kegiatan ditutup dengan pelaksanaan post test sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian Bimtek. Hasil post test menjadi indikator keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas petani dan pemangku kepentingan dalam menerapkan standar perbenihan dan budidaya padi yang benar. Secara keseluruhan, kegiatan ini berperan penting dalam memperkuat kompetensi petani, penyuluh, dan pemerintah daerah guna mendukung percepatan tanam serta pencapaian swasembada pangan melalui penerapan standar pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan.

b. Evaluasi Pelaksanaan Bimtek

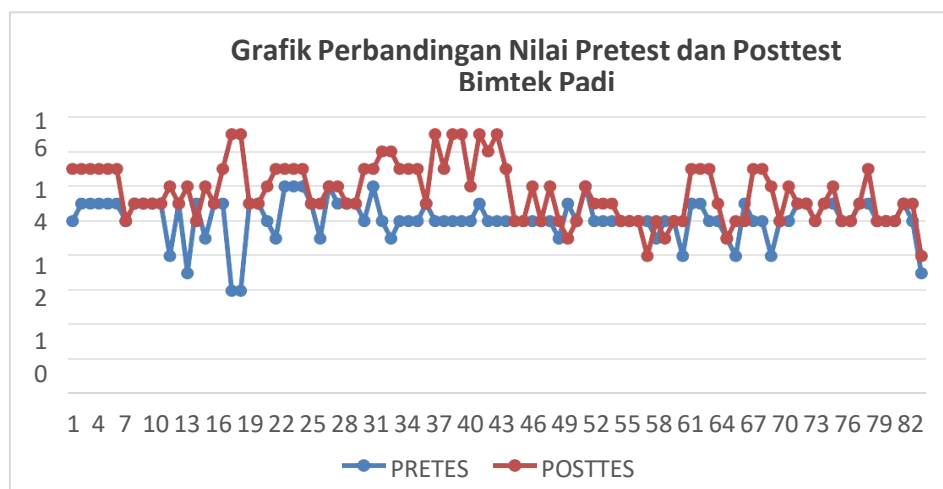
Pelaksanaan Bimtek Penguatan Kapasitas Penerap Standar diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari petani, calon penangkar, dan penyuluh dengan

karakteristik demografis dan sosial-ekonomi yang beragam. Peserta didominasi laki-laki (71%) dengan keterlibatan usia produktif yang cukup seimbang, yaitu <32 tahun (38%), 32–45 tahun (27%), dan >45 tahun (35%), menunjukkan adanya sinergi antara generasi muda yang adaptif terhadap inovasi dan petani senior yang berpengalaman. Mayoritas peserta berpendidikan SMA (68%) dan berprofesi sebagai petani (75%), didukung penyuluh (21%), sehingga sasaran bimtek dinilai tepat untuk mendorong penerapan teknologi di lapangan. Sebagian besar peserta memiliki lahan milik sendiri (93%) dengan distribusi luas lahan relatif berimbang antara skala kecil dan besar, yang menunjukkan potensi implementasi teknologi secara berkelanjutan. Data produktivitas menunjukkan rata-rata hasil 3,9 ton/ha pada musim hujan dan 4,15 ton/ha pada musim kering, sehingga diperlukan penguatan pendampingan teknis terutama pada musim hujan guna meningkatkan efektivitas penerapan teknologi budidaya dan produktivitas padi terstandar.

- Peningkatan Pengetahuan

Efektivitas pelaksanaan Bimtek Penerapan Padi Terstandar dievaluasi menggunakan metode One Group Pretest–Posttest Design, yaitu dengan membandingkan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Penilaian dilakukan melalui kuesioner tertutup kepada 150 peserta, dimana pretest digunakan untuk mengukur pengetahuan awal dan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, sedangkan posttest digunakan untuk menilai peningkatan pemahaman setelah bimtek. Perbandingan hasil pretest dan posttest menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan pada sebagian besar peserta, yang menandakan proses transfer materi dan teknologi berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat variasi kemampuan antar peserta.

Hasil tabulasi nilai menunjukkan bahwa skor posttest umumnya lebih tinggi dibandingkan pretest, sehingga materi bimtek dinilai relevan dan mampu meningkatkan pemahaman peserta. Namun, masih terdapat peserta dengan peningkatan yang rendah atau nilai stagnan, yang mengindikasikan perlunya penyempurnaan metode pembelajaran, terutama melalui pendekatan praktik lapangan, penyesuaian materi berdasarkan kemampuan awal peserta, serta pendampingan lanjutan agar penerapan standar budidaya padi dapat dilakukan secara optimal di lapangan.



Grafik 4. Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test Pelaksanaan Kegiatan

Analisis statistik menggunakan Uji Wilcoxon Match Pairs Test terhadap 97 responden dengan data lengkap menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$), yang berarti terdapat perbedaan nyata antara nilai pretest dan posttest. Sebanyak 56 peserta mengalami peningkatan nilai, 36 peserta memiliki nilai tetap, dan 5 peserta mengalami penurunan. Hasil ini membuktikan bahwa pelaksanaan bimtek berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan peserta, sehingga kegiatan dinilai efektif dan perlu dilanjutkan dengan penguatan metode pelatihan serta evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemerataan capaian kompetensi peserta.

Tabel 4. Hasil analisis Statistik Uji Wilcoxon

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Post Test - Pre Test	Negative Ranks	5 ^a	16.20	81.00
	Positive Ranks	56 ^b	32.32	1810.00
	Ties	36 ^c		
	Total	97		

d. Post Test < Pre Test

e. Post Test > Pre Test

f. Post Test = Pre Test

Test Statistics^a

	Post Test - Pre Test
Z	-6.255 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

c. Wilcoxon Signed Ranks Test

d. Based on negative ranks.

- **Respon Peserta Terhadap Pelaksanaan Bimtek**

Respon peserta terhadap pelaksanaan Bimtek Padi Terstandar menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kegiatan. Penilaian peserta mencakup aspek materi, metode pelaksanaan, narasumber, fasilitas, serta kemudahan penerapan di lapangan. Mayoritas responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa materi yang diberikan relevan dengan kebutuhan, mudah dipahami, serta mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap peserta. Metode pelaksanaan dinilai baik dan komunikatif, meskipun masih diperlukan peningkatan pada ketepatan waktu dan dukungan panitia agar pelaksanaan kegiatan lebih optimal dan interaktif.

Aspek narasumber memperoleh penilaian paling positif, terutama pada penguasaan materi, kemampuan komunikasi, serta pemberian kesempatan diskusi yang dinilai sangat baik. Fasilitas bimtek, termasuk ruang pelatihan, kelengkapan peralatan, modul, dan konsumsi, juga mendapat respon memuaskan. Selain itu, peserta menilai materi bimtek relatif mudah diterapkan di lahan dan memberikan manfaat dibandingkan metode budidaya sebelumnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan penguatan kapasitas penerap standar pertanian berjalan lancar dan berhasil mencapai tingkat kepuasan peserta di atas 95%, menunjukkan bahwa kegiatan bimtek telah tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas petani.

5.3.2. Demplot Budidaya Padi Terstandar Mendukung Swasembada Pangan di Sumatera Selatan

Kegiatan demplot Penguatan Kapasitas Penerap Standar dilaksanakan sebagai bentuk penerapan langsung Standar Nasional Indonesia (SNI 6233:2015) Benih Padi Inbrida di tingkat lapangan. Kegiatan ini bertujuan memberikan contoh praktik terbaik (best practice) penerapan standar budidaya padi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi penerap standar dalam memahami dan mengimplementasikan budidaya padi sesuai standar mutu nasional.

Demplot dilaksanakan pada lahan seluas 2 hektar di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Karang Agung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih karena memiliki agroekosistem yang representatif serta didukung fasilitas pembelajaran dan

pengamatan teknis yang memadai untuk kegiatan penerapan teknologi dan standar pertanian.

Kegiatan budidaya yang diterapkan meliputi tahapan sesuai SNI 6233:2015, yaitu pengolahan tanah, pemilihan dan penyiapan benih, serta penanaman. Pengolahan lahan dilakukan melalui dua tahap pembajakan, penggenangan selama 20–25 hari, perataan tanah menggunakan garu atau rotary, serta pengendalian gulma menggunakan herbisida. Benih yang digunakan merupakan benih padi inbrida bersertifikat varietas Cakrabuana dan Padjajaran yang memenuhi persyaratan mutu standar. Penanaman dilakukan dengan sistem tabur langsung, dimana benih terlebih dahulu direndam dalam campuran air dan insektisida selama satu malam sebelum ditanam. Pada lahan seluas 1 hektar varietas Cakrabuana, tanaman tercatat telah berumur 13 hari setelah tanam (HST) per tanggal 30 November.



5.4. Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standarisasi

Modernisasi pertanian tidak hanya berfokus pada mekanisasi, tetapi juga pada penerapan Standar Instrumen Pertanian (SIP) sebagai pedoman teknis berbasis ilmiah untuk memastikan proses usahatani berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan produk bermutu. Layanan penerapan SIP dan pengelolaan produk hasil standardisasi

menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas penerapan standar pertanian, khususnya pada komoditas padi sebagai penopang ketahanan pangan. Kegiatan tahun 2025 difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usahatani dan evaluasi penerapan standar perbenihan padi, mengingat masih rendahnya adopsi benih bersertifikat, kapasitas penangkar yang belum merata, serta lemahnya dokumentasi proses perbenihan. Melalui pendampingan terpadu, evaluasi lapangan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan penerapan standar secara konsisten, memperbaiki manajemen perbenihan, menghasilkan benih bermutu, serta mendukung capaian kinerja BRMP Sumatera Selatan dalam meningkatkan jumlah pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian.

5.4.1. Mengidentifikasi Kapasitas Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Perbenihan Padi

Pendampingan usahatani dalam penerapan standar pertanian merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman teknis, keterampilan, serta adopsi praktik budidaya berbasis standar seperti SNI dan IndoGAP. Melalui pendampingan langsung oleh pemerintah, penyuluh, dan tenaga teknis, petani memperoleh bimbingan mulai dari seleksi benih, pengaturan jarak tanam, pengendalian hama terpadu, hingga praktik panen dan pasca panen. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi petani serta mendorong penerapan teknologi pertanian secara nyata dan berkelanjutan. Selain itu, pendampingan juga bertujuan menurunkan risiko kesalahan teknis, seperti penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan, sehingga produktivitas dan mutu hasil meningkat sekaligus menjaga keamanan pangan.

BRMP Sumatera Selatan melaksanakan pendampingan perbenihan padi melalui koordinasi teknis dengan dinas pertanian, sosialisasi standar, monitoring dan evaluasi lapang, serta pembinaan petani penangkar melalui pertemuan, diskusi, kunjungan lapang, dan demonstrasi. Pendampingan juga mencakup dukungan dokumentasi, pencatatan, pemetaan lokasi, serta fasilitasi proses sertifikasi benih melalui kolaborasi lintas sektor bersama dinas, BPSB, dan penyuluh pertanian. Untuk menilai hasil pendampingan, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner kepada petani penangkar di Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar petani memiliki luas lahan

relatif sempit (<1,3 ha) sebesar 38,46%, yang menandakan pentingnya peningkatan efisiensi budidaya. Distribusi produktivitas memperlihatkan mayoritas petani berada pada kategori sedang (4,147–5,718 ton/ha) sebesar 46,15%, sementara 38,46% telah mencapai produktivitas tinggi. Data ini menunjukkan masih adanya peluang peningkatan produktivitas melalui pendampingan yang lebih terarah, terutama bagi petani dengan produktivitas rendah dan menengah.

Tingkat pengetahuan petani terhadap standar perbenihan padi tergolong tinggi, dengan 11 dari 13 indikator berada pada kategori tinggi, terutama pada tahap budidaya seperti pemilihan lokasi, varietas, persemaian, pemeliharaan tanaman, dan pengendalian hama. Namun, pengetahuan pada tahap panen dan pasca panen masih berada pada kategori sedang, menunjukkan perlunya penguatan kapasitas pada fase yang sangat menentukan mutu benih. Sementara itu, tingkat keterampilan petani berada pada kategori sedang dengan indeks 75%, menandakan adanya kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan praktik lapangan.

Tabel 3. Tingkat Pengetahuan Petani Terhadap Standar Perbenihan Padi

Indikator	Nilai Rata-rata (%)	Kategori
Pemilihan lokasi	95,80	Tinggi
Varietas	95,80	Tinggi
Benih	91,70	Tinggi
Persemaian	100,00	Tinggi
Olah lahan	100,00	Tinggi
Penanaman	100,00	Tinggi
Pemupukan	83,30	Tinggi
Pengairan	100,00	Tinggi
Pengendalian gulma	100,00	Tinggi
Pengendalian HPT	91,70	Tinggi
Roguing	91,70	Tinggi
Panen	62,50	Sedang
Pasca panen	61,90	Sedang

Sumber: Data primer diolah, 2025

Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sarana prasarana, dominasi kebiasaan tradisional, pelatihan yang masih bersifat teoritis, serta rendahnya penguasaan teknik panen dan pasca panen. Oleh karena itu, strategi peningkatan diarahkan pada pelatihan praktik lapangan, pengembangan demplot perbenihan, penguatan materi panen dan pasca panen, pendampingan intensif bagi petani dengan skor rendah, serta penyediaan sarana pasca panen sederhana. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan petani hingga mencapai kategori tinggi dan menghasilkan benih padi bermutu sesuai standar.

5.4.2. Mengevaluasi Penerapan Standar Pembenihan Padi Mendukung Tercapainya Perjanjian Kinerja BRMP Sumatera Selatan

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kepatuhan petani dalam penerapan standar perbenihan padi mencapai 77,97% dan berada pada kategori sedang menuju tinggi. Sebagian besar tahapan budidaya telah dilaksanakan sesuai standar, terutama pada persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang belum konsisten, khususnya pada pengendalian hama penyakit tanaman (HPT) dan penanganan pasca panen.

Tabel 4. Tingkat Kepatuhan Petani dalam Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Indikator	Persentase (%)	Kategori
Pemilihan lokasi	84,62	Tinggi
Varietas	100,00	Tinggi
Benih	84,62	Tinggi
Persemaian	84,62	Tinggi
Olah lahan	84,62	Tinggi
Penanaman	88,46	Tinggi
Pemupukan	100,00	Tinggi
Pengairan	100,00	Tinggi
Pengendalian gulma	100,00	Tinggi
Pengendalian HPT	53,85	Sedang
Rogouing	80,77	Tinggi
Panen	80,77	Tinggi
Pasca panen	73,50	Sedang

Sumber: Data primer diolah, 2025

Meskipun tingkat pengetahuan dan keterampilan petani tergolong baik, kepatuhan penerapan standar belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kebiasaan kerja, keterbatasan sarana, pertimbangan ekonomi, serta belum kuatnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan, penyederhanaan SOP, serta penguatan pengawasan dan motivasi kelompok tani agar penerapan standar dapat dilakukan secara konsisten.

Pendampingan yang dilakukan BRMP Sumatera Selatan menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas, kualitas hasil panen, efisiensi penggunaan sarana produksi, serta akses pasar petani. Seluruh responden menyatakan minat untuk terus menerapkan standar pada musim tanam berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan berbasis standar efektif dalam meningkatkan kinerja usahatani sekaligus mendukung keberlanjutan penerapan standar pertanian.

VI. KESIMPULAN

Laporan Tahunan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi telah berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan mandat modernisasi pertanian nasional.

Sepanjang tahun 2025, BRMP Sumatera Selatan berhasil menjalankan peran strategisnya dalam penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi, produksi benih sumber, serta pendampingan program prioritas Kementerian Pertanian. Kegiatan utama seperti produksi benih padi, pendampingan luas tambah tanam (LTT), serta penguatan kapasitas petani melalui bimbingan teknis dan demplot menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi dan pencapaian swasembada pangan di daerah.

Dari sisi kinerja anggaran, realisasi belanja mencapai sekitar 98,87%, mencerminkan pengelolaan keuangan yang optimal dan efisien. Selain itu, capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bahkan melampaui target hingga 168,06%, yang menunjukkan peningkatan produktivitas dan pemanfaatan aset serta layanan yang dimiliki.

Dalam aspek manajemen internal, dukungan tata usaha, pengelolaan BMN, peningkatan kompetensi SDM, serta sistem akuntabilitas dan pelaporan telah berjalan dengan baik. Hal ini turut diperkuat dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengelolaan risiko (termasuk gratifikasi), serta peningkatan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa dinamika seperti penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional, yang berdampak pada pengurangan kegiatan tertentu (misalnya perjalanan dinas). Namun, kondisi ini dapat diatasi dengan optimalisasi sumber daya yang ada.

Secara keseluruhan, kinerja BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dinilai baik dan progresif, serta mampu mendukung transformasi menuju pertanian modern. Laporan ini juga menjadi dasar penting dalam evaluasi dan perencanaan ke depan guna meningkatkan efektivitas program, kualitas layanan, serta kontribusi terhadap pembangunan pertanian yang berkelanjutan.